

ANALISA

1983—1

SOSIALISASI



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

*Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab*

Dewan Redaksi

Kirdi DIPOYUDO

Daoed JOESOEF

Rufinus LAHUR

J: PANGLAYKIM

A.M.W. PRANARKA

Pande Radja SILALAH

M. Hadi SOESASTRO

Harry Tjan SILALAH

Jusuf WANANDI

Ronald NANGOI

Redaksi Pelaksana

Kirdi DIPOYUDO

Ronald NANGOI

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X

Alamat

Redaksi : Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat,
Telepon 356532-5

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Kesehatan 3/13,
Jakarta Pusat, Telepon 349489

PENGANTAR REDAKSI	2
SOSIALISASI ORANG DEWASA	
<i>Orville G. BRIM (diterjemahkan oleh Kirdi DIPOYUDO)</i>	5
PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA, UPAYA MELESTARIKAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHI- DUPAN POLITIK DAN KENEGARAAN	
<i>A. Sudiharto DJIWANDONO</i>	20
KELUARGA: SUATU SARANA SOSIALISASI POLITIK	
<i>HARYANTO</i>	33
MASALAH-MASALAH DAN PERSPEKTIF KEBIJAKSANAAN KOMUNIKASI	
<i>Rufinus LAHUR</i>	44
BEBERAPA MASALAH DALAM PENGEMBANGAN PERS YANG BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB	
<i>SUKANTO</i>	58
PENDIDIKAN FORMAL SEBAGAI SARANA PEMBAURAN BANGSA	
<i>BABARI</i>	72
PERANAN WAYANG SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI	
<i>SUKANTO</i>	79

PENGANTAR REDAKSI

Sosialisasi pada dasarnya sinonim dengan pendidikan dalam arti luas. Pendidikan tidak hanya berarti bimbingan anak oleh orang dewasa, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menentukan kedudukan seorang dalam masyarakat. Lagi pula, pendidikan dapat dilihat sebagai seluruh komunikasi pengetahuan dan pembentukan nilai-nilai. Oleh sebab itu, kegiatan ini memiliki dimensi yang luas baik sebagai proses individualisasi maupun sosialisasi.

Dengan demikian sosialisasi dapat juga dilihat sebagai proses komunikasi pengetahuan dan pembentukan nilai-nilai. Dalam hal ini, perubahan-perubahan sosial dapat terjadi karena suatu masyarakat dapat berhubungan dengan masyarakat yang lain. Komunikasi yang berjalan baik antara berbagai pihak, seperti antara pemerintah dan masyarakat serta antar masyarakat dapat memperlancar jalannya pembangunan nasional. Dengan demikian komunikasi memiliki fungsi dan peranan yang mendasar dalam sosialisasi.

Sosialisasi meliputi pendidikan politik bagi setiap anggota masyarakat. Dalam kehidupan menegara dan pembangunan, perlu suatu pendidikan politik dalam hal mana nilai-nilai dasar negara, yaitu Pancasila, ditanamkan pada setiap warga negara Indonesia. Kita menyadari bahwa nilai-nilai dasar ini menjadi landasan filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Kita patut berbesar hati karena pendidikan politik rakyat sebenarnya sudah berjalan baik. Pendidikan dalam arti luas terlaksana melalui jalur formal dan jalur-jalur lain di luar jalur formal yang kesemuanya bertujuan untuk mensosialisasikan rakyat ke dalam nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan-kebiasaan dasar dalam kehidupan kemasyarakatan, di mana salah satu aspeknya adalah kehidupan kenegaraan.

Namun usaha-usaha komunikatif antara berbagai pihak, baik antara pemerintah dan masyarakat, maupun antara para kelompok masyarakat, harus

terus dilanjutkan dalam rangka memperjuangkan terwujudnya cita-cita bangsa. Apalagi kemajemukan masyarakat Indonesia, ditinjau dari sudut kebudayaan, tingkat perkembangan, perbedaan kadar sikap terbuka, letak geografis dan sebagainya bisa menimbulkan masalah-masalah sosial bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kemajemukan bangsa ini menuntut suatu komunikasi guna membantu integrasi bangsa berdasarkan Pancasila. Di samping itu, perkembangan sains dan teknologi terutama teknologi telekomunikasi menyebabkan dunia semakin terasa kecil dan saling berhubungan. Sebagai negara berkembang Indonesia ditantang untuk mempertahankan dan mengembangkan identitasnya.

Dalam rangka sosialisasi, berbagai bentuk atau wadah seperti keluarga, sekolah, media massa, media tradisional, dan kelompok bergaul dapat dimanfaatkan bagi komunikasi. Mereka dapat dianggap sebagai agen-agen komunikasi yang dapat membantu kegiatan sosialisasi di Indonesia.

Dalam rangka menunjang pemahaman mengenai sosialisasi, ANALISA edisi pertama tahun 1983 menurunkan tujuh buah karangan yang membahas masalah-masalah sosialisasi. Karangan pertama berjudul "Sosialisasi Orang Dewasa" dan diambil dari karangan Orville G. BRIM dan membahas tugas sosialisasi masyarakat khususnya orang dewasa. Melalui sosialisasi, setiap orang memperoleh kebudayaan kelompok atau kelompok-kelompoknya, yang meliputi status-status tradisional dalam masyarakat dan perilaku peranan.

Karangan kedua adalah tulisan A. Sudiharto DJIWANDONO mengenai hakikat pendidikan politik rakyat khususnya generasi muda. Suatu pendidikan politik dalam rangka mensosialisasikan rakyat ke dalam nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan-kebiasaan dasar merupakan hal yang mutlak bagi kehidupan politik dan kenegaraan. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara antara lain menyatakan: "Pendidikan politik rakyat ditingkatkan agar makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga ikut secara aktif dalam kehidupan kenegaraan."

Karangan ketiga "Keluarga: Suatu Sarana Sosialisasi Politik," tulisan HARYANTO membahas peranan politis keluarga dalam kehidupan bernegara. Peranan keluarga ini penting, karena keluarga merupakan sarana yang pertama kali dijumpai oleh seorang individu dalam hidupnya. Peranan keluarga di Indonesia dalam sosialisasi politik juga disoroti dalam karangan ini.

Karangan keempat berjudul "Masalah-masalah dan Perspektif Kebijakan Komunikasi" dan ditulis oleh Rufinus LAHUR. Tulisan ini berturut-turut mengemukakan masalah-masalah komunikasi, modal atau sumber,

dalam menghadapi masalah komunikasi, keadaan komunikasi, dan kebijakan komunikasi.

Dalam karangan kelima, SUKANTO membahas masalah-masalah pengembangan pers yang bebas dan bertanggung jawab. Kekaburan pengertian pers sering kali menimbulkan masalah antara pers dan pemerintah serta antara pers dan masyarakat yang mengakibatkan pembredelan dan diajukannya pers ke pengadilan. SUKANTO berusaha memperjelas batasan, fungsi, peranan, dan sifat pers di negara kita.

Karangan selanjutnya berjudul "Pendidikan Formal Sebagai Sarana Pembauran Bangsa," ditulis oleh BABARI. Karangan ini menunjukkan betapa pentingnya jalur pendidikan formal khususnya sekolah menengah yang berlokasi di kota bagi usaha-usaha pembauran bangsa. Lingkungan sekolah bisa menjadi salah satu wadah pembauran bangsa di mana anak-anak yang bersekolah di kota umumnya heterogen dan berasal dari latar belakang sosial budaya dan sosial ekonomi yang berbeda. Masalah-masalah yang menghambat usaha-usaha pembauran juga dikemukakan dalam karangan ini.

Dalam karangan terakhir, SUKANTO menyoroti peranan wayang di Jawa khususnya wayang kulit yang ada hubungannya dengan pandangan hidup atau sikap hidup orang Jawa. Karangan ini berturut-turut membahas perkembangan wayang selayang-pandang; hubungan wayang dengan pandangan hidup dan sikap hidup orang Jawa; dan wayang sebagai media komunikasi.

Januari 1983

REDAKSI

SOSIALISASI ORANG DEWASA*

Setiap masyarakat menghadapi tugas sosialisasi¹ para warganya ke dalam kebudayaan dasar dan dalam tingkat yang berbeda-beda menyediakan sosialisasi lebih lanjut pada waktu mereka memasuki bermacam-macam kedudukan pada berbagai tahap dalam siklus kehidupan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa lewat sosialisasi orang memperoleh kebudayaan kelompok atau kelompok-kelompoknya. Ini meliputi dua bagian pokok kebudayaan: *status-status* tradisional dalam masyarakat dan *perilaku peranan* yang berkaitan dengan kedudukan-kedudukan itu.

Sosialisasi yang diterima orang sebagai anak bukanlah persiapan yang memadai sepenuhnya untuk tugas-tugas yang dibebankan padanya pada tahun-tahun kemudian. Dalam proses menjadi dewasa, orang melewati serangkaian kedudukan sesuai dengan berbagai tahap dalam siklus kehidupan. Lagi pula, lingkungan antar-pribadinya bisa berubah akibat mobilitas geografis atau sosial dan sesuai dengan itu dituntut jenis-jenis baru perilaku. Walaupun sementara harapan masyarakat relatif stabil selama siklus kehidupan, banyak harapan lain berubah dari kedudukan ke kedudukan.

Dari sudut pandangan masyarakat rupanya diinginkan kemampuan untuk mensosialisasikan seorang dalam masa mudanya begitu rupa sehingga ia mampu menangani semua tugas yang akan dihadapinya di hari depan. Mungkin hal ini bisa dicapai dalam suatu masyarakat yang relatif tidak berubah dengan

*Diambil dari Orville G. Brim, "Adult Socialization," dalam David L. Sills, Ed., *International Encyclopedia of the Social Sciences* (New York-London, 1972), Jilid 14, hal. 555-561, oleh Kirdi DIPOYUDO.

¹Sebagai komunikasi pengetahuan dan pembentukan nilai-nilai, pendidikan adalah sama dengan sosialisasi. Lewat kegiatan ini orang memperoleh kebudayaan masyarakatnya.

sedikit mobilitas, di mana orang bisa melihat sebelumnya jalan seorang selama siklus kehidupan. Tetapi keadaan teratur ini biasanya tidak dapat dicapai; ia hanya dapat didekati pada tingkat yang berbeda-beda, dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Masyarakat tidak dapat berbuat lebih banyak daripada meletakkan dasar untuk belajar di kemudian hari, bila anak akan menghadapi peranan-peranan dewasa yang baru dilihat secara samar-samar.

Memang ada alasan-alasan lain mengapa sosialisasi masa anak-anak boleh jadi tidak efektif pada tahun-tahun kemudian. Salah satu sebab penting ialah bahwa tuntutan-tuntutan perilaku pada berbagai tahap siklus kehidupan bisa bentrok satu sama lain.¹ Terdapat banyak alasan lain. Dalam kasus mana pun, orang itu sendiri boleh jadi tidak mampu mempelajari ketrampilan-ketrampilan yang perlu. Kedua, boleh jadi ada agen yang absen, misalnya orang tua atau lembaga-lembaga kunci. Prosesnya juga bisa gagal karena dalam setiap masyarakat terdapat sub-sub kelompok dengan nilai-nilai yang menyimpang, dan mereka tidak menyiapkan si anak untuk melakukan tugas-tugas yang diharapkan dari dirinya oleh masyarakat yang lebih luas di kemudian hari. Akhirnya, agen sosialisasi yang spesifik, seperti orang tua, yang oleh masyarakat disertai tugas sosialisasi, mungkin tidak memadai untuk melakukan tugas itu karena tidak berminat atau kurang tahu atau terganggu secara emosional.

SOSIALISASI DEWASA

Untuk tujuan analisa, suatu tipologi sosialisasi dewasa bisa disusun demikian rupa sehingga menunjukkan asal mula kebutuhan bagi masing-masing jenis.

Pikiran pertama orang yang menghadapi suatu peranan baru tetapi praktis tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dalam kasus serupa itu masyarakat akan memerlukan sosialisasi baru, yang dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ialah sosialisasi yang *sah*, dalam arti bahwa ia diakui sebagai dibutuhkan masyarakat dan orangnya tidak diharapkan mempelajari peranan itu lebih dahulu. Ini berlaku untuk orang-orang yang bergerak melewati serangkaian peranan belajar dan latihan-latihan tertentu. Jenis yang kedua dapat disebutkan sebagai *tidak sah*, dalam arti bahwa orangnya seharusnya sudah mempelajarinya lebih dahulu. Contoh-contoh di sini paling sering datang dari peranan suami-isteri dan orang tua: kekurangan-kekurangan yang bisa merupakan akibat kenyataan bahwa orang tuanya tidak memperhatikan sosialisasi orangnya untuk peranan itu atau akibat berbagai pengaruh lain atas

¹Lihat Ruth Benedict, "Continuities and Discontinuities in Cultural Conditioning," dalam Patrick Mullahy (Ed.), *A Study on Interpersonal Relations* (New York, 1949), hal. 297-308.

perkembangan awalnya. Di mana kebutuhan akan sosialisasi baru itu diakui sebagai sah, orang biasanya menemukan mekanisme kelembagaan formal dalam masyarakat untuk memberikannya. Ini meliputi sekolah, program latihan kejuruan dan lain sebagainya. Di mana kebutuhan itu tidak sah, lembaga-lembaga pendidikan kembali biasanya tidak ada, biarpun kenyataan bahwa lembaga-lembaga semacam itu terdapat di beberapa bidang, seperti program memberikan nasihat kepada keluarga, mengungkapkan meningkatnya pengakuan bahwa orang tidak harus selalu disalahkan tidak mengetahui peranan semacam itu.

Macam sosialisasi dewasa lain yang penting berhubungan dengan *resosialisasi*. Di sini orangnya mengetahui sesuatu tentang peranan yang dimaksud, tetapi yang diketahuinya salah. Untuk maksud simetri kita dapat membedakan dua jenis resosialisasi menurut dimensi yang digunakan di atas: sah tidaknya kebutuhan akan resosialisasi. Kita mulai dengan yang pertama karena lebih dikenal. Di sini resosialisasi meliputi rehabilitasi penjahat, menangani anak nakal akibat manipulasi lingkungan, dan karya terapeutis untuk para penderita neurose kelas menengah. Dalam ketiga kelas ini resosialisasi dimaksud untuk memperbaiki sosialisasi sebelumnya yang tidak ada sanksinya.

Jenis resosialisasi yang sah - di mana orang menerima sosialisasi, tetapi secara salah, sehingga resosiasiasinya dianggap sah dan oleh sebab itu disahkan oleh masyarakat - kurang dikenal. Ini terungkap dalam perubahan dari konsepsi ideal menjadi konsepsi realistik mengenai suatu peranan, seperti tergambar dalam hubungan pendidikan profesional dengan praktek profesional kemudian¹ dan, secara lebih umum, sehubungan dengan mitos masa anak-anak mengenai perilaku orang dewasa, yang jelas berfungsi untuk mempertahankan stabilitas pada tahun-tahun awal tetapi harus dihilangkan pada tahun-tahun kemudian bila si anak memegang peranan dewasa.

STUDI-STUDI SOSIALISASI

Kebanyakan karya dalam studi perkembangan kepribadian hanya sedikit mengatakan kepada kita bagaimana seorang mengembangkan antaraksinya yang timbal-balik dan diatur oleh masyarakat dengan sesama manusia atau bagaimana ia memahami kewajiban-kewajiban peranan dan membedakan kedudukan-kedudukan penting dalam masyarakatnya. Terdapat alasan-alasan historis. Kebanyakan karya mengenai sosialisasi datang dari bidang perkembangan anak. Tetapi tekanan sejak semula, dalam pusat-pusat kesejahteraan anak yang didirikan sesudah 1920, lebih diletakkan pada pendewasaan dari-

¹Lihat Howard S. Becker dan lain-lain, *Boys in White: Student Culture in Medical School* (University of Chicago Press, 1961).

pada atas sosialisasi, lebih pada perkembangan daripada atas kegiatan belajar. Kebanyakan hasilnya adalah studi perkembangan mental dan fisik, dan jauh lebih sedikit studi segi-segi sosial dan emosional perkembangan. Rangsangan untuk sebagian besar karya mengenai sosialisasi sekarang ini datang dari sumber lain: karya Freud dan teori-teori kepribadian yang berkaitan. Akibat pengalaman hidup awal atas perkembangan sifat-sifat kepribadian yang dianggap sebagai ciri-ciri orang yang fundamental dan menétap adalah fokus awal studi. Baru kemudian, sekitar 1930, konsep-konsep yang muncul dari antropologi budaya, khususnya relativitas budaya dan plastisitas kodrat manusia (human nature), memperluas lingkup studi kepribadian dan mendatangkan konvergensi perhatian tersebut di atas. Karya tradisional mengenai perkembangan anak, yang dikombinasikan dengan konsep-konsep yang berasal dari teori-teori klinis kepribadian dan diperbaiki oleh perspektif-perspektif lintas budaya, menghasilkan beberapa studi sosialisasi terkenal oleh Sears dan kawan-kawan (1957),¹ Whiting (1963),² Levy (1943)³ dan lain-lain. Akan tetapi karya ini, betapa besarpun sumbangannya untuk pengetahuan kita, belum membahas peranan belajar sebagai isi sosialisasi. Kemungkinan besar karena alasan ini karya itu tidak membawa pada pembahasan perubahan kepribadian dalam tahap hidup kemudian.

Terdapat banyak analisa sosialisasi anak-anak dalam keluarga. Variasi-variasi dalam praktek perawatan anak telah didaftar dan dianalisa oleh ratusan peneliti. Tinjauan-tinjauan di bidang ini meliputi karya-karya Hoffman dan Lippitt (1960),⁴ Clausen dan Williams (1963),⁵ Bronferbrenner (1958),⁶ Brim (1957),⁷ dan beberapa bab karya Hoffman dan Hoffman (1964).⁸ Usaha-usaha untuk menemukan dimensi-dimensi dasar yang penting untuk klasifi-

¹Lihat Robert R. Sears dan lain-lain, *Patterns of Child Rearing* (Evanston, Ill., 1957).

²Beatrice Whiting, *Six Cultures: Studies of Child Rearing* (New York, 1963).

³David M. Levy, *Maternal Overprotection* (New York, 1943).

⁴Lois W. Hoffman dan Ronald Lippitt, "The Measurement of Family Life Variables," dalam Paul Mussen (Ed.), *Handbook of Research Methods in Child Development* (New York, 1960), hal. 945-1013.

⁵John A. Clausen dan Judith R. Williams, "Sociological Correlates of Child Behavior," dalam National Society for the Study of Education, *Child Psychology* (University of Chicago Press, 1963), Part 1, hal. 62-107.

⁶Urie Bronferbrenner, "Socialization and Social Class Through Time and Space," dalam Society for the Psychological Study of Social Issues, *Readings in Social Psychology* (New York, 1958), hal. 400-425.

⁷Orville G. Brim, "The Parent-Child Relation as a Social System: I. Parent and Child Roles," dalam *Child Development*, 28 (1957), hal. 345-364.

⁸Martin L. Hoffman dan Lois W. Hoffman, (Ed.), *Review of Child Development Research* (New York), Vol. 1 (1964).

kasi praktek-praktek sosialisasi semacam itu menunjukkan secara cukup konsisten selama lebih dari satu generasi bahwa praktek-praktek bisa dilukiskan secara efektif dengan dua dimensi fundamental: efektivitas positif sebagai lawan efektivitas negatif, dan dominasi sebagai lawan sikap membiarkan. Orang dapat mencatat bahwa analisa-analisa sosialisasi anak-anak kini kurang memperhatikan metode-metode latihan, seperti pendidikan mengenai kebersihan dan kewajiban-kewajiban di rumah, daripada mutu hubungan antar-pribadi. Diandaikan bahwa ciri-ciri hubungan - seperti kedua dimensi tersebut di atas - lebih penting bagi efektivitas sosialisasi daripada teknik-teknik pendidikan yang spesifik.

Karya tradisional dalam sistem sekolah mengenai proses sosialisasi meliputi studi mengenai proses mengajar. Dapat disebutkan laporan komprehensif oleh Ryans (1960).¹ Akibat besarnya jumlah studi semacam itu tidaklah mungkin mengomentarkannya di sini. Lippitt dan kawan-kawan (1962)² memikirkan kembali studi sosialisasi sekolah dan membuka bidang-bidang riset yang baru dan memberikan harapan yang sejalan dengan bidang-bidang studi dalam lingkungan sosialisasi keluarga dan lain-lain lingkungan sosialisasi bukan sekolah.

Dibandingkan dengan banyak informasi yang tersedia mengenai periode-periode usia sebelumnya, hanya terdapat sedikit pengetahuan mengenai kelompok-kelompok usia yang lebih tua. Hanya terdapat sedikit riset mengenai teknik-teknik sosialisasi untuk peranan suami-isteri dan orang tua. Di antara sedikit analisa teknik-teknik yang digunakan dalam hubungan itu terdapat karya Howard S. Becker dan kawan-kawan (1961).³ Karya mengenai pendidikan formal orang dewasa yang paling berharga adalah dalam pendidikan kehidupan keluarga. Kebanyakan studi mengenai pendidikan kehidupan keluarga adalah analisa-analisa yang sangat berharga mengenai cara menangani sosialisasi dewasa, dan catatan yang dibuat dalam studi-studi itu mengenai metode-metode yang digunakan dan sebab-sebab perubahan dalam kepribadian dewasa berlaku untuk lain-lain proses sosialisasi dewasa. Studi-studi itu menunjukkan perlunya menggunakan antar-aksi kelompok sebagai konteks belajar dan pertukaran dalam kelompok sebagai metode yang paling efektif. Ini mengalir dari kenyataan bahwa orang dewasa bukanlah sebuah *tabula rasa* (papan kosong) dan bahwa masalah pendidikannya adalah masalah perubahan, masalah membusak apa yang ada dan menggantinya dengan

¹David G. Ryans, *Characteristics of Teachers: Their Descriptions, Comparison, and Appraisal* (Washington, 1960).

²Ronald Lippitt dan Elmer Van Egmond (Ed.), *Inventory of Classroom Study Tools for Understanding and Improving Classroom Learning Processes* (Ann Arbor, 1962).

³Howard S. Becker dan lain-lain, *op. cit.*

sesuatu yang baru. Suatu analisa terperinci mengenai metode-metode pendidikan dewasa ini secara khusus dibuat untuk pendidikan orang tua (1959).¹

Pada umumnya kita dapat mengatakan bahwa nilai pengetahuan kita mengenai teknik-teknik sosialisasi terletak dalam apa yang ditunjukkan sebagai tak diinginkan - dalam informasi yang diberikannya kepada kita mengenai prosedur-prosedur yang menimbulkan perlawanan, represi, kebencian, pelarian, penarikan dan konformitas perilaku yang habitual (kebiasaan). Tetapi kita jauh belum mengetahui metode-metode mana lebih efektif daripada lain-lain untuk mencapai tujuan-tujuan sosialisasi. Boleh jadi kita lebih banyak mengetahui teknik-teknik pengajaran di bidang pendidikan daripada dalam lain-lain konteks sosialisasi; akan tetapi di sini masalahnya boleh jadi lebih sederhana karena tuntutan utama ialah bahwa peneliti mendapat informasi dan bukan mengetahui sikap-sikap dan alasan-alasan. Mengenai keluarga, rupanya baru sekarang kita mengetahui beberapa cara bagaimana prosedur sosialisasi menghasilkan internalisasi nilai-nilai orang tua yang lebih besar. Di tingkat dewasa jumlah studi evaluasi yang baik adalah kecil dan kebanyakan berasal dari bidang pendidikan kehidupan keluarga dan counseling kesehatan mental.² Pemahaman kita mengenai efektivitas teknik-teknik masih terbatas: efektivitas rupanya bergantung pada hakikat isi yang disalurkan, ciri-ciri orang-orang yang menerima sosialisasi, hubungan mereka dengan agen sosialisasi dan faktor-faktor serupa itu.

Studi-studi akan memberikan sumbangan berharga kalau mengaitkan teknik-teknik dan akibat-akibatnya dengan teori-teori yang lebih umum mengenai sosialisasi dan kepribadian, dan secara demikian membawa ke suatu pemahaman umum mengenai sosialisasi, dan bukan tinggal studi-studi sempit mengenai efektivitas teknik-teknik pendidikan.

BATAS-BATAS SOSIALISASI KEMUDIAN

Batas-batas sosialisasi pada usia kemudian di satu pihak diletakkan oleh kemampuan biologis seorang dan di lain pihak oleh beban belajar awal. Efektivitas sosialisasi kemudian adalah suatu konsekuensi antaraksi kedua batas itu, ditambah batas jenis-jenis metode sosialisasi yang tersedia dalam masyarakat. Pada gilirannya metode-metode itu pertama-tama bergantung pada pengetahuan yang tersedia mengenai perilaku manusia dan secara lebih terbatas pada perkembangan-perkembangan teknologi.

¹Orville G. Brim, *Education for Child Rearing* (New York, 1959).

²*Ibid.*

Batas-batas Biologis

Pada mulanya tuntutan-tuntutan suatu masyarakat kepada orang-orang dewasa disesuaikan dengan kemampuan rata-rata orang. Orang-orang yang karena alasan-alasan biologis jauh di bawah rata-rata itu biasanya tidak dapat melewati siklus kehidupan secara alamiah dan oleh sebab itu tidak jarang terpaksa mengalami sosialisasi hidup kemudian. Akan tetapi ada dua cara dengan mana pembatasan-pembatasan biologis mendatangkan ketidakmampuan-ketidakmampuan dan secara demikian pembatasan-pembatasan atas sosialisasi hidup kemudian. Yang pertama terutama terjadi dalam suatu masyarakat kelas terbuka dengan tingkat tinggi motivasi prestasi. Mobilitas ke atas ke peranan-peranan yang semakin banyak tuntutannya bisa membawa seorang ke kedudukan-kedudukan yang tuntutan-tuntutannya tidak dapat dipenuhinya karena keterbatasan inteligensi atau kekuatan, atau lain-lain sifat biologis. Yang kedua terjadi apabila peperangan dan lain-lain bencana menghancurkan perlindungan orang oleh masyarakat dari dampak langsung alam, dan kebudayaan tidak lagi cocok untuk rata-rata orang. Dengan demikian orang-orang yang secara biologis memadai untuk peranan-peranan yang dijumpai dalam perputaran siklus kehidupan mereka bisa secara mendadak merasa tidak mampu hidup dalam keadaan yang baru dan primitif.

Batas-batas Pendidikan Sebelumnya

Terdapat sejumlah alasan mengapa akibat-akibat pengalaman dini menempatkan batas-batas penting atas sosialisasi kemudian. Pertama, sikap-sikap yang dipelajari dalam masa kanak-kanak sangat tahan lama karena secara terus-menerus diajarkan dan diperkuat (1960).¹ Kedua, ada alasan kuat untuk percaya bahwa selama sosialisasi dini sebagian terbesar bahan tak-sadar kepribadian dikumpulkan. Kontinuitas kepribadian individual (dan rupanya juga cara-cara pertahanan yang khas) secara demikian dipertahankan oleh inersia kekuatan-kekuatan tak-sadar yang secara relatif tak terbuka untuk perubahan oleh sosialisasi kemudian. Akhirnya diisyaratkan (1962)² bahwa siklus kehidupan manusia, seperti siklus jenis-jenis di bawah manusia, bisa membuat periode-periode kritis di mana orang-orang harus mempelajari hal-hal tertentu untuk berkembang lebih lanjut. Kegagalan mempelajarinya selama periode yang tepat bisa membuat pelajaran kemudian tidak mungkin.

¹Orville G. Brim, "Personality Development as Role-learning," dalam Ira Iscoe dan Harold Stevenson (Ed.), *Personality Development in Children* (Austin, 1960), hal. 127-159.

²Bettye M. Caldwell, "The Usefulness of the Critical Period Hypothesis in the Study of Filial Behavior," dalam *Merrill-Palmer Quarterly of Behavior and Development*, 28 (1962), hal. 229-242.

Apa pun kegunaan teori-teori ini dan lain-lain teori, pembatasan-pembatasan biologi dan kemampuan belajar atas sosialisasi kemudian jelas ada, biarpun belum dimengerti hakikatnya. Namun argumen-argumen yang kuat untuk akibat-akibat pengalaman kehidupan awal yang kuat tidak boleh menghalang-halangi studi perubahan-perubahan besar dan penting yang bisa terjadi dalam hidup kemudian. Kenyataannya ialah bahwa bukti mengenai akibat-akibat pengalaman hidup awal sampai sekarang kebanyakan bersifat sejarah suatu kasus, yang berasal dari praktek klinis. Terlalu sedikit perhatian diberikan kepada studi perubahan-perubahan penting yang bisa terjadi sesudah masa anak-anak sebagai akibat pengalaman sosialisasi. Telah mulai muncul beberapa studi penting;¹ diharapkan lebih banyak studi akan menyusul.

Hubungan dengan Agen Sosialisasi

Kenyataan bahwa sosialisasi anak biasanya jauh lebih efektif daripada sosialisasi dewasa sebagian dapat diterangkan oleh adanya berbagai jenis hubungan antara individu dan agen atau badan sosialisasi pada berbagai tahap dalam siklus kehidupan. Hubungan antara anak dan orang tuanya adalah sangat afektif; sebaliknya konteks sosialisasi dewasa kemungkinan besar jauh kurang diisi emosi - dalam kata-kata Parson ia ditandai "netralitas afektif."² Lagi pula, orang tua yang melakukan sosialisasi anak kiranya akan menggunakan kekuasaan secara lebih terbuka dan terus-menerus, sehingga si anak sulit tidak menyadari dirinya sebagai pihak yang lebih lemah dalam situasi itu. Sebaliknya agen-agen sosialisasi dewasa lebih menghimbau akal budi dan kepentingan diri orang yang menerima sosialisasi, dan penggunaan kekuasaan hanya merupakan sarana terakhir.

Paling tidak terdapat satu konsekuensi besar perbedaan ini untuk hasil-hasil sosialisasi: sosialisasi dewasa membatasi dirinya pada perhatian untuk perilaku, bukan motivasi dan nilai-nilai. Kenyataannya ia kurang mampu mengajarkan nilai-nilai dasar dan kemungkinan besar menuntut suatu hubungan yang sejalan dengan hubungan masa anak-anak untuk mencapai perubahan-perubahan nilai dasar yang ekuivalen. Ini memang bisa terjadi - suatu contoh adalah pertobatan keagamaan dewasa, di mana hubungan submisif (tunduk) dan pertukaran afektif yang tinggi dengan pemimpin agama

¹Antara lain Starke R. Hathaway dan Elio D. Monachesi, *An Atlas of Juvenile MMPI Profiles* (Minneapolis, 1961); Jerome Kagan dan Howard A. Moss, *Birth to Maturity: A Study in Psychological Development* (New York, 1962); Suzanne K. Reichard dan lain-lain., *Aging and Personality: A Study of Eighty-seven Older Men* (New York, 1962); dan Bernice L. Neugarten dan lain-lain, *Personality in Middle and Late Life* (New York, 1964).

²Talcott Parsons, *The Social System* (Glencoe, Ill., 1951), hal. 59-61.

melandasi pergeseran radikal dalam sistem nilai orang dewasa itu.¹ Contoh lain ialah contoh ekstrim kamp-kamp tawanan perang. Usaha "cuci otak" (brainwashing) dan penghancuran perlawanan terhadap nilai-nilai musuh menunjukkan suatu konteks di mana para penawan menggunakan kekuasaan ekstrim mereka dalam suatu manipulasi sengaja keseluruhan afeksi, dari penolakan dan kebencian di satu pihak sampai dukungan dan simpati positif di lain pihak, dan secara demikian menempatkan tawanan dalam suatu posisi yang mirip dengan posisi anak dengan orang tuanya.²

Disimpulkan bahwa untuk melakukan resosialisasi dasar orang dewasa mengenai motif-motif dan nilai-nilai, masyarakat harus melembagakan kekuasaan tinggi dan hubungan afektif yang merupakan ciri kegiatan belajar anak.

PERUBAHAN-PERUBAHAN DALAM ISI SOSIALISASI

Isi sosialisasi sudah barang tentu berbeda secara berarti pada tahap-tahap siklus kehidupan yang berlainan dan dalam lembaga-lembaga sosial utama yang berbeda. Karena kebutuhan akan sosialisasi dan batas-batasnya berbeda menurut tahap siklus kehidupan, kemungkinan besar jenis-jenis isinya juga berbeda sesuai dengan itu. Kita dapat membedakan lima jenis pokok perubahan dalam isi sosialisasi sebagai berikut.

Mungkin perubahan yang paling penting ialah *pergeseran isi dari perhatian untuk nilai-nilai dan motif-motif menjadi perhatian untuk perilaku yang terang-terangan*. Masyarakat menganggap bahwa orang dewasa mengetahui nilai-nilai yang harus diusahakan dalam bermacam-macam peranan, bahwa ia ingin mengusahakannya dengan sarana-sarana yang tepat secara sosial, dan bahwa satu-satunya hal yang perlu dilakukan ialah mengajarnya apa yang harus dilakukan. Dengan demikian masyarakat bersedia menggunakan jauh lebih sedikit waktu untuk melatih kembali motivasi dan nilai-nilai daripada untuk melatih anak-anak. Dimengerti bahwa mengajarkan nilai-nilai dan motivasi dasar adalah suatu tugas yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga yang melayani anak-anak, terutama keluarga, dan lembaga-lembaga itu dihimpun untuk melakukan tugas itu.

¹Jerome D. Frank, *Persuasion and Healing: A Comparative Study of Psychotherapy* (Baltimore, 1961).

²Lihat juga Albert Somit, "Brainwashing," dalam David L. Sills (Ed.), *op. cit.*, Jilid 2, hal. 138-142; dan Albert D. Biderman, "Internment and Custody," dalam David L. Sills (Ed.), *op. cit.*, Jilid 8, hal. 139-147.

Perbedaan itu rupanya langsung berasal dari pembatasan-pembatasan atas usaha belajar dalam hidup kemudian sehingga tidaklah praktis mencoba suatu resosialisasi yang lengkap. Boleh jadi biayanya terlalu tinggi atau tidak efisien dari sudut pandangan masyarakat untuk menggunakan terlalu banyak waktu guna mengajarkan hal-hal baru kepada seorang tua. Mungkin hanya dalam kasus di mana kebutuhan akan suatu jenis tenaga tertentu sangat besar dan soal efisiensi menjadi sekunder dibandingkan dengan kebutuhan akan personal dapat dilakukan usaha resosialisasi yang intensif dan mahal untuk orang-orang dewasa.

Masyarakat paling tidak mempunyai dua pemecahan untuk masalah resosialisasi ini. Yang satu adalah antisipatoris, di mana perhatian diberikan kepada seleksi calon-calon untuk suatu organisasi dewasa, dengan maksud untuk menyaring mereka yang tidak mempunyai motif dan nilai-nilai yang tepat untuk peranan-peranan yang diantisipasi itu. Ini ikut menjamin bahwa mereka yang masuk organisasi tidak akan menimbulkan masalah-masalah sulit bagi program sosialisasinya. Secara demikian orang-orang dewasa kiranya disaring dan ditempatkan dalam situasi-situasi sosial di mana mereka sangat cocok sehubungan dengan nilai-nilai dan motif-motif yang mereka pelajari dalam sosialisasi awal hidup mereka.¹ Pemecahan yang kedua ialah bahwa masyarakat bisa menerima perilaku yang selaras saja sebagai bukti sosialisasi yang memuaskan dan bisa melepaskan segala perhatian untuk sistem nilai. Ini mengandung risiko, karena kalau sistem sosialnya mengalami tekanan, konformitas itu, karena dangkal, cepat macet.

Perubahan kedua dalam isi sosialisasi bisa dibatasi sebagai suatu perubahan dari penerimaan bahan baru menjadi suatu *sintese bahan lama*. Pada waktu seorang bergerak melewati siklus kehidupan, ia mengumpulkan sejumlah besar tanggapan, baik afektif maupun perilaku. Ini dihimpun menjadi peranan-peranan dan, pada tingkat yang lebih spesifik, episode-episode dalam suatu peranan. Tanggapan-tanggapan itu bisa dipisahkan dari konteks di mana orang mempelajari dan menggunakannya, dan digabungkan dengan lain-lain dalam suatu kombinasi baru yang cocok sebagai perilaku sosial yang tanggap terhadap tuntutan-tuntutan baru kedewasaan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa isi yang diperoleh dalam sosialisasi dewasa bukan bahan baru melainkan pengumpulan dan sintese unsur-unsur gudang tanggapan yang telah dipelajari, mungkin dengan tambahan beberapa hal yang baru dipelajari bila diperlukan untuk melengkapi tindakan sosial kompleks yang dituntut dalam suatu situasi tertentu. Sosialisasi pada tahap-tahap hidup kemudian rupanya lebih menekankan praktek kombinasi baru ketrampilan-ketrampilan

¹Nicholas Hobbs, "A Psychologist in the Peace Corps," dalam *American Psychologist*, 18 (1963), hal. 47-55.

yang telah diperoleh daripada usaha mengajarkan tanggapan-tanggapan yang baru sama sekali.

Perubahan ketiga dalam isi sosialisasi ialah *transformasi idealisme menjadi realisme*. Bila orang menjadi dewasa, masyarakat menuntut agar ia menjadi lebih realistis dan mengesampingkan idealisme kekanak-kanakannya. Perubahan dalam isi harapan-harapan meliputi perbedaan antara kedudukan-kedudukan. Kegiatan belajar awal mencakup struktur status yang formal; kegiatan belajar kemudian memperhatikan struktur status yang sebenarnya, yang sering boleh jadi informal dan tidak diakui. Seorang yang meragukan bahwa yang sebenarnya dan yang formal itu berlainan disebut sinis. Sebaliknya seorang yang tidak membuat perbedaan itu dianggap naif. Dalam sosialisasi anak muda tidak diajar mendapat banyak pelajaran mengenai sistem informal. Dengan demikian pada tahun-tahun awal boleh jadi ia percaya bahwa yang sebenarnya dan yang formal itu hampir sama. Ini bermanfaat untuk mempertahankan dan mengesahkan perbedaan-perbedaan status formal dan melindunginya terhadap perubahan. Akan tetapi bila si anak menjadi dewasa, segi-segi realistis diferensiasi status juga harus diajarkan agar sistemnya berfungsi secara efektif.

Erat berkaitan adalah belajar membedakan antara tuntutan-tuntutan peranan yang ideal dan apa yang sebenarnya dituntut dari seorang dalam suatu peranan. Di sini, seperti dalam kasus perbedaan-perbedaan status, pengajaran tuntutan-tuntutan peranan yang ideal menghasilkan suatu idealisme yang diinginkan yang memperkuat dan mengabadikan cita-cita masyarakat. Bila menjadi dewasa, si anak belajar mengambil tempatnya dalam masyarakat lebih sesuai dengan harapan-harapan realistis orang-orang lain daripada dengan norma-norma ideal.

Jenis keempat perubahan dalam isi sosialisasi ialah ke arah perhatian yang lebih besar untuk mengajar orang *mempertemukan tuntutan-tuntutan yang berlawanan*. Bila bergerak melewati siklus kehidupan, orang terpaksa mengembangkan cara-cara untuk memilih antara kewajiban-kewajiban peranan yang berlawanan. Kemungkinan-kemungkinan konflik antara harapan-harapan anggota-anggota yang menjadi acuan dapat dibedakan menjadi dua jenis utama. Pertama, terdapat *konflik dalam peranan* (intrarole), di mana harapan-harapan perilaku dua atau lebih banyak orang atau satu orang sehubungan dengan bermacam-macam segi peranannya, bentrok. Misalnya isteri dan majikan seorang bisa berbeda dalam harapan-harapan mereka mengenai prestasinya dalam pekerjaan. Isteri juga dapat mengharapkan agar suaminya menjadi teman dan guru anaknya. Kedua, terdapat *konflik antar peranan* (interrole), yang juga dapat dibedakan menjadi dua jenis: konflik antara dua atau lebih banyak orang mengenai dua peranan yang berbeda, seperti

antara tuntutan majikan akan prestasi kerja dan tuntutan isteri akan prestasi dalam keluarga, dan konflik antara harapan-harapan akan prestasi seorang dalam dua peranan yang berbeda, seperti antara harapan isteri mengenai perilaku suami dalam pekerjaan dan di rumah.

Kebutuhan untuk belajar bagaimana menangani konflik-konflik itu lebih banyak muncul dalam hidup kemudian karena dua alasan. Pertama, kalau norma budayanya ialah bahwa anak-anak harus dilindungi agar tidak melihat konflik-konflik kehidupan maka tidak akan diajarkan sesuatu mengenai cara mengakomodasinya. Kedua, dalam hidup kemudian terdapat lebih banyak peranan maupun kompleksitas dalam peranan-peranan, sehingga kemungkinan konflik peranan adalah lebih besar.

Jadi dengan tambahnya usia orang mempelajari *cara-cara penyelesaian konflik*, yang dilukiskan oleh Ralph Linton (1945)¹ dengan baik: menghindari situasinya, mundur dari konflik secara yang dapat diterima, dan menyusun tuntutan-tuntutan yang berlawanan satu sesudah yang lain, sehingga konfliknya lenyap. Lagi pula, orang mempelajari suatu metode lain yang sangat penting, yang sering dilupakan. Kenyataannya ialah bahwa dalam setiap masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang diakui untuk menyelesaikan jenis-jenis konflik tertentu yang muncul dari tuntutan-tuntutan yang berlawanan dari anggota-anggota yang menjadi acuan. Peraturan-peraturan ini mengatur penyelesaian konflik antara tuntutan-tuntutan akan waktu dan loyalitas orang, dan biasanya, biarpun tidak selalu, lebih termasuk konflik antar peranan daripada konflik dalam peranan. Contohnya adalah "Lakukan apa yang diminta majikan, bahkan kalau hal itu berarti bahwa anda tidak mempunyai banyak waktu untuk anak-anak anda," atau "Memihaklah pada isteri anda bila ia menertibkan anak-anak, bahkan kalau anda merasa bahwa ia salah." Suatu perubahan berarti dalam isi sosialisasi dalam usia lebih tua adalah perhatian yang diberikan kepada cara-cara menyelesaikan konflik lewat peraturan-peraturan itu.

Ciri kelima perubahan dalam isi sosialisasi adalah *dimensi generalitas - spesifitas*. Dalam konteks diskusi sekarang ini, itu berarti bahwa apa yang diajarkan dalam sosialisasi bisa berlaku untuk banyak situasi sosial atau hanya untuk beberapa. Dimensi generalitas lawan spesifitas bisa diterapkan pada kedua komponen tuntutan-tuntutan peranan, yaitu pada nilai-nilai dan sarana-sarana.

Sebagai anak, orang dilatih secara sengaja atau tidak oleh agen-agen sosialisasi dalam tujuan-tujuan dan perilaku yang cocok untuk kelaminnya. Ter-

¹Ralph Linton, *The Cultural Background of Personality* (New York, 1945).

dapat gaya pria dan gaya wanita untuk melakukan banyak hal, dan gaya-gaya itu dipelajari sejak kecil. Masyarakat berusaha mendorong anak untuk melakukan perilaku itu dan mengajar nilai-nilai yang diharapkan dari dirinya, dan melatihnya dalam ketrampilan-ketrampilan yang perlu. Ciri-ciri itu bersifat umum, dalam arti diperlukan dalam banyak situasi yang akan dihadapinya dalam masyarakat, baik sebagai komponen penting perilakunya maupun sebagai warna segi-seginya yang lain.

Halnya serupa untuk perbedaan-perbedaan budaya dalam nilai-nilai dasar, seperti nilai-nilai yang berkaitan dengan prestasi, lain-lain orang, alam dan keluarga, dan bahkan semua orientasi nilai umum, yang menurut Florence Kluckhohn menolong membedakan antara kelompok-kelompok budaya yang besar.¹ Nilai-nilai itu diperoleh sejak kecil (dan, berlainan dengan peranan-peranan kelamin, dengan lebih sedikit pelajaran), dan memberikan bentuk serta nada kepada pelaksanaan banyak peranan dalam masyarakat.

Individu disosialisasikan untuk kedudukan sosial ekonominya, atau gaya hidup suatu tingkat status tertentu. Dengan kata lain, ia mendapatkan ketrampilan-ketrampilan dan nilai-nilai umum, yang cocok untuk memenuhi sejumlah tuntutan peranan khusus akan perilaku secara tertentu. Nilai-nilai dan perilaku yang merupakan ciri suatu kelompok sub-budaya biasanya diperoleh dalam masa anak-anak² dan, seperti halnya dengan peranan-peranan kelamin dan nilai-nilai budaya dasar, sebagian dari apa yang dipelajari diperoleh di luar segala program pendidikan formal yang sengaja. Sosialisasi ke dalam suatu tingkat sosial atau gaya hidup baru juga terjadi dalam hidup kemudian. Misalnya suatu fungsi organisasi mahasiswa tertentu, seperti fraternitas, ialah melakukan jenis sosialisasi ini menuju suatu tingkat kelas sosial yang lebih tinggi daripada tingkat keluarga atau asal seorang. Adanya lembaga-lembaga sosialisasi dengan fungsi ini dapat dilihat sebagai tanggapan atas kebutuhan sah akan sosialisasi yang timbul dari mobilitas sosial ke atas.³

PENYIMPANGAN DAN PENGAWASAN SOSIAL

Penyimpangan dapat dibatasi sebagai kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan harapan-harapan orang-orang lain. Karena selalu ada kelompok-

¹Florence R. Kluckhohn, "Dominant and Variant Value Orientation," dalam Clyde Kluckhohn dan Henry A. Murray (Ed.), *Personality in Nature, Society, and Culture* (New York, 1953), hal. 342-357.

²Lihat Clyde Kluckhohn dan Henry A. Murray (Ed.), *op. cit.*, Daniel R. Millter dan Guy E. Swanson, *Inner Conflict and Defence* (New York, 1960); dan Florence R. Kluckhohn dan Fred L. Strodbeck, *Variations in Value Orientations* (Evanston, Ill., 1961).

³Lihat Herbert H. Hyman, "Reference Groups," dalam David L. Sills (Ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences* (New York-London, 1972), Jilid 3, hal. 353-359.

kelompok yang mempunyai sudut pandangan lain dalam masyarakat, apa yang dilihat sebagai menyimpang dari kerangka acuan seorang bisa dianggap sebagai sesuai oleh orang lain. Jadi, apakah perilaku atau nilai-nilai seorang menyimpang harus selalu ditentukan oleh referensi pada sudut pandangan seorang atau suatu kelompok tertentu.

Penyimpangan berpangkal pada kebodohan seorang, atau ketidakmampuannya atau tiadanya motivasi; dan itu bisa terjadi dalam perilaku atau nilai-nilai atau keduanya. Kita dapat mengenal dua sebab utama kebodohan, ketidakmampuan dan tiadanya motivasi (tidak termasuk pembatasan-pembatasan biologis atas sosialisasi efektif, seperti kecerdasan yang rendah). Satu sebab utama ialah sosialisasi tidak efektif untuk pelaksanaan peranan-peranan yang diharapkan dari seorang, biarpun sistem-sistem sosial tempat ia hidup secara relatif tidak berubah. Sebab utama yang kedua ialah *pergeseran dalam apa yang diharapkan dari seorang* yang berpangkal pada perubahan sosial dan membiarkan orangnya dalam situasi di mana sosialisasinya yang dahulu, biarpun memadai untuk pelaksanaan kewajiban-kewajiban peranan yang lama, tidak lagi bermanfaat baginya.

Cara-cara usaha mengendalikan penyimpangan mengungkapkan teori-teori dan asumsi-asumsi masyarakat mengenai sebab-sebab penyimpangan dan berakar pada gagasan-gagasan pokok mengenai kodrat manusia: misalnya, apakah manusia itu suatu hewan bodoh, apakah ia kemasukan setan atau dikuasai oleh kekuatan-kekuatan atas kodrati (supernatural) lain, apakah pada dasarnya ia itu jahat dan dibebani oleh dosa asal dan seterusnya.

Dalam masyarakat Amerika Serikat adalah penyimpangan dalam motivasi dan nilai-nilai yang dianggap paling serius. Konsep motivasi memainkan peranan penting dalam teori-teori tentang alasan-alasan mengapa orang-orang bertindak seperti mereka bertindak, dan penyimpangan dalam motivasi dianggap sebagai suatu ancaman serius terhadap tata sosial. Dengan demikian ada kecenderungan untuk memeriksa kasus-kasus penyimpangan guna menemukan kemungkinan komponen motivasional untuk menilai betapa serius penyimpangannya. Sebaliknya, orang yang menyimpang, yang ditantang untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan menghadapi hukuman untuk penyimpangan motivasi, yang biasanya lebih berat daripada untuk lain-lain jenis penyimpangan, akan mengemukakan kebodohan atau ketidakmampuan sebagai sebab tindakan-tindakannya. Sebagai akibatnya banyak waktu dihabiskan dalam pengadilan maupun dalam sistem kontrol sosial informal untuk mencari kemungkinan penyimpangan motivasi di belakang kedok kebodohan atau ketidakmampuan. Sebagai jawaban atas masalah sulit mengidentifikasi komponen motivasi dalam penyimpangan itu, rupanya orang sering mulai dengan asumsi bahwa sebabnya motivasional. Sebab lain asumsi a priori ini

mungkin ialah bahwa ini menempatkan kesalahan pada individu untuk perilakunya, bukan pada masyarakat.

Beban pembuktian secara demikian diletakkan pada pelaku untuk menunjukkan bahwa motifnya murni. Tuntutan agar ia melakukannya adalah sah dari sudut pandangan masyarakat, karena sulit membedakan adanya kebodohan atau ketidakmampuan dari pernyataan munafik bahwa orang tidak tahu peraturannya atau tidak mampu melaksanakannya. Tetapi penggunaan pendekatan ini terhadap resosialisasi orang-orang yang menyimpang ada biayanya. Penanganan penyimpangan akan lebih efektif kalau menggunakan teknik-teknik yang cocok dengan sebab-sebab perilaku: pendidikan, bila kebodohan adalah sebabnya; perbaikan latihan bila ketidakmampuan adalah sebabnya; dan di mana motivasi adalah sebabnya, suatu program manipulasi hadiah dan hukuman yang direncanakan dan dilaksanakan secara sengaja akan mengarahkan kembali orangnya ke tujuan-tujuan dan perilaku yang tepat. Kalau penyimpangan berpangkal pada kebodohan atau ketidakmampuan, namun hukuman diberikan dalam gagasan salah bahwa motivasi adalah sebabnya, maka sebagai akibatnya orangnya akan sering menolak nilai-nilai masyarakat yang diterimanya sebelumnya.

Perhatian untuk motivasi dan beban pembuktian kemurnian motivasi adalah lebih kecil pada tahap-tahap awal kehidupan. Sekali lagi, ini berlaku untuk sistem-sistem keluarga informal dan pengadilan, paling tidak dalam masyarakat Amerika Serikat. Kemungkinan besar sebabnya ialah bahwa masih ada waktu untuk melatih anak, dan lembaga-lembaga sosialisasi secara mantap tetap menguasai hadiah dan hukuman yang memadai untuk mempengaruhi jalannya kepentingan-kepentingan seorang anak. Tetapi dengan setiap tahun tambahan kasus-kasus motivasi menyimpang dianggap lebih serius, dan tanggung jawab si anak untuk konformitas motivasi meningkat dengan skema-skema perkembangan menurut umur yang diterima dalam kebudayaannya, sampai tanggung jawab penuh seorang dewasa dituntut dari padanya.

PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA, UPAYA MELESTARIKAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN POLITIK DAN KENEGARAAN

A. Sudiharto DJIWANDONO

PENDAHULUAN

Menjelang peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-37, Presiden Soeharto telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tertanggal 11 Agustus 1982 tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda.

Untuk mencoba mengerti tentang makna Instruksi Presiden tersebut kiranya perlu dilihat dalam kaitannya dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, di mana antara lain ditetapkan: "Pendidikan politik rakyat ditingkatkan, agar makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan."

Dari sini kita melihat bahwa MPR melalui GBHN memang mengamankan perlunya diusahakan peningkatan pendidikan politik rakyat yang pada hakikatnya tidak lain ialah makin meningkatkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dan dengan meningkatnya kesadaran tersebut dapat diharapkan makin meningkatnya pula keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan, sesuatu yang bagi suatu negara demokrasi merupakan hal yang mutlak.

Di samping itu Republik Indonesia adalah juga negara yang sedang membangun dan akan terus membangun karena pembangunan merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan tidak mengenal titik akhir. Dalam usaha pembangunan ini pun keikutsertaan rakyat adalah mutlak, karena akan merupakan suatu paradoks apabila pembangunan nasional yang hakikatnya adalah mem-

bangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat itu tidak melibatkan rakyat sebagai obyek dan sekaligus subyek pembangunan.

Dalam hubungan ini kiranya perlu ditekankan bahwa baik dalam kehidupan kenegaraan maupun dalam usaha dan kegiatan pembangunan nasional kita berpijak pada nilai-nilai dasar budaya bangsa yang menjadi landasan filsafati negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Oleh karenanya pendidikan politik rakyat, dan dengan demikian juga pendidikan politik bagi generasi muda, pada hakikatnya merupakan usaha untuk meningkatkan kesadaran rakyat sebagai warga negara akan nilai-nilai dasar, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan politik dan kenegaraan. Dan dengan kesadaran tersebut diharapkan partisipasi aktif dan positif dari seluruh warga negara dalam kehidupan kenegaraan dan dalam usaha-usaha pembangunan nasional yang berjalan terus dan makin meningkat.

Partisipasi rakyat memang merupakan tuntutan dari sistem demokrasi. Ia merupakan sesuatu yang penting dan esensial karena demokrasi tanpa partisipasi rakyat bukanlah demokrasi yang sebenarnya. Namun partisipasi ini haruslah suatu partisipasi yang tumbuh karena kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, yang dilandasi oleh penghayatan akan nilai-nilai luhur yang mendasari dan menjiwai sistem yang berlaku.

Di lain pihak kita menyadari bahwa peningkatan kesadaran pada umumnya berjalan sejajar dengan peningkatan kecerdasan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan kecerdasan bangsa merupakan salah satu amanat kemerdekaan yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Usaha pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang sekarang ini sedang berjalan dan ditangani secara sungguh-sungguh adalah dalam kaitan ini, sehingga setiap orang sekurang-kurangnya dapat memperoleh pendidikan tingkat dasar yang akan membuka kemungkinan bagi pengembangan pribadi selanjutnya.

Dengan meningkatnya kecerdasan rakyat dengan demikian juga bisa diharapkan bahwa pendidikan politik akan menjadi semakin efektif.

PENDIDIKAN POLITIK DAN PROSES SOSIALISASI

Pada umumnya diterima pendapat bahwa pendidikan dalam arti luas bertujuan untuk mensosialisasikan baik kaum muda maupun kaum tua ke dalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dasar dari masyarakatnya. Pendidikan sebagai suatu proses, sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Pen-

didikan dan Kebudayaan Dr. Daoed Joesoef dalam berbagai kesempatan, jauh lebih luas dari hasil lembaga persekolahan, mencakup interaksi kemasyarakatan di masyarakat itu sendiri.

Dan bagi kita bangsa Indonesia, di mana pendidikan nasional kita tidak bisa lain kecuali harus berdasarkan Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa, mempunyai jangkauan yang luas dan dalam, tidak hanya kecerdasan tetapi praktis seluruh potensi manusia-manusia Indonesia seutuhnya.¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik rakyat sebenarnya sudah berjalan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Karena pendidikan dalam arti luas terlaksana melalui jalur formal dan jalur-jalur lain di luar jalur formal, yang kesemuanya itu bertujuan untuk mensosialisasikan rakyat ke dalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dasar dalam kehidupan kemasyarakatan, di mana salah satu aspeknya adalah kehidupan kenegaraan.

Dengan perkataan lain penanaman dan pengembangan kesadaran warga negara dalam bernegara bangsa telah berjalan melalui interaksi kemasyarakatan, suatu proses yang dikenal sebagai proses sosialisasi.

Dalam jalur pendidikan formal sebagaimana kita ketahui dan alami penanaman kesadaran ini dilakukan baik melalui kegiatan-kegiatan intra maupun ekstra kurikuler, sedangkan dalam jalur non-formal dan informal proses itu berjalan melalui komunikasi sosial secara timbal-balik, di lingkungan keluarga, organisasi-organisasi kemasyarakatan serta forum-forum kemasyarakatan lainnya.

Kalau demikian tentu bisa timbul pertanyaan, apakah masih diperlukan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 seperti disebut dalam awal tulisan ini. Pertanyaan lain yang juga timbul adalah berkenaan dengan istilah pendidikan politik itu sendiri yang oleh sebagian anggota masyarakat dikuatirkan akan justru "memancing" masyarakat khususnya generasi muda untuk bersikap dan bertindak laku politik, dalam arti politik praktis, yang dalam pengalaman di masa lalu telah menimbulkan berbagai ekses dalam kehidupan politik dan kenegaraan kita.

Dalam hal ini, apabila kita mulai dengan permasalahan yang kedua, kiranya perlu diingat bahwa istilah pendidikan politik rakyat memang secara for-

¹Dari pidato pengarahannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Rapat Kerja Rektor Universitas/Institut Negeri dan Kakanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan seluruh Indonesia, Jakarta, 2 Maret 1981.

mal dipergunakan di dalam perumusan GBHN, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978 (lihat kutipan di muka).

Pemakaian istilah itu di dalam perumusan GBHN tentu tidak dilakukan begitu saja tanpa pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang. Adalah suatu kenyataan bahwa istilah "politik" sering kali disalahartikan atau disalahmengertikan dalam masyarakat, tidak saja di Indonesia sebagai negara berkembang, tetapi ternyata juga di masyarakat negara-negara maju. Seperti dikatakan oleh Willem Langeveld, perkataan "politik" memberikan pengaruh yang buruk, yang meracuni, karena politik adalah kegiatan yang kotor (bandingkan ungkapan dalam bahasa Belanda yang masih diingat oleh "generasi tua" kita: "politiek is vies"). Politik adalah sinonim dengan pertentangan (conflict), begitu pula politik sering kali diidentikkan dengan partai-partai politik, suatu kekeliruan pengertian yang dapat dimengerti.

Itulah alasannya mengapa sosialisasi politik yang dilakukan di jalur pendidikan formal tidak dilakukan secara terbuka tetapi dengan berbagai cara secara terselubung atau apa yang disebut sebagai "hidden curriculum." Khusus di Republik Federasi Jerman di mana istilah "pendidikan politik" secara umum diterima, di negara-negara lain pendidikan politik di sekolah-sekolah diberikan melalui mata-mata pelajaran dengan nama atau sebutan yang berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Di Amerika Serikat disebut dengan "social studies" yang isinya merupakan kombinasi antara sejarah, geografi, civics dan ekonomi, di Inggris disebut "civics", "social education" dan "social science education." Sementara itu di Perancis dan di Italia dipakai istilah "law" atau "philosophy".¹

Di bidang pendidikan formal di Indonesia keadaan yang sama juga kita jumpai. Kita pernah mengenal mata pelajaran civics atau kewargaan negara berdasarkan Kurikulum 1968 yang berlaku di lembaga-lembaga persekolahan kita, yang pada hakikatnya adalah juga suatu sosialisasi politik melalui jalur pendidikan formal. Demikian pula dengan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dalam Kurikulum 1975 yang sekarang masih berlaku, yang dari satu segi dapat dipandang sebagai suatu "hidden curriculum" dari upaya untuk mensosialisasikan anak didik ke dalam nilai-nilai moral Pancasila, sehingga penghayatan atau pemilikan anak didik terhadap nilai-nilai tersebut meningkat dan akan terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam hidup kemasyarakatan termasuk hidup kenegaraan serta berpartisipasi dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing. Dengan perkataan lain kita menginginkan agar anak didik berkembang menjadi warga

¹Lihat Willem Langeveld: "Political Education as a Principle, Problems, Examples and Ideas," *Korea & World Affairs*, Vol. 4/4, Winter 1980, p. 626.

negara yang baik, yang menghayati nilai-nilai dasar yang luhur dari bangsanya dan sadar akan hak-hak dan kewajibannya di dalam kerangka nilai-nilai tersebut. Dan dengan demikian esensinya adalah "pendidikan politik" yang dalam hal ini dilakukan melalui jalur pendidikan formal.

Apakah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda akan memberikan dampak perubahan terhadap istilah yang dipergunakan, kiranya tergantung dari pertimbangan dan pemikiran para ahli khususnya dari pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin juga perubahan itu dipandang tidak perlu dilakukan apabila diingat bahwa pendidikan politik bagi generasi muda sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden diarahkan dalam rangka pelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tercantum dalam konsiderans instruksi tersebut. Yang mungkin diperlukan adalah penyesuaian isi, khususnya yang bersangkutan dengan aspek kehidupan politik dan kenegaraan sehingga menjadi lebih nyata dan terarah.

Bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat mempergunakan istilah "pendidikan politik" di dalam ketetapanannya mengisyaratkan adanya suatu upaya guna lebih memasyarakatkan istilah "politik" tersebut agar makin lama persepsi yang keliru tentang politik yang masih melekat pada sebagian anggota masyarakat makin menipis. Pandangan bahwa politik adalah pekerjaan yang kotor, yang mengandung racun, yang penuh dengan pertentangan dan praktek-praktek yang tidak terpuji atau sebutan-sebutan lain yang mengungkapkan suatu pandangan yang selalu negatif terhadap segala sesuatu yang berbau politik, seharusnya diluruskan sehingga timbul suatu pengertian yang semestinya tentang politik dan dengan demikian juga sikap yang wajar terhadap politik.

Kekeliruan pandangan umum tentang politik memang bisa dimengerti lebih-lebih di masyarakat berkembang di mana taraf kecerdasan rakyat umumnya masih relatif rendah. Bagi masyarakat kita kekaburan ini menjadi semakin besar karena pengalaman-pengalaman di masa lalu dalam praktek kehidupan politik yang lebih menampilkan aspek negatif sehingga menumbuhkan citra yang negatif pula di masyarakat.

Ini berarti bahwa aspek-aspek praktis dari sistem politik yang berlaku lebih berpengaruh dalam pembentukan persepsi masyarakat tentang politik. Realita memang kadang-kadang atau bahkan sering kali tidak sesuai dengan idealnya, meskipun kita tahu bahwa itu bukan yang seharusnya. Realita dalam kehidupan politik sering kali menyimpang dari sistem politik ideal yang hendak kita bangun, kita laksanakan dan kita kembangkan, yang bagi kita tidak lain adalah sistem politik yang berdasarkan Pancasila.

Penyimpangan ini bisa disebabkan karena sistem politik ideal yang hendak kita kembangkan itu belum memasyarakat secara luas sehingga bagi sebagian masyarakat termasuk mereka yang secara langsung terjun dalam kancah perjuangan politik, masih merupakan sesuatu yang kabur, yang belum jelas, sehingga dengan sendirinya juga terjadi kekaburan dalam praktek hidup berpolitik.

Penyimpangan juga bisa terjadi karena para pelaku politik tidak secara teguh berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam mengejar "kemenangan" politiknya.

Di sinilah kita melihat betapa perlunya mensosialisasikan masyarakat, baik generasi muda maupun kaum tua ke dalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dasar dalam kehidupan kemasyarakatan, di mana kehidupan politik merupakan salah satu seginya. Dan karena tujuan yang demikian itu adalah juga merupakan tujuan dari pendidikan, baik formal maupun informal, upaya itu kita sebut sebagai pendidikan politik.

Oleh karena nilai-nilai dan norma-norma yang disosialisasikan itu adalah nilai-nilai dan norma-norma dasar yang vital, dalam mana kita hidup dan mengatur kehidupan ini, maka apa yang ingin kita sampaikan melalui pendidikan politik itu tidak lain adalah suatu konsep budaya bangsa, yang dalam hal ini lebih dititikberatkan pada budaya politik yang merupakan sub-sistem dari sistem budaya bangsa.

Budaya politik ini mencakup baik cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik (polity) yang berlaku. Bagi kita sudah jelas bahwa sumber dari budaya politik ini adalah Pancasila sebagai landasan idiilnya dan UUD 1945 sebagai landasan strukturalnya.

Oleh karena itu sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982, pendidikan politik bagi generasi muda perlu diberikan dalam rangka pelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terus-menerus memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa demi kelangsungan hidup bernegara dan kenegaraan. Dengan perkataan lain pendidikan politik terarah kepada makin diresapinya dan dihayatinya budaya politik Pancasila, sehingga sistem politik ideal, yaitu sistem politik Pancasila yang merupakan cita-cita politik kita menjadi semakin mantap dalam praktek hidup kenegaraan.

Dengan demikian apa yang dikemukakan oleh Dr. Alfian kiranya tepat, ialah bahwa: "Keberhasilan pendidikan politik antara lain ditentukan oleh adanya suatu perspektif yang jelas yang bisa diperoleh melalui dua dimensi. Dimensi pertama berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang di-

inginkan. Dari situ akan kelihatan apa-apa sebenarnya yang dituntut oleh sistem politik ideal itu dari masyarakat yang menginginkannya. Dimensi kedua ialah realita atau keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri yang langsung bisa diperbandingkan dengan tuntutan-tuntutan sistem politik ideal tadi. Melalui perbandingan itulah akan diperoleh suatu perspektif yang jelas bagi pendidikan politik yang selanjutnya akan dapat dipakai untuk menjuruskannya.”¹

Seperti telah dikemukakan, praktek-praktek dalam kehidupan politik dan kenegaraan yang memberikan citra negatif dalam pandangan masyarakat dan mempengaruhi persepsi masyarakat tentang politik, mungkin disebabkan karena selama ini belum ada gambaran yang jelas tentang sistem politik ideal yang kita inginkan, dan bagaimana norma-norma operasional yang seharusnya diberlakukan dalam kerangka sistem tersebut. Yang ada barulah suatu konsep yang bersifat umum yang membuka peluang bagi golongan-golongan masyarakat untuk memberikan interpretasi sendiri yang cenderung mengutamakan kepentingan golongan dan bukan kepentingan bangsa dan negara.

Perdebatan yang terjadi beberapa tahun yang lalu di sekitar ada tidaknya ”kultur oposisi” dalam sistem demokrasi Pancasila, masalah fungsi kritik dan cara-cara penyampaian, masalah membanjirnya delegasi-delegasi maupun kelompok-kelompok dan perorangan ke Dewan Perwakilan Rakyat Pusat untuk menyampaikan secara langsung berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat, dan terakhir permasalahan di sekitar pelaksanaan kampanye dalam rangka Pemilu 1982, semuanya dapat dipandang sebagai indikasi masih belum jelasnya beberapa aspek dari sistem politik ideal yang kita bangun.

Bidang politik memang merupakan salah satu bidang yang masih dalam proses pembangunannya sejalan dengan usaha pembangunan nasional, sehingga pendidikan politik harus dilihat sebagai bagian dari pembangunan politik, seperti tampak dalam GBHN. Oleh karena itu keberhasilan pendidikan politik tidak hanya tergantung pada pelaksanaan pendidikan politik itu sendiri tetapi akan tergantung pula dari usaha-usaha yang lain dalam rangka pembangunan politik yang diarahkan guna memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam GBHN.

Aspek-aspek seperti mekanisme demokrasi Pancasila, pemantapan kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum, pemantapan fungsi dan interaksi antara Lembaga-lembaga Tinggi Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, semuanya itu perlu ditangani secara simultan dalam pem-

¹Alfian: *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Kumpulan Karangan*, PT Gramedia, Jakarta, 1978, hal. 236.

bangunan bidang politik. Dengan demikian sistem politik Pancasila atau sistem politik ideal yang hendak kita wujudkan itu menjadi jelas, bagaimana ia harus diwujudkan dalam praktek kehidupan kenegaraan kita. Secara demikian kita juga akan mempunyai semacam ukuran yang baku untuk menilai apakah realita yang ada sekarang sesuai atau tidak dengan yang ideal atau yang seharusnya.

Masalah lain yang bersangkutan dengan pertanyaan apakah pendidikan politik itu masih diperlukan mengingat bahwa dalam masyarakat dengan sendirinya berlaku proses sosialisasi politik sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

Sebenarnya memang terdapat kesejajaran antara proses sosialisasi politik yang terjadi dalam masyarakat melalui antar hubungan dalam kehidupan masyarakat dengan proses sosialisasi politik yang secara sadar dilakukan melalui pendidikan politik.

Kedua-duanya merupakan proses penyampaian nilai-nilai dan norma-norma kehidupan politik yang akan menumbuhkan sikap politik dan perilaku politik anggota masyarakat sebagai warga negara. Namun demikian memang bisa terjadi ketidaksejajaran mengingat pengaruh berbagai aspirasi politik golongan dan perorangan dalam masyarakat yang bisa tidak sesuai atau bahkan mungkin bertentangan dengan nilai yang secara nasional kita terima sebagai nilai yang benar.

Ini tentu tidak berarti bahwa dalam usaha memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila tidak dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat. Hak untuk berbeda pendapat umumnya diterima sebagai salah satu ciri kehidupan demokrasi, sehingga perbedaan pendapat tentu juga harus dimungkinkan dalam sistem demokrasi Pancasila. Yang terpenting ialah perlunya kesadaran bahwa konsep dan persepsi kita tentang demokrasi memang tidak tepat sama dengan konsep bangsa lain tentang demokrasi, meskipun esensinya yang pokok yang tidak lain adalah pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia adalah juga esensi demokrasi Pancasila. Bahkan di dalam demokrasi Pancasila, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu nilai yang menjiwainya. Perbedaan pendapat, bahkan konflik tentu bisa terjadi dan harus mendapatkan akomodasi, tetapi hal itu tentu tidak dapat ditolerir apabila sampai membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa yang pada gilirannya juga menggoyahkan nilai-nilai dasar itu sendiri dalam mana kita hidup sebagai bangsa dan mengatur kehidupan kita dalam bernegara bangsa. Jadi masalahnya memang perlu diciptakannya mekanisme yang mengatur sehingga perbedaan pendapat ataupun konflik itu tidak sampai merugikan dan membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Perbedaan

pendapat harus dijaga agar tetap dalam jalur Pancasila dan ini akan terwujud apabila nilai-nilai dasar itu benar-benar hidup dalam dan dihayati oleh masyarakat serta terus dilestarikan. Menghayati mengandung arti yang lebih luas dari sekedar mengerti. Nilai-nilai itu perlu dimengerti dan diterima sehingga menjadi "milik" yang tanpa disadari pun tetap bekerja pada diri seseorang dan dengan sendirinya juga terwujud dalam sikap dan tingkah laku.

Untuk mencapai taraf penghayatan seperti itu tentu memerlukan proses yang umumnya adalah proses pendidikan dan "latihan" dalam proses mana orang menjadi lebih terbuka, menerima dan "terlatih" untuk mewujudkannya secara praktis. Itulah perlunya pendidikan politik sebagai suatu usaha sadar untuk mensosialisasikan nilai-nilai dan norma-norma dasar khususnya dalam kehidupan politik dan kenegaraan.

Pendidikan politik dengan demikian harus mampu memberikan pengertian dan menumbuhkan sikap menerima akan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan kenegaraan dalam sistem politik Pancasila, sekaligus juga mampu memberikan "ketrampilan" tertentu yang bersifat praktis dalam kehidupan kenegaraan dalam kerangka sistem tersebut. Dengan perkataan lain aspek-aspek pengertian dan pemahaman, tanggap dan menerima serta pelaksanaan secara praktis sebagaimana dikenal dalam proses pendidikan pada umumnya harus terkandung juga dalam pendidikan politik. Hal ini tentu berkaitan dengan materi pendidikan politik serta cara dan metode yang dipergunakan dalam pelaksanaannya.

Nilai-nilai dasar yang melandasi kehidupan politik dan kenegaraan itu, yaitu nilai-nilai Pancasila, melalui pendidikan politik harus dapat dimengerti secara rasional, untuk selanjutnya dapat diterima secara emosional, dan terwujud dalam sikap dan tingkah laku dalam praktek hidup di masyarakat. Di sini jelas bahwa proses penanaman kesadaran seperti dimaksud tidak cukup dilakukan hanya dengan cara "mendengar", tetapi memerlukan juga pengamatan dan pengalaman praktis. Contoh dan keteladanan, pengalaman serta suasana lingkungan memegang peranan penting dalam proses tersebut. Itulah sebabnya mengapa, seperti telah dikemukakan di muka, usaha-usaha lain dalam rangka pembangunan politik akan besar peranan dan pengaruhnya dalam menentukan keberhasilan pendidikan politik.

PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA

Pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa, yang mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, penting bagi seluruh

rakyat, seluruh warga negara. Oleh karena itu Garis-garis Besar Haluan Negara juga menunjuk pada pendidikan politik rakyat, yang perlu ditingkatkan agar lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan.

Sementara itu kita juga menyadari pentingnya generasi muda bagi sesuatu bangsa karena generasi muda itulah yang dari masa ke masa akan meneruskan cita-cita bangsa. Secara alamiah generasi yang satu akan digantikan oleh generasi berikutnya, tetapi sementara terjadi penggantian generasi nilai-nilai dasar yang menjiwai dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah tetap dijaga kelestariannya, tetap berlaku sebagai nilai vital dan tetap dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa sepanjang masa.

Dalam kerangka itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap generasi untuk mempersiapkan generasi berikutnya sedini mungkin agar pada saatnya generasi berikutnya benar-benar siap mengambil alih dan meneruskan tugas serta peranan generasi sebelumnya dan secara demikian terjaminlah kelangsungan hidup dan eksistensi bangsa dari masa ke masa. Di sini berlaku semacam estafet, dalam mana tongkat estafet yang sama secara berkesinambungan disampaikan dan diterima oleh generasi sebelumnya ke generasi berikutnya menuju terwujudnya cita-cita bersama.

Sebagaimana kita ketahui, Pancasila adalah suatu rumusan falsafah yang kita jadikan dasar negara. Ia sekaligus adalah juga rumusan dari cita-cita bangsa yang memberikan arah ke mana kita harus menuju, yang sebagian secara eksplisit terumuskan juga dalam Pembukaan UUD 1945. Sementara itu kita juga menyadari bahwa usaha untuk mewujudkan cita-cita tersebut akan merupakan proses yang panjang yang meliputi kurun waktu beberapa generasi. Usaha untuk mewujudkan cita-cita tersebut juga harus dilakukan dalam suatu kerangka sistem politik yang sesuai, dalam hal ini sistem politik Pancasila.

Oleh karena itulah meskipun pendidikan politik baik yang dilakukan secara sadar maupun yang dengan sendirinya berjalan dalam interaksi sosial dalam masyarakat, penting bagi seluruh rakyat, perhatian khusus terhadap generasi muda adalah wajar. Pelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana termaktub dalam konsideran Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982, yang pada hakikatnya merupakan inti pendidikan politik, terutama memang harus diusahakan melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dalam diri generasi muda. Karena kunci masa depan ada di tangan generasi muda, penerus cita-cita bangsa.

Sebagai penerus cita-cita bangsa tentu generasi muda sudah seharusnya menghayati cita-cita tersebut melalui penghayatan nilai-nilai yang mendasari cita-cita tersebut, serta mengetahui norma-norma operasional, tata cara dan aturan permainan dalam kerangka sistem kehidupan politik guna mencapai dan mewujudkannya.

Politik dalam kerangka pengertian ini, yaitu sebagai sistem kehidupan kenegaraan guna mencapai dan mewujudkan cita-cita bangsa, menjadi kepentingan seluruh bangsa dan dengan demikian melibatkan semua warga negara. Ia tidak seharusnya dihindari tetapi sebaliknya perlu dimengerti dan dihayati oleh setiap warga negara dan dengan pengertian dan penghayatan tersebut memberikan partisipasinya. Partisipasi rakyat dalam kehidupan kenegaraan merupakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, bahkan pada hakikatnya merupakan panggilan suci untuk ikut serta dalam usaha mencapai dan mewujudkan cita-cita bangsa, yang tidak lain adalah terwujudnya kesejahteraan umum dalam arti material dan spiritual.

Kesadaran ini perlu ditanamkan sejak usia muda dan makin meningkat dan mendalam sesuai dengan tingkat kecerdasan dan kedewasaan seseorang. Dengan perkataan lain pendidikan politik guna menciptakan warga negara yang baik, yang sadar akan hak-hak, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan kenegaraan dalam rangka memperjuangkan terwujudnya cita-cita bangsa harus dimulai sejak seorang anak mulai bisa mengerti dan memahami hal-hal yang sepintas lalu tampak sederhana tetapi sebenarnya memiliki makna besar dalam proses penanaman kesadaran bernegara bangsa. Lagu kebangsaan, bendera nasional, lambang negara, presiden, wakil presiden dan tokoh-tokoh nasional lainnya sudah dapat diperkenalkan kepada anak-anak kelompok usia pra-sekolah, meskipun baru sekedar mengenal tanpa mengerti maknanya yang sebenarnya dalam kehidupan kenegaraan. Pengenalan ini dalam proses selanjutnya akan lebih diperkaya, dipahami dan dimengerti secara lebih mendalam untuk selanjutnya dihayati dan dimanifestasikan dalam perilaku dalam praktek hidup sehari-hari.

Satu hal yang sekali lagi perlu ditekankan di sini ialah bahwa contoh dan keteladanan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan yang ditujukan tidak saja ke arah pengertian, tetapi lebih dari itu juga diarahkan kepada pendalaman dan penghayatan nilai-nilai serta pembentukan tingkah laku. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan melalui proses belajar mengajar di kelas atau bentuk-bentuk penataran adalah penting tetapi kiranya perlu disadari bahwa hal itu hanyalah merupakan salah satu cara atau metode, itupun hanya akan memberikan hasil yang optimal apabila si pengajar atau penatar sekaligus mampu memberikan contoh dan keteladanan.

Masih cukup banyak cara-cara lain yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan untuk melaksanakan pendidikan politik, baik pada jalur pendidikan formal, non-formal maupun informal. Lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan sehari-hari, organisasi-organisasi sosial kepemudaan, media komunikasi massa, semuanya itu merupakan jalur-jalur dan sarana yang secara efektif dapat dipergunakan dan dimanfaatkan guna melaksanakan pendidikan politik rakyat, khususnya bagi generasi muda.

Dari sini kiranya jelas bahwa pendidikan politik bukanlah monopoli pemerintah. Dari pihak pemerintah pun kiranya juga tidak bermaksud demikian, karena tanpa pengaturan dan campur tangan pemerintah pun pendidikan politik sebagai proses sosialisasi nilai-nilai akan tetap berjalan melalui interaksi-interaksi dalam kehidupan kemasyarakatan. Bahwa pemerintah mengambil prakarsa untuk lebih menggiatkan dan meningkatkan serta mengarahkan proses tersebut adalah pada tempatnya baik karena alasan-alasan formal maupun praktis.

Masalah yang paling pokok ialah bagaimana nilai-nilai dasar yang luhur yang melandasi kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan kita itu tertanam secara dalam pada diri setiap warga negara Indonesia dan terwujud dalam sikap dan tingkah laku dalam praktek hidup bernegara bangsa. Dalam hal ini memang diperlukan adanya kesatuan bahasa dari setiap pihak yang terlibat atau melibatkan diri dalam proses pendidikan politik. Itulah perlunya adanya suatu pola dasar pendidikan politik yang menjadi kerangka acuan pokok dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik, sehingga baik instansi-instansi pemerintah maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan pendidikan politik berpegang pada sumber yang sama.

KESIMPULAN

Bidang politik merupakan salah satu bidang kehidupan bangsa yang perlu dibangun secara terus-menerus dalam rangka lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila dalam kehidupan kenegaraan kita. Setiap warga negara seyogyanya mengerti, menyadari dan meresapi cita-cita politik kita dalam bernegara bangsa, ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik dan kenegaraan menurut norma-norma yang berlaku dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

Dalam rangka itulah pendidikan politik perlu, tidak hanya bagi generasi muda, tetapi praktis bagi setiap warga negara, karena apa yang ingin dicapai

dengan pendidikan politik pada hakikatnya secara sederhana dapat dirumuskan dengan "menjadikan warga negara sebagai warga negara yang baik."

Dalam kerangka pengertian ini seorang warga negara yang baik ialah warga negara yang mengerti, meresapi, mendalami dan menerima atau menghayati nilai-nilai luhur yang menjadi dasar dan asas hidup kemasyarakatan dan kenegaraan dari bangsanya, sekaligus mengerti dan menghayati norma-norma operasional serta sistem organisasi politik yang berlaku. Dengan pengertian dan penghayatan akan hal-hal tersebut diharapkan bahwa setiap warga negara akan bertingkah laku politik secara positif dalam rangka partisipasinya sebagai warga negara dalam kehidupan kenegaraan dalam kerangka sistem yang berlaku, yaitu sistem demokrasi Pancasila, suatu sistem demokrasi yang berasaskan nilai-nilai luhur Pancasila.

Oleh karena itu pendidikan politik pada tempat pertama adalah upaya guna lebih memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila untuk lebih dimengerti dan dihayati dan dilestarikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Namun kehidupan kenegaraan adalah juga masalah praktis, karena ia bersangkutan dengan implementasi nilai-nilai dalam praktek hidup kenegaraan. Pendidikan politik hanya akan berhasil baik apabila generasi muda dan masyarakat pada umumnya secara nyata melihat adanya praktek hidup kenegaraan yang sesuai dan tidak menyimpang dari nilai-nilai ideal yang mereka terima melalui pendidikan politik maupun melalui proses sosialisasi dalam interaksi sosial.

Itulah sebabnya mengapa pendidikan politik harus dilihat sebagai bagian dari pembangunan politik. Pemantapan norma-norma operasional dan mekanisme demokrasi Pancasila, pemantapan kehidupan konstitusional, fungsi dan kedudukan lembaga-lembaga kenegaraan dan interaksi di antara lembaga-lembaga tersebut serta tegaknya hukum, semuanya itu harus terus-menerus diusahakan dalam rangka pembangunan politik dan kehidupan kenegaraan kita.

Kelemahan-kelemahan dalam aspek-aspek praktis dan pelaksanaan akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan terhadap pendidikan politik, bahkan lebih jauh dari itu akan memberikan peluang bagi timbulnya usaha-usaha yang bertentangan dengan tujuan pendidikan politik. Usaha-usaha negatif demikian harus dicegah, dan pencegahan yang paling efektif kiranya dengan lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila melalui usaha pembangunan bidang politik.

Proses ini masih berjalan dan akan tetap berjalan secara meningkat karena seperti di muka telah disinggung pembangunan pada hakikatnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan tidak mengenal titik akhir, lebih-lebih bagi kita pembangunan adalah juga merupakan pengamalan Pancasila.

KELUARGA: SUATU SARANA SOSIALISASI POLITIK

HARYANTO*

PENGANTAR

Istilah "*Sosialisasi Politik*" sering sekali kita temukan dalam keputakaan-keputakaan politik. Mengenai definisi sosialisasi politik, maka Kenneth P. Langton mengemukakan bahwa "Political socialization, in the broadest sense, refers to the way society transmits its political culture from generation to generation."¹ Seorang sarjana Barat lainnya, Grabiell A. Almond, mengemukakan pendapatnya, bahwa sosialisasi politik menunjuk pada proses-proses pembentukan sikap-sikap dan pola-pola tingkah laku politik, dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk "mewariskan" patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi sesudahnya.² Pengertian atau definisi yang dikemukakan oleh Langton dan Almond ini menekankan bahwa sosialisasi politik adalah cara bagaimana masyarakat mewariskan, mengajarkan, meneruskan sikap-sikap, patokan-patokan, keyakinan-keyakinan, norma-norma politik dari suatu generasi yang lebih tua kepada generasi berikutnya.

Di dalam tulisan ini, akan dibahas secara sepintas peranan keluarga sebagai salah satu sarana atau agen sosialisasi politik. Keluarga sebagai salah satu sarana sosialisasi politik merupakan sarana yang pertama kali dijumpai oleh seorang individu dalam hidupnya. Sebagaimana telah kita ketahui, seorang individu pertama kali mengadakan hubungan dengan individu-individu atau pihak-pihak yang lain di dalam keluarganya.

*Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

¹Kenneth P. Langton, *Political Socialization*, Oxford University Press, Inc., 1969, hal. 4.

²Grabiell A. Almond, *Comparative Politics Today*, Little, Brown and Company, Boston Toronto, 1974, hal. 44. Dapat pula dilihat pada Mochtar Mas'ood dan Colin MacAndrews (eds) *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1978, hal. 32.

SARANA ATAU AGEN SOSIALISASI POLITIK

Sebelum membahas peranan keluarga sebagai sarana atau agen sosialisasi politik, maka akan dikemukakan terlebih dahulu mengenai sarana-sarana atau agen-agen sosialisasi politik itu sendiri. Menurut Gabriel A. Almond dalam bukunya *Comparative Politics Today*, maka sosialisasi politik dapat melalui berbagai macam sarana, yaitu:

1. Keluarga,
2. Sekolah,
3. Kelompok bergaul atau bermain,
4. Pekerjaan,
5. Media Massa,
6. Kontak-kontak politik langsung.¹

Di dalam proses sosialisasi politik, maka kedudukan sarana-sarana seperti tersebut di atas adalah sama pentingnya. Kita dihadapkan dengan suatu kesulitan apabila disodori suatu pertanyaan yang manakah di antara ke-enam sarana itu yang paling berperan dalam proses sosialisasi politik? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka Paul Allen Beck² menyatakan pendapatnya bahwa besar tidaknya peranan sarana-sarana tersebut sangat bergantung pada beberapa hal, yaitu: *exposure*, *communication*, dan *receptivity* serta umur dari individu yang bersangkutan. Maksud Allen Beck adalah bahwa besar tidaknya peranan sarana-sarana tersebut bergantung kepada tingkat intensitas interaksi antara individu dan sarana yang ada, proses komunikasi yang berlangsung antara individu dan sarana tadi, tingkat atau derajat penekunan individu yang mengalami proses sosialisasi politik, dan umur individu yang bersangkutan.

Perlu pula mendapat perhatian, bahwa seorang tersosialisasi politik tidak hanya melalui satu sarana saja, tetapi melalui berbagai macam sarana yang ada. Berbagai macam sarana yang ada itu dapat dialami oleh seorang individu dalam proses sosialisasi secara bersama-sama. Misalnya, seorang pada suatu saat tersosialisasi politik melalui sarana yang berwujud sekolah, dan pada saat yang bersamaan pula melalui sarana yang berwujud kelompok bergaul atau sarana yang berwujud keluarga. Hal ini dimungkinkan karena seorang tidak hanya hidup dalam suatu lingkungan tertentu saja, tetapi dalam berbagai

¹*Ibid.*, hal. 47-49.

²Lihat dalam Afan Gaffar, *Beberapa Pokok Pikiran Tentang Pendidikan Politik di Indonesia* Makalah untuk Seminar Pembangunan Sosial dan Politik Menuju ke Arah Peningkatan Ketahanan Nasional, Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1981 hal. 8, tidak diterbitkan.

lingkungan secara bersama-sama. Seseorang dalam waktu yang bersamaan dimungkinkan hidup di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan, dan di lingkungan organisasi politiknya, dan lain-lainnya.

Sehubungan dengan sosialisasi politik, lebih lanjut Almond mengemukakan bahwa sosialisasi politik dapat membentuk dan mewariskan kebudayaan politik suatu bangsa, dan dapat pula memelihara kebudayaan politik suatu bangsa dengan jalan meneruskannya dari generasi yang lebih tua kepada generasi berikutnya, serta dapat pula mengubah kebudayaan politik suatu bangsa.¹

KELUARGA SEBAGAI SARANA SOSIALISASI POLITIK

Perlu pula mendapat perhatian bahwa sosialisasi politik itu menyangkut 2 (dua) hal. Pertama, sosialisasi politik berlangsung terus-menerus selama individu yang bersangkutan masih hidup, dan kedua, sosialisasi politik dapat mengambil bentuk transmisi dan pengajaran baik yang langsung maupun yang tidak langsung.² Mengenai bentuk sosialisasi politik Dawson dan kawan-kawannya menyatakan bahwa sosialisasi politik dapat mengambil bentuk yang langsung maupun tidak langsung.³ Sosialisasi politik yang langsung menunjukkan proses di mana hal-hal yang ditransmisikan atau diteruskan kepada generasi berikutnya berwujud nilai-nilai, informasi-informasi, sikap-sikap, pandangan-pandangan, keyakinan-keyakinan mengenai politik secara eksplisit. Misalnya saja, dalam sosialisasi politik yang bersifat langsung ini individu-individu secara eksplisit mempelajari struktur pemerintahan di negaranya, individu-individu terutama yang tergolong kaum muda dimasukkan ke dalam pusat-pusat pemuda (kamp pemuda) dan di situ diberikan indoktrinasi-indoktrinasi tentang faham-faham atau nilai-nilai politik yang dianut oleh bangsanya, dan sebagainya. Sedangkan dalam sosialisasi politik yang bersifat tidak langsung, seorang individu untuk pertama kalinya memperoleh atau mewarisi hal-hal yang bersifat non politis, dan hal-hal yang non politis yang diperolehnya pada gilirannya akan menentukan atau mempengaruhi pandangan-pandangannya, sikap-sikapnya di bidang politik. Misalnya saja, sikap pembangkang atau penurut dari seorang terhadap orang tuanya, temannya atau gurunya; maka sikap-sikap yang seperti ini cenderung untuk mempengaruhi sikapnya kelak pada saat yang bersangkutan dewasa terhadap pemimpin politiknya, terhadap aparatur pemerintah, dan lain sebagainya.

¹Grabiell A. Almond, *op. cit.*, hal. 45.

²*Ibid*, hal. 44-45.

³Dawson, et. al, *Political Socialization*, Little, Brown and Company, Boston, Toronto, 1977, hal. 95.

Di muka telah disebutkan bahwa keluarga merupakan salah satu sarana sosialisasi politik. Keluarga merupakan sarana sosialisasi politik yang pertama kali dijumpai oleh individu dalam hidupnya. Begitu lahir seorang manusia langsung berhadapan dengan keluarganya. Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama kali dimasuki oleh individu. Ayah, ibu dan saudara-saudara kandung adalah orang-orang yang pertama kali dijumpainya, dengan mereka kontak atau hubungan yang pertama kali berlangsung, dan dari mereka pula individu memperoleh pelajaran yang pertama kalinya tentang hidup dan kehidupan.

Dihubungkan dengan pendapat Almond maupun Dawson seperti disebutkan di atas, yaitu bahwa sosialisasi politik dapat mengambil bentuk yang langsung maupun bentuk yang tidak langsung, maka keluarga sebagai salah satu sarana sosialisasi politik lebih merupakan bentuk sosialisasi politik yang bersifat tidak langsung. Hal ini karena di dalam keluarga lebih ditekankan sosialisasi politik bagi anak-anak daripada bagi individu-individu yang telah dewasa. Di dalam keluargalah orang tua yang lebih banyak berperan dalam proses sosialisasi politik bagi anak-anaknya. Sedangkan di dalam keluarga hal-hal yang disosialisasikan kepada anak-anaknya pada umumnya bersifat non politis. Hal ini senada dengan pendapat Dawson, yang menyatakan bahwa: "Families generally do not take as much care in preparing their offspring for political life as they do for some other roles. Politics is not a high priority concern for most families. Nor is the political world particularly salient for most children and youths."¹

Di dalam keluarga, seseorang terutama pada masa kanak-kanaknya, dapat mempelajari peranan-peranan sosial yang terdapat dalam lingkungannya. Di dalam keluarga pulalah individu tadi mulai diperkenalkan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap yang terdapat dan dianut oleh masyarakat di sekitar mereka. Hal yang demikian sejajar dengan pendapat Kenneth P. Langton yang menyatakan: "Within the family the individual learns his first set of social roles, and in doing so, take a major step in the process of socialization. He learns what is expected of him as a child and how he should relate to other people. He learns his role within the family power structure, and which family statuses control the resources he need (food, protection, affection)."² Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa di dalam keluargalah seorang individu dibentuk watak atau sikapnya untuk yang pertama kalinya. Orang tua mereka memberikan pelajaran kepada anak-anaknya tentang kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat lingkungannya yang harus dipatuhi oleh si anak. Atau dengan perkataan lain, keluarga adalah guru yang paling pertama kali bagi seorang in-

¹Dawson, et. al., *Ibid*, hal. 116.

²Kenneth P. Langton, *op. cit.*, hal. 21.

dividu dalam mengenal atau mengetahui nilai-nilai, sikap-sikap, dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat lingkungannya.

Oleh karena keluarga lebih merupakan sarana sosialisasi politik yang sifatnya tidak langsung daripada yang langsung, maka nilai-nilai, sikap-sikap, kaidah-kaidah yang diperkenalkan kepada si anak lebih merupakan nilai-nilai, sikap-sikap, kaidah-kaidah yang *tidak secara eksplisit* mengenai masalah-masalah politik. Akan tetapi nilai-nilai yang diwariskan tadi, seperti telah disinggung di muka, pada gilirannya akan menentukan atau mempengaruhi pandangan-pandangan, sikap-sikap si anak di bidang politik kelak sebagai seorang dewasa.

Proses sosialisasi politik yang dijalankan oleh sarana yang berwujud keluarga ini di suatu masyarakat yang satu berbeda dengan di masyarakat yang lainnya lagi. Misalnya, proses sosialisasi politik yang dijalankan oleh suatu keluarga di Indonesia tentu akan jauh berbeda dengan proses sosialisasi politik yang dijalankan oleh suatu keluarga di negara Barat. Hal ini sudah merupakan sesuatu yang wajar, karena lingkungan keluarga-keluarga tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Apabila keluarga-keluarga dari masyarakat yang berlainan akan menyebabkan perbedaan dalam proses sosialisasi politik, maka keluarga-keluarga dari suatu masyarakat yang sama pun terdapat kemungkinan adanya perbedaan dalam proses sosialisasi politik. Keluarga yang tingkat hidupnya relatif lebih tinggi akan berbeda dalam proses sosialisasi politik dibandingkan dengan keluarga yang tingkat hidupnya lebih rendah. Keluarga yang mempunyai tingkat pendidikan yang relatif tinggi akan berbeda dalam menjalankan proses sosialisasi politik dibandingkan dengan keluarga yang mempunyai tingkat pendidikan yang relatif lebih rendah. Demikian pula status sosial keluarga (bangsawan atau bukan), domisili keluarga tersebut (di daerah perkotaan atau di daerah pedesaan yang relatif agak sulit terjangkau sarana komunikasi), dan lain-lainnya, akan mempunyai pengaruh terhadap keluarga dalam proses sosialisasi politik.

Demikian pula keluarga yang menganut atau menjalankan faham yang sifatnya demokratis akan tampak berbeda dengan keluarga yang menganut atau menjalankan faham yang sifatnya otoriter dalam proses sosialisasi politik bagi anak-anaknya. Di dalam keluarga yang menjalankan faham demokratis, misalnya dalam proses pengambilan suatu keputusan yang menyangkut kepentingan si anak, maka anak tersebut diajak bermusyawarah terlebih dahulu. Di dalam keluarga ini anak diajak serta berperan dalam menangani masalah-masalah keluarga. Hal yang demikian biasanya akan menimbulkan suatu interaksi yang harmonis di antara anggota-anggota keluarga. Orang tua menghargai dan memperhatikan pendapat anak-anaknya sekiranya pendapat itu benar dan baik, sebaliknya adanya penghargaan dan perhatian dari orang

tua terhadap anak-anaknya akan menimbulkan rasa hormat anak terhadap orang tuanya. Keadaan seperti ini juga akan mempunyai akibat dalam proses sosialisasi politik bagi si anak. Si anak, kelak apabila sudah dewasa dan misalnya telah memegang suatu jabatan politis, secara sadar atau tidak sadar akan berkecenderungan untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya demokratis. Terhadap anak buahnya, teman-temannya, atau mungkin terhadap saingan-saingannya, dia akan selalu cenderung mengajak bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya.

Sebaliknya, dalam suatu keluarga yang menganut atau menjalankan faham yang sifatnya sedikit banyak otoriter, maka hasil dari sosialisasi politiknya juga berbeda. Di dalam keluarga yang menganut faham yang sifatnya otoriter ini misalnya anak hanya menerima perintah orang tua saja dan harus melaksanakannya dengan segera dan benar. Di dalam keluarga ini anak tidak diajak berunding mengenai masalah-masalah keluarga, dia disingkirkan oleh orang tuanya untuk berunding, karena anak-anak dianggap belum dewasa dan belum memiliki pengetahuan apapun juga. Walaupun yang akan dirundingkan itu merupakan masalah yang menyangkut kepentingan si anak sekalipun. Si anak harus mematuhi perintah-perintah dan bentakan-bentakan orang tuanya. Hal yang demikian biasanya akan menimbulkan suatu interaksi yang kurang harmonis di antara anggota-anggota keluarga. Orang tua kurang menghargai dan memperhatikan pendapat anak-anaknya, dan mereka hanya memberi perintah-perintah yang harus dijalankan oleh si anak, dan keadaan semacam ini akan menimbulkan rasa takut anak terhadap orang tuanya. Si anak tunduk dan menjalankan perintah-perintah orang tuanya, biasanya bukan atas kesadarannya sendiri tetapi disebabkan oleh rasa takutnya terhadap orang tua. Keadaan yang seperti ini juga akan mempunyai akibat dalam proses sosialisasi politik bagi si anak. Si anak, kelak bila sudah dewasa dan misalnya telah memegang suatu jabatan politis, secara sadar atau tidak sadar akan berkecenderungan untuk melakukan tindakan-tindakan yang sedikit banyak otoriter. Dia tidak akan merasa segan untuk memberikan bentakan-bentakan yang memaksa anak buahnya melaksanakan perintah-perintahnya. Dalam proses pengambilan keputusan atau dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, dia sangat mungkin tidak akan mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Biasanya dia akan mengambil keputusan yang dipandanginya benar.

Dari uraian di atas kiranya telah cukup jelas bahwa proses sosialisasi politik dipengaruhi oleh sifat keluarga yang bersangkutan. Keluarga yang mempunyai sifat demokratis akan cenderung menghasilkan anak-anak yang lebih mengenal dan menganut nilai-nilai demokratis daripada nilai-nilai lainnya. Demikian pula keluarga yang mempunyai sifat otoriter akan cenderung menghasilkan anak-anak yang lebih mengenal dan menganut nilai-nilai yang sifatnya otoriter daripada nilai-nilai lainnya.

Dalam membicarakan keluarga sebagai suatu sarana sosialisasi politik, perlu pula mendapat perhatian bahwa paling tidak terdapat dua kondisi yang mendukung atau menyokong peranan utama keluarga dalam proses sosialisasi politik. Pertama, keluarga itu merupakan tempat di mana individu-individu disosialisasikan untuk yang pertama kalinya, karena keluarga merupakan lingkungan yang pertama kali dijumpai oleh individu begitu lahir di dunia. Dengan demikian, maka lembaga yang berwujud keluarga ini sebenarnya memegang monopoli dalam proses sosialisasi pada awal kehidupan seseorang individu. Dalam proses sosialisasi ini dibentuklah kepribadian anak-anak, dan banyak teori menyatakan bahwa pembentukan dan perkembangan kepribadian pada masa kanak-kanak mempunyai arti yang sangat penting dalam pembentukan dasar kepribadian, dan identitas pribadi serta identitas sosial seorang individu. Kedua, pengaruh-pengaruh yang berarti/penting didasarkan pada pertalian atau hubungan yang akrab di antara anggota-anggota keluarga. Maksudnya adalah bahwa semakin akrab pertalian atau hubungan yang bersifat emosional di antara anggota-anggota keluarga, makin berarti/penting akibat pengaruh-pengaruhnya bagi anak-anaknya. Sebaliknya di dalam keluarga yang mempunyai pertalian atau hubungan emosional yang kurang akrab di antara anggota-anggotanya, maka pengaruh-pengaruh yang diterima oleh anak-anak menjadi kurang berarti/penting.¹

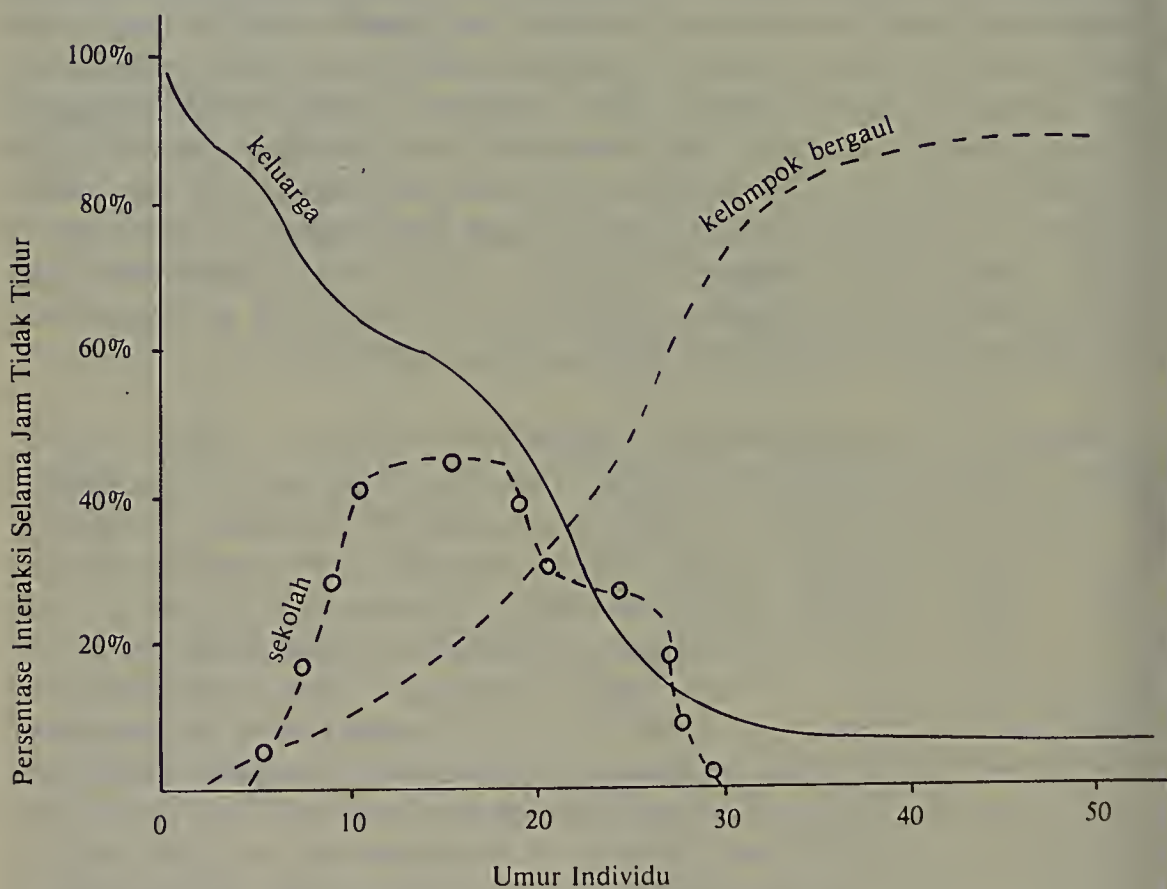
Perlu pula mendapat perhatian, bahwa proses sosialisasi politik yang dijalankan melalui sarana yang berwujud keluarga ini tidak bisa melepaskan diri dari sarana-sarana sosialisasi politik yang lainnya. Di atas telah disinggung, bahwa individu dapat mengalami proses sosialisasi politik melalui berbagai macam sarana sosialisasi yang ada secara bersama-sama. Demikian pula halnya dengan individu yang pertama kali mengalami proses sosialisasi politik di lingkungan keluarga; akan tetapi perkembangan atau pertumbuhan individu tadi dari dunia anak-anak ke dunia remaja, akan menimbulkan kemungkinan bahwa ia juga mengalami proses sosialisasi melalui sarana yang berwujud kelompok bergaul, karena ia tidak mungkin dapat melepaskan diri dari kelompok pergaulan yang terdapat di lingkungannya. Mungkin pula individu tadi, setelah masuk sekolah, dalam tenggang waktu yang bersamaan akan mengalami proses sosialisasi melalui sarana yang berwujud sekolah. Jadi terdapat kemungkinan bahwa sarana sosialisasi politik yang berwujud keluarga, kelompok bergaul, dan sekolah secara bersama-sama menjalankan proses sosialisasi politik.

Pada masa kanak-kanak, dalam hal anak-anak telah duduk di bangku sekolah, maka di antara ke-tiga sarana sosialisasi politik tadi (yaitu keluarga, kelompok bergaul, dan sekolah) manakah yang paling besar peranannya da-

¹Lihat dalam Dawson, et. al, *op. cit.*, hal. 114-115.

lam proses sosialisasi politik bagi si anak? Sebagai suatu ilustrasi dapatlah dikemukakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Paul Allen Beck tentang hubungan antara umur individu dan tingkat interaksinya dengan sarana-sarana sosialisasi politik yang berwujud keluarga, kelompok bergaul, dan sekolah.

GRAFIK INTERAKSI ANTARA UMUR INDIVIDU DENGAN SARANA-SARANA SOSIALISASI POLITIK: KELUARGA, KELOMPOK BERGAUL, DAN SEKOLAH¹



Dari grafik di atas dapat dinyatakan bahwa individu pada masa awal kehidupannya, lebih banyak mengalami proses sosialisasi di lingkungan keluarganya. Sebelum individu tadi dapat bermain dengan teman-temannya dan belum bersekolah karena faktor usia yang belum mencukupi, keluarga merupakan satu-satunya sarana sosialisasi yang dikenalnya. Sejalan dengan pertambahan umur individu tadi, maka kelompok bergaul mulai dikenal dan dimasukinya. Kelompok bergaul mulai memainkan peranannya dalam proses sosialisasi bagi

¹Lihat dalam Afan Gaffar, *op. cit.*, hal. 9

individu tadi, dan dengan sendirinya keluarga sedikit demi sedikit mulai berkurang peranannya dalam proses sosialisasi tersebut. Sebabnya ialah karena waktu yang ada sudah tidak sepenuhnya diperuntukkan oleh individu tadi bagi keluarga, tetapi juga bagi kelompok bergaul/bermainnya. Setelah individu yang bersangkutan mulai duduk di bangku sekolah, waktu yang diperuntukkan bagi keluarga lebih berkurang lagi. Dalam hal ini individu tadi sudah diharuskan membagi waktu yang ada padanya, dia harus meluangkan waktunya bagi keluarganya, dia harus bersekolah, dan dia juga harus memenuhi keinginannya untuk tetap dapat bermain di dalam kelompok bergaulnya. Jadi peranan sarana sosialisasi politik yang berwujud keluarga akan menurun dengan semakin bertambahnya umur individu yang bersangkutan. Dapat pula ditambahkan bahwa pada akhirnya di antara ke-tiga sarana sosialisasi politik ini, maka kelompok bergaul akan lebih banyak berperan dalam proses sosialisasi politik. Sarana yang berwujud sekolah hanya berperan sampai kira-kira individu mencapai usia 30-an tahun (begitu individu tidak bersekolah lagi, maka habislah peranan sekolah dalam proses sosialisasi politik baginya). Pada akhirnya, begitu individu bertambah dewasa, maka peranan keluarga dalam proses sosialisasi politik hanya sedikit sekali, karena ia lebih banyak meluangkan waktunya di luar keluarganya, misalnya di dalam kelompok bergaul, di dalam lingkungan pekerjaannya, di dalam organisasi politik yang dimasukinya, dan lain-lainnya.

Di bawah ini akan dibahas secara sepintas mengenai peranan keluarga di Indonesia dalam proses sosialisasi politik bagi anak-anaknya.¹ Dalam keluarga di Indonesia anak dipandang sebagai titipan dari Tuhan, oleh karena itu merupakan kewajiban orang tuanya untuk menjaga dan membesarkannya. Anak dipandang sebagai suatu sumber yang memberikan rejeki, oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau anak mendapat perhatian yang sangat besar dari orang tuanya dan segenap anggota keluarganya. Anak-anak oleh orang tuanya dijaga agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya dapat membahayakan dirinya. Jadi dalam hal ini peranan orang tua dan anggota-anggota keluarga lainnya yang sudah dewasa adalah memberikan perlindungan bagi si anak tadi. Hal yang demikian ini akan menyebabkan kurangnya kreativitas pada diri si anak. Anak-anak tidak dididik menjadi individu yang mandiri atau otonom, mereka secara sadar atau tidak sadar dididik untuk selalu bersandar dan bergantung kepada pihak lain. Malahan tidak jarang pula terjadi, apabila anak tadi telah dewasa maka urusan mencari pekerjaan dan mencari jodohnya masih menjadi tanggungan orang tua dan keluarganya.

¹Lihat pula Stephen Douglas, *Political Socialization and Student Activism in Indonesia*, Champaign - Urbana, The University of Illinois Press, 1970. Dalam buku ini oleh Stephen Douglas dinyatakan bahwa anak-anak di Indonesia "politically unsocialized."

Sifat lain yang cukup menonjol di dalam keluarga di Indonesia adalah terdapatnya sikap hormat atau respect terhadap orang-orang yang lebih tua usianya. Kepada ke-dua orang tua, kakek, nenek, paman, bibi, dan kakak si anak harus menaruh rasa hormat. Rasa hormat ini lebih banyak ditunjukkan dengan sikap yang sopan, tidak membangkang perintah-perintahnya. Sebaliknya yang merasa lebih tua usianya harus dapat membimbing atau "ngemong" yang lebih muda.

Dengan adanya interaksi di dalam keluarga seperti tersebut di atas, maka implikasinya dalam politik adalah bahwa salah satu ciri sistem politik di Indonesia yang khas adalah adanya sikap patuh terhadap struktur kekuasaan yang ada.¹

PENUTUP

Keluarga sebagai suatu lembaga yang pertama kali dikenal oleh individu, mempunyai peran yang cukup berarti dalam proses sosialisasi politik bagi individu tadi. Walaupun kita tidak menyangkal bahwa sarana-sarana sosialisasi politik yang lainnya, seperti kelompok bergaul, sekolah, lingkungan pekerjaan dan lain-lainnya juga mempunyai peran yang cukup berarti pula dalam proses sosialisasi politik. Keluarga menjalankan sosialisasi politik bagi individu-individu bersama-sama dengan sarana-sarana sosialisasi politik yang lain. Keluarga, sekolah, kelompok bergaul dalam tenggang waktu yang sama dapat menjalankan sosialisasi politik bagi individu-individu tadi.

Peranan keluarga dalam proses sosialisasi politik ditentukan oleh beberapa faktor. Ternyata faktor lingkungan memegang peranan yang cukup penting dalam proses sosialisasi politik. Lingkungan sosial budaya suatu masyarakat yang satu tentu berbeda dengan masyarakat yang lain, dengan adanya perbedaan ini maka keluarga-keluarga yang ada di kedua masyarakat tadi tentu akan berbeda pula dalam proses sosialisasi politik.

Pada keluarga-keluarga yang berada di dalam suatu masyarakat yang mempunyai lingkungan yang sama pun, terdapat kemungkinan perbedaan dalam proses sosialisasi politik yang dijalankannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: tingkat pendidikan keluarga, kekayaan keluarga, status

¹Lihat Afan Gaffar, *op. cit.*, hal. 15.

sosial keluarga, domisili keluarga, dan lain-lainnya. Perlu pula ditambahkan, bahwa keberhasilan keluarga sebagai sarana sosialisasi politik juga ditentukan oleh aktif tidaknya orang tua dalam mewariskan nilai-nilai, sikap-sikap, kaidah-kaidah yang terdapat di masyarakat kepada anak-anaknya. Hal itu tergantung pula pada penekunan si anak dalam menerima warisan itu. Tidak dapat dilewatkan bahwa interaksi atau hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak memegang peranan yang penting pula bagi berhasil atau tidaknya proses sosialisasi politik.

MASALAH-MASALAH DAN PERSPEKTIF KEBIJAKSANAAN KOMUNIKASI

Rufinus LAHUR

PENGANTAR

PBB sudah mencanangkan bahwa tahun 1983 adalah Tahun Komunikasi Dunia (World Communications Year), hal mana sekaligus menunjukkan bahwa memang kita sekarang ini berada dalam Era Komunikasi. Era Komunikasi ini bukanlah datang tanpa diundang. Ia hadir dilahirkan oleh perkembangan sains dan teknologi terutama teknologi telekomunikasi. Terdamparnya televisi di desa-desa di Indonesia barulah sekedar percikan dari gelombang teknologi komunikasi lainnya yang bakal menghempaskan kita semua. Dengan adanya penemuan silicon chip yang memungkinkan komputer mini dapat digunakan untuk pelbagai kebutuhan kantor dan rumah tangga, maka media dan sistem informasi ini pada dirinya membawa transformasi yang dramatis, pada kehidupan manusia, yang tidak mustahil sebentar lagi akan kita alami.

Apa dampak dari gelombang teknologi komunikasi ini bagi martabat manusia Indonesia terutama yang hidup di pedesaan, tidak ada yang dapat mengetahuinya dengan pasti. Mungkin inilah salah satu sumber kecemasan orang menghadapi pengaruh teknologi telekomunikasi, yaitu ketidaktahuan mengenai pengaruh manipulatif yang bakal diciptakannya yang dapat bersegi banyak dan belum tentu sesuai dengan kepentingan negara bangsa yang bersangkutan. Perbedaan menyolok antara tingkat perkembangan negara maju yang sudah pada tingkat padat otak (brain intensif) dan negara berkembang yang masih pada taraf padat karya, mengakibatkan yang terakhir ini tetap saja sebagai pasaran negara maju, bukan saja pasaran dari komoditi biasa, akan tetapi juga pasaran dari komoditi sosial, hasil industri intelektual negara maju, yaitu informasi. Hubungan yang tidak seimbang inilah merupakan ciri abad ke-20 ini, baik pada bidang ekonomi, sains dan teknologi termasuk teknologi telekomunikasi, beserta pesan yang dibawanya yaitu informasi; banjirnya unsur kebudayaan asing, merupakan masalah aktual masyarakat,

pendeknya ia telah menjadi problema sosial yang turut menambah kecemasan negara berkembang menyongsong Era Komunikasi sekarang ini.

Akan tetapi bersamaan dengan kecemasan itu, kita juga tidak dapat mengingkari bahwa akibat perkembangan sains dan teknologi maka dunia semakin jadi kecil dan saling berhubungan, sehingga mustahil kita dapat menutup diri atau menghindarkan diri dari pengaruh sistem yang lebih luas. Sehingga masalahnya bagi kita bagaimana memampukan diri sehingga dapat menggunakan keajaiban teknologi komunikasi demi kepentingan pembangunan manusia Indonesia.

Kalau masyarakat bangsa sebagai suatu unit fungsional kita mau analogikan dengan suatu organisme, maka komunikasi dapat dianalogikan dengan sistem jaringan syarafnya sedangkan kebudayaan bangsa dapat dianalogikan sebagai jiwa dari organisme bangsa itu. Dalam pengandaian ini tersirat dianutnya suatu sistem terbuka, termasuk sub-sistem komunikasinya, di mana sistem komunikasi mempunyai misi untuk turut merealisasi tujuan nasional sesuai dengan kebutuhan tingkat perkembangan dan pengembangan identitas bangsa.

Sejauh mana suatu bangsa sanggup mengembangkan kemampuan untuk menghadapi ketimpangan komunikasi dunia sekaligus mengembangkan identitasnya dengan menata suatu sistem komunikasi yang tepat merupakan ujian bagi semua negara berkembang termasuk Indonesia.

Dengan latar belakang ini berturut-turut akan dikemukakan beberapa masalah komunikasi, modal atau sumber dalam menghadapi masalah komunikasi, keadaan komunikasi, kebijaksanaan komunikasi dan penutup.

MASALAH KOMUNIKASI

Komunikasi walaupun ia diprioritaskan, hanya merupakan salah satu bagian saja dari sekian prioritas kebutuhan, yang secara serempak muncul untuk segera dipenuhi. Karena itu masalahnya bukanlah soal penting atau tidak pentingnya komunikasi, akan tetapi bagaimana ia dilaksanakan dalam hubungan imbalan dengan lain-lain kebutuhan secara keseluruhan dan terutama disesuaikan dengan kemampuan nyata yang disediakan untuk itu.

Kalau negara maju telah mengalami secara bertahap perkembangan media komunikasi mulai dari tahap pertama (yang tidak membutuhkan listrik dan mesin dalam pemakaiannya) seperti tulisan, gambar, peta; kemudian disusul dengan tahap berikut dari media di mana mesin sudah dipakai seperti mesin

cetak; disusul dengan media berikutnya yang memakai listrik dan mesin dalam proses komunikasinya seperti film, radio dan televisi, serta pada generasi yang keempat di mana digunakannya komputer dengan proses komunikasi yang tergantung pada komunikasi antara "manusia dan mesin." Lain halnya dengan negara yang sedang berkembang, keempat tahap generasi media ini secara serempak melandanya. Padahal mereka belum sempat mengidentifikasi peranan dari media ini masing-masing apalagi pemanfaatan dan penguasaannya, tidak saja perangkat kerasnya (*hardware*), akan tetapi juga perangkat lunaknya (*software*). Keadaan ini pada gilirannya menimbulkan masalah sosial yang mungkin tidak terdapat atau tidak dikenal di negara asalnya, tetapi pasti menimbulkan masalah bagi negara konsumen seperti halnya Indonesia. Bagaimana menyiapkan tenaga ahli dan trampil dalam waktu yang singkat apalagi untuk menyiapkan masyarakat secara keseluruhan, bukanlah suatu kegiatan yang tanpa masalah.

Keanekaan masyarakat bangsa sub-nasional sangat beragam, baik ditinjau dari latar belakang kebudayaan, tingkat perkembangan, perbedaan kadar sikap keterbukaannya, letak geografis dan sebagainya. Hal ini menuntut peranan tambahan dari komunikasi, yaitu di samping berperanan mendorong integrasi bangsa sebagaimana layaknya untuk suatu sistem negara kesatuan yang menganut ideologi tertentu yaitu Pancasila, juga komunikasi yang ada harus berorientasi pada masyarakat sub-nasional yang harus tumbuh. Pendeknya diperlukan suatu pola komunikasi Bhinneka Tunggal Ika, tidak saja substansinya mungkin juga media dan caranya, yang dapat menjangkau penduduk yang tersebar dalam 931 pulau-pulau besar dan kecil.

Dari kedua masalah yang baru tersebut di atas timbullah satu anak masalah sebagai akibatnya yaitu bahwa informasi yang ada melalui komunikasi massa yang ada seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan yang memang diperlukan oleh masyarakat. Atau dengan kata lain tidak ada relevansinya. Malah sebaliknya mungkin saja hanya menimbulkan keinginan dan hasrat konsumsi mewah tanpa didukung oleh kemampuan nyata. Keadaan semacam ini hanya akan menimbulkan frustrasi yang tidak perlu. Di samping itu rendahnya kemampuan intelektual dari masyarakat, terutama di desa, mengakibatkan isi pesan yang terkandung dalam media massa modern (radio, televisi, film dan media cetak), sangat sulit diserap.

Daftar masalah yang berhubungan dengan komunikasi ini dapat diperpanjang, akan tetapi untuk maksud ini apa yang dikemukakan di atas dianggap sudah cukup memadai. Dari masalah komunikasi ini tampak beberapa seginya yang menonjol, yaitu adanya ketimpangan komunikasi, baik tingkat global, maupun tingkat nasional; serta ketimpangan antara perangkat keras yang relatif lengkap dan perangkat lunak yang belum siap. Masalahnya bukan

saja bagaimana meratakan pemindahan pengetahuan dan informasi umumnya akan tetapi menonjol adanya kebutuhan akan suatu sistem global yang sehat, berikut pendinamisan sistem sosial nasional yang sehat pula sehingga dapat terwujud kaitan yang fungsional pada tingkat nasional, regional maupun global. Tantangan inilah yang secara serentak dihadapkan pada setiap negara berkembang sekarang ini, termasuk Indonesia.

MODAL DALAM MENGHADAPI MASALAH KOMUNIKASI

Sebagai suatu unit fungsional, maka modal utama bangsa Indonesia dalam menghadapi masalah yang berhubungan dengan komunikasi dapat dilihat dalam pengalaman hidup pada masa silam, kemampuan untuk melihat masalah yang dihadapi hari ini, berikut kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia untuk menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan kemampuan nyata yang ada.

Dari sejarah bangsa Indonesia tampak jelas bagaimana besarnya kemampuan dari bangsa yang mendiami Nusantara ini untuk mengadakan akulturasi, baik pada jaman Hindu, kedatangan Islam, maupun kedatangan dunia maju dengan pengetahuan dan teknologinya. Kedatangan pengaruh luar itu, termasuk pengaruh penjajahan ternyata ditanggapi oleh manusia di kawasan ini dengan tidak mengorbankan identitas nasionalnya. Malah sebaliknya semua pengaruhnya itu dijawab dengan suatu tekad solidaritas yang tinggi seperti antara lain ditunjukkan oleh sejarah perjuangan melawan penjajahan termasuk diwujudkannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yang menyatakan jiwa persatuan dan kesatuan yang tinggi, yaitu satu bangsa, bangsa Indonesia, satu tanah air tanah air Indonesia dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Adanya kesatuan tekad, semangat dan jiwa ini dengan bahasa yang satu pula merupakan modal utama untuk menghadapi segala tantangan, termasuk masalah yang dibawa oleh membanjirnya komunikasi di wilayah ini. Dalam menghadapi tantangan ini, maka para pejuang kebangsaan dan pemuka-pemuka masyarakat memanfaatkan pelbagai media tradisional, komunikasi interpersonal, di samping media massa lainnya yang ada dalam masyarakat.

Di samping melihat kekuatan yang berakar dalam sejarah, maka secara sadar dan berencana telah dikembangkan dan dilembagakan sikap dan kebijaksanaan *untuk melihat ke depan*, terutama berorientasi kepada manusia sebagai subyek pembangunan, di mana juga tampak peranan komunikasi di dalamnya. Kemampuan politik ini sudah lama melembaga melalui rangkaian Ketetapan MPR dalam menentukan GBHN, serta pelaksanaannya dituangkan dalam Repelita dan pelaksanaan operasionalnya setiap tahun melalui APBN. Dengan demikian, secara perlahan dan pasti manusia Indonesia dididik untuk turut mengantisipasi budaya masa depan, yang manusiawi.

Jalur-jalur komunikasi yang ada semakin menunjukkan kemajuan. Sejalan dengan adanya rangkaian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang terus berlanjut, maka demikian juga halnya dengan keadaan komunikasi menunjukkan kemajuan yang dapat dianggap sebagai modal untuk usaha selanjutnya. Dalam hubungan ini dapat disebut beberapa jalur yang ada hubungannya dengan kegiatan komunikasi, yaitu jalur komunikasi melalui administrasi negara/pemerintah, jalur komunikasi massa, jalur komunikasi tradisional, kontak interpersonal dan jalur pendidikan terutama pendidikan tinggi. Pada umumnya terdapat kemajuan orientasi dan mutunya tidak saja segi perangkat keras (hardware) akan tetapi juga perangkat lunak (software). Pada pihak lain lembaga-lembaga kemasyarakatan juga mulai berfungsi termasuk organisasi politik dan organisasi profesi, dan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat umumnya. Lembaga-lembaga ini pun menurut definisi melakukan fungsi komunikasi. Jalur-jalur ini pada dirinya merupakan "agen" komunikasi, yang melakukan proses komunikasi sambil memanfaatkan media massa modern, media tradisional maupun kontak personal. Masalah utama ialah sejauh mana media itu dikombinasi secara tepat sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat setempat.

Dengan sumber ini sebagai modal, maka bangsa Indonesia terus-menerus berusaha untuk mendinamisasikan sistem kemasyarakatannya dengan penuh optimisme. Dengan latar belakang semangat ini pula maka di bawah ini akan dikemukakan beberapa kenyataan pada bidang komunikasi, kemudian disusul dengan kebijaksanaan yang perlu diterapkan dalam peletakan dasar sistem komunikasi, sebagai bagian daripada sistem nasional keseluruhan, demi meningkatkan ketahanan nasional secara keseluruhan pada pelbagai bidang, baik ideologis, politik, ekonomi, hankam maupun sosial budaya.

KEADAAN KOMUNIKASI

Di atas telah dikemukakan secara umum modal bangsa Indonesia dalam menghadapi dan menjalankan eksistensi hidupnya, khususnya yang berhubungan dengan masalah komunikasi yang sedang dihadapi. Berikut ini akan dikemukakan beberapa hal yang ada hubungannya dengan keadaan nyata dari komunikasi walaupun hanya secara umum saja.

Dalam tahun yang terakhir ini, sejalan dengan pelaksanaan tahun ketiga Repelita III, maka kegiatan komunikasi diarahkan untuk menciptakan iklim yang dapat menumbuhkan pengertian yang tepat di kalangan masyarakat akan tujuan pembangunan nasional pada umumnya berikut program pembangunan serta secara kontinyu mengkomunikasikan pelaksanaannya, baik yang berhasil maupun yang belum berhasil dengan menunjukkan berba-

gai sebab dan musababnya serta kemungkinan penanggulangannya pada masa yang akan datang. Hal ini dilakukan melalui pelbagai media sehingga meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dan perasaan memiliki serta bertanggung jawab dalam ikut mengusahakan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk itu telah dilakukan kegiatan penerangan oleh pemerintah; baik secara langsung dengan mengadakan pameran (di seluruh tingkat mulai propinsi, kabupaten dan kecamatan di seluruh tanah air), kegiatan tatap muka, pemanfaatan media massa seperti radio, televisi, film, pers dan penerbitan-penerbitan, yang mutunya terus ditingkatkan dengan dukungan pelbagai penelitian dan lokakarya; kegiatan-kegiatan juga dilakukan oleh perguruan tinggi dan organisasi profesi terutama yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan komunikasi.

Demi meningkatkan daya guna dan tepat guna penerangan, maka kegiatan penerangan dilakukan secara terpadu melalui Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) dan Badan Koordinasi Penerangan (Bakopen) seperti Bakopen Bimas, Haji, Keluarga Berencana serta melalui penyelenggaraan pameran yang dilakukan secara periodik di seluruh daerah propinsi, kabupaten dan kecamatan. Sebagai unit pelaksana kegiatan operasi penerangan telah dibentuk Pusat Penerangan Masyarakat (Puspenmas) pada kabupaten dan kotamadya di seluruh propinsi. Diharapkan Puspenmas dapat menampung dan menyalurkan informasi ke atas sebagai arus balik yang diperoleh dari masyarakat dan mendorong komunikasi antara kelompok masyarakat.

Di samping itu, unit yang demikian ini merupakan badan yang bertanggung jawab dalam membina kelompok siaran pedesaan, kelompok penonton televisi dan usaha koran masuk desa. Karenanya badan ini diperlengkapi dengan macam-macam alat yang diperlukan seperti proyektor, slide, pengeras suara, radio, mesin cetak kecil serta satuan penerangan keliling untuk meningkatkan daya dan jangkauan penerangan ke daerah pedesaan.

Dalam rangka menciptakan pemerataan penerangan bagi seluruh golongan masyarakat serta memungkinkan rakyat yang belum mampu untuk dapat menikmati siaran televisi, maka sampai tahun 1981/1982 telah disebarkan sebanyak 21.543 pesawat televisi umum dengan atau tanpa generator di kecamatan-kecamatan di seluruh tanah air yang terjangkau oleh siaran televisi, termasuk Propinsi Timor Timur. Selain itu sejumlah 11.937 radio umum telah ditempatkan di kecamatan-kecamatan yang belum terjangkau oleh siaran televisi sekaligus untuk menunjang diskusi-diskusi kelompok siaran pedesaan.

Khusus di bidang radio maka dibandingkan dengan keadaan beberapa tahun lalu tampak perkembangan, jika jumlah stasiun penyiaran yang tahun 1973/1974 sebanyak 46, kini berjumlah 49; stasiun pemancar dalam tahun 1973/1974 sebanyak 120, kini (1981/1982) banyaknya 278, dengan kekuatan

seluruhnya 2.851 KW, suatu peningkatan sekitar 235% jika dibandingkan dengan keadaan kekuatan pemancar tahun 1973/1974 yang hanya 850 KW.

Di samping usaha meningkatkan ketrampilan yang berhubungan dengan penguasaan segi perangkat keras (hardware) maka terus ditingkatkan usaha yang berhubungan dengan mutu programnya yaitu software-nya; walaupun yang terakhir ini belum memenuhi kebutuhan dari seluruh golongan masyarakat. Untuk meningkatkan mutu siaran maka telah dilakukan secara teratur peningkatan ketrampilan personalia melalui Pusat Latihan RRI, begitu pula telah diselenggarakan penataran para petugas siaran pedesaan maupun ketua kelompoknya.

Bersamaan dengan itu maka dalam rangka pembinaan radio siaran non-RRI telah diadakan penataran bagi para penanggung jawab teknik dan penanggung jawab siaran dengan harapan agar radio siaran swasta dapat meningkatkan mutu siarannya guna menunjang pembangunan nasional.

Di samping itu siaran pendidikan/sekolah yang diselenggarakan sebagai percobaan oleh RRI pada beberapa tempat (Jakarta, Yogyakarta dan Semarang) sejak tahun 1969, saat ini telah dapat dipersiapkan oleh stasiun-stasiun RRI di seluruh Indonesia, terutama untuk keperluan penataran guru-guru sekolah dasar.

Siaran RRI yang ditujukan ke luar negeri telah diperluas dengan penyelenggaraan siaran dalam bahasa Thai dan Jepang di samping siaran-siaran yang dilakukan dalam bahasa Indonesia, Inggris, Perancis, Arab, Mandarin dan Melayu. Pada saat ini jumlah jam siaran yang ditujukan ke luar negeri adalah 11 jam setiap hari.

Pada bidang televisi telah dilaksanakan pembangunan pemancar-pemancar baru; dengan memanfaatkan fasilitas sistem komunikasi satelit domestik (SKSD) maka siaran TVRI Jakarta saat ini telah dapat diterima di seluruh ibukota propinsi, termasuk ibukota dari propinsi yang ke-27 yaitu Dilli di Timor Timur.

Pada saat ini (1982) di seluruh Indonesia terdapat 9 stasiun penyiaran pada tahun 1973/1974 ada 6 buah. Kini jumlah stasiun pemancar ada 120 buah, sedangkan pada tahun 1973/1974 terdapat 22 buah. Stasiun penghubung sekarang ada 30 buah, sedangkan pada tahun 1973/1974 ada 6 buah. Luas daerah jangkauan siaran telah bergerak dari 72.100 km² dalam tahun 1973/1974 menjadi 427.500 km² saat ini. Di pihak lain jumlah penduduk yang dalam daerah pancaran saat ini 90 juta, suatu kenaikan lebih 100% jika dibandingkan dengan keadaan lima tahun sebelumnya. Jumlah pesawat televis

yang dipakai penduduk pun mengalami kenaikan sehingga sekarang ini (tahun 1982) terdapat 2.599.827 buah televisi.

Perubahan pola acaran siaran TVRI yang lebih berorientasi pada pembangunan pedesaan dan tata budaya nasional telah dimulai sejak 20 Mei 1975 dan akan terus ditingkatkan serta diperluas pula bagi siaran radio dan produksi film.

Dengan makin meluasnya jangkauan siaran TVRI dan adanya distribusi pesawat televisi umum sampai tingkat kecamatan, maka isi dan penyajian acara siaran TVRI disesuaikan dengan aneka ragam tata nilai kehidupan masyarakat di daerah-daerah. Penyiaran film asing dikurangi secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan TVRI untuk membuat produksi acaranya sendiri.

Pada bidang produksi film penerangan pemerintah, telah diadakan peningkatan sarana Unit Pusat Produksi Film Negara (PPFN) di antaranya dengan pengadaan sebuah unit laboratorium film berwarna yang saat ini telah dioperasikan. Pengadaan berbagai peralatan produksi film yang baru telah didukung dengan pelaksanaan rehabilitasi prasarana dan peningkatan ketrampilan karyawannya. Laboratorium film tersebut selain beroperasi untuk film penerangan juga memberikan fasilitas bagi pengembangan produksi film swasta nasional.

Pembinaan dan pengembangan pers didasarkan pada pola pers yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu adanya keseimbangan antara kebebasan menyatakan pendapat dan kesadaran serta tanggung jawab untuk turut menantapkan stabilitas nasional. Mengenai bantuan pemerintah dalam pembinaan pers ini lebih dititikberatkan kepada peningkatan mutu pers, sarana, usaha dan produksi. Pembinaan yang telah dilakukan adalah dalam bidang peningkatan pengetahuan pers dan tata laksana, keuangan, permodalan, periklanan dan sirkulasi. Pembinaan kewartawanan ditujukan kepada peningkatan ketrampilan jurnalistik wartawan Indonesia, di samping memungkinkan rasa tanggung jawab pers nasional sebagai lembaga dari masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kegiatan dilakukan dalam bentuk Karya Latihan dan Lokakarya. Pembinaan materi bagi pengembangan pers dilakukan melalui pemberian fasilitas berupa keringanan bea masuk bagi kertas koran untuk pers dan bahan baku/penunjang yang digunakan industri grafika pers serta biaya angkutan kertas koran untuk pers daerah. Dengan demikian terus diusahakan agar perusahaan pers nasional tahap demi tahap mampu untuk berkembang, sehingga hasilnya terjangkau oleh masyarakat luas di seluruh Indonesia.

Dengan terbentuknya Badan Kerja Sama Periklanan, maka mulai tahun 1977 dirintis usaha menyehatkan isi periklanan dan meratakan iklan dalam surat-surat kabar sampai ke daerah-daerah.

Pengembangan industri grafika pers mendapat perhatian di dalam penyusunan daftar skala prioritas PMDN. Selanjutnya dalam rangka mengembangkan dan memperluas pasaran pembaca surat kabar di daerah-daerah pedesaan dan untuk menumbuhkan kegemaran membaca, telah diselenggarakan Koran Masuk Desa yang dimulai di empat-propinsi di Jawa dan Sulawesi Selatan, dan pada tahun 1981/1982 mencakup 22 propinsi, dengan jumlah oplah 15.652.000 eksemplar per tahun.

Keadaan komunikasi ini mungkin belum seberapa jika ditinjau misalnya dengan ukuran yang pernah dibuat oleh UNESCO; dan dengan ukuran itu Indonesia merupakan salah satu dari dua pertiga negara yang belum memenuhinya. Akan tetapi jika dilihat dari tumpukan masalah yang dihadapi, maka apa yang diutarakan adalah *pencerminan dari kemampuan nyata*, dan yang lebih penting lagi cerminan dari tekad untuk merealisasi cita-cita nasional di mana manusia Indonesia dengan nilai budayanya ditempatkan pada posisi sentral.

Karenanya, masalah utama bagi Indonesia, ialah bagaimana *meratakan kemampuan minimal* setiap warga negara, kelompok budaya, agar mampu berdialog dengan media dan sistem informasi yang ada; yaitu kemampuan untuk dapat membaca media cetak, kemampuan untuk mendengar radio, kemampuan untuk menonton televisi dan film. Pendeknya, persiapan untuk berbudaya komunikasi massa. Adanya gejolak sekedar nongkrong menghabiskan waktu nonton televisi/radio, sehingga mengganggu pekerjaan sehari-hari merupakan peringatan, bagaimana pentingnya *disiplin* keluarga dan masyarakat dalam hidup bersama dengan media komunikasi ini. Sedangkan rendahnya pengetahuan umum, mengakibatkan minimnya daya serap terhadap pesan komunikasi yang ada. Semua ini, merupakan sumber inspirasi untuk membina proses komunikasi selanjutnya, baik nasional maupun lokal.

KEBIJAKSANAAN KOMUNIKASI

Kebijaksanaan yang berhubungan dengan komunikasi pada dasarnya sudah termuat secara eksplisit dalam UUD 1945, GBHN yang ditetapkan oleh MPR dan lain-lain peraturan perundangan. Di samping ada yang eksplisit juga ada yang secara tersirat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Baik peraturan perundangan maupun konteks sosio-kultural, pada dasarnya merupakan faktor yang mencerminkan sifat kegiatan komunikasi sekaligus juga merupakan faktor yang membatasinya.

Dengan memperhatikan keadaan dan beberapa masalah pokok yang berhubungan dengan komunikasi seperti yang telah dikemukakan maka dapat diajukan kebijaksanaan komunikasi umumnya dan penerangan khususnya sebagai berikut. Yang pertama, meratakan kemampuan dan peluang bagi semua WNI, terutama yang berdiam di desa, untuk dapat menjangkau dan mengambil manfaat dari sumber informasi yang mereka perlukan; salah satu caranya ialah memperbesar arus penerangan ke daerah pedesaan dalam rangka pemerataan informasi dan pengembangan sikapnya yang selaras dengan tuntutan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan sekarang ini bermaksud meniadakan ketimpangan sosial termasuk meniadakan ketimpangan komunikasi/informasi antara masyarakat kota dan masyarakat desa di mana sebagian terbesar dari rakyat Indonesia berada di pedesaan. Kecuali itu pertimbangan lain yang juga penting ialah bahwa titik sentral dari Repelita adalah bidang pertanian dan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat banyak yang sebagian terbesar hidup dan bertempat tinggal di daerah pedesaan. Untuk meningkatkan kecerdasan dan pengertiannya mengenai masalah yang kita hadapi berikut kemungkinan yang dapat dilakukan melalui perencanaan dan kerja keras di mana mereka harus ikut ambil bagian di dalamnya maka arus penerangan/komunikasi ke daerah pedesaan harus ditingkatkan. Sehingga dengan demikian pembangunan yang ada secara sadar dan berencana dimulai dari bawah dan dari dalam. Untuk itu kebijaksanaan penerangan diarahkan untuk pemerataan informasi sampai ke desa-desa melalui sarana yang ada seperti penerangan tatap muka, penerangan radio, televisi, film, pers dan penerbitan. Kedua, pengembangan dan peningkatan kegiatan penerangan dan komunikasi timbal-balik.

Gairah untuk berpartisipasi dari rakyat dalam pembangunan perlu ditingkatkan, karena dengan jalan inilah mereka secara konkrit ikut bertanggung jawab serta ikut memikirkan dan memecahkan masalah-masalah pembangunan yang dihadapinya. Karenanya apa yang menjadi kebutuhan mereka, pengalaman dan tanggapannya terhadap pelbagai pelaksanaan pembangunan perlu didengar. Tidak saja sebagai umpan balik untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin ada akan tetapi di mana perlu mungkin juga kebijaksanaan yang ada perlu ditinjau; begitu pula umpan balik dari masyarakat pada gilirannya dapat memperbaiki mutu informasi/komunikasi, tidak saja isinya mungkin juga caranya. Tetapi yang lebih penting lagi bahwa usaha untuk mempengaruhi sikap mereka sehingga semakin dewasa dalam menanggapi masalahnya, mungkin dapat lebih efektif melalui kontak pribadi. Karenanya komunikasi dua arah ini tidak saja berlangsung antara pemerintah dan masyarakat, akan tetapi terutama juga diharapkan berlangsung secara berlanjut antara kelompok masyarakat, secara bebas, terbuka, terarah, jujur, bertanggung jawab dan adanya rasa saling percaya, saling menghormati dan saling membutuhkan. Di mana pesan disampaikan secara persuasif, tak ubahnya seperti jual-

beli barang dagangan di pasar bebas. *Hanya dengan hubungan dialog semacam ini, komunikasi menemukan maknanya yang hakiki.*

Dalam hubungan dengan dialog ini maka unsur masyarakat yang berwujud dapat berperan seperti pemimpin tradisional, para guru dan lain-lain warga desa yang telah berpendidikan, yang mungkin dalam praktek sudah menjadi tempat bertanya dari warga masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya kerja sama antara pendekatan komunikasi massa dan kontak langsung ini, maka dapat diharapkan isi pesan bisa lebih efektif dan efisien.

Dasar idiil dari komunikasi dua arah ini ialah bahwa dalam pembangunan yang dilakukan ini manusia ditempatkan bukan saja sebagai obyek akan tetapi juga sebagai subyek. Sedangkan komunikasi sebagai bagian dari pembangunan itu dengan sendirinya harus menempatkan manusia itu sebagai subyek, sebab komunikasi itu untuk kepentingan mereka. Karenanya kebutuhan, tingkat perkembangan, dan tanggapan mereka harus menjadi pertimbangan utama dari setiap kegiatan komunikasi, sehingga senantiasa ada kemajuan, baik isi, teknik, media, maupun metode yang dipakai, yang terus-menerus dilakukan sebagai bagian dari kehidupan kita. Ketiga, kegiatan komunikasi dengan pendekatan kebudayaan.

Telah dikatakan bahwa kebudayaan merupakan jiwa dari organisme masyarakat bangsa, sedangkan komunikasi adalah merupakan sistem syarafnya. Karenanya ada hubungan yang sangat erat antara komunikasi dan kebudayaan. Komunikasi yang sehat dan menjangkau ke seluruh tubuh bangsa pada gilirannya turut mempersehat tubuh bangsa keseluruhan. Sebaliknya kalau komunikasi macet maka sebagian dari tubuh bangsa dapat lumpuh yang pada gilirannya mempengaruhi kehidupan jiwa dari bangsa itu. Inti dari tata nilai budaya bangsa secara eksplisit telah dituangkan dalam rumusan Pancasila yang telah menjadi pandangan hidup bangsa dan ideologi. Karena itu nilai budaya bangsa tersebut, tidak saja dipakai untuk pendekatan komunikasi akan tetapi sekaligus menjadi pegangan dan orientasinya, baik nasional maupun lokal. Kita menyadari bahwa manifestasi dari nilai budaya bangsa kita itu sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain, karenanya komunikasi hendaknya juga menitikberatkan pada penggunaan pendekatan kebudayaan yang beraneka itu. Baik untuk tingkat nasional dengan mengembangkan suatu kebijaksanaan "intercultural", dan dalam suatu unit yang lebih homogen dengan pendekatan kebudayaan setempat, terutama memanfaatkan pelbagai media tradisional yang tersebar di seluruh tanah air, seperti: Seudati di Aceh, Mamanda di Kalimantan, Ketoprak dan Wayang di Jawa, Randai di Sumatera Barat, dan lain-lain. Dengan melihat kenyataan bahwa di seluruh tanah air sekarang ini telah terdapat 64.650 desa yang tersebar dalam 931 pulau, lengkap dengan perbedaan cara hidup dan kebiasaan masing-masing, maka dapat di-

bayangkan bagaimana semakin terasa diperlukan suatu "kebijaksanaan komunikasi yang komprehensif" berikut pengelolaan yang tepat baik yang bersifat "sentral" maupun yang seharusnya di-"desentralisasi"-kan, baik yang "intercultural" maupun yang "inter-island". Karenanya, di samping media komunikasi yang mempunyai jangkauan dari Sabang hingga Merauke, diperlukan adanya *media komunikasi lokal*, misalnya komunikasi bagi kabupaten tertentu. Keempat, adanya kebijaksanaan komunikasi yang terpadu.

Dengan mengingat tujuan dari komunikasi, sasaran yang harus digarap yaitu terutama masyarakat pedesaan, dengan aneka adat-istiadat yang harus diperhitungkan yang tersebar dalam lingkungan wilayah yang begitu luas, maka perlu dikembangkan suatu kurikulum komunikasi yang memadai menurut media dan sasarannya serta memanfaatkan semua lembaga yang ada, seperti lembaga pemerintah/negara, media komunikasi massa modern umumnya, lembaga tradisional dalam masyarakat, lembaga pendidikan terutama pendidikan tinggi serta lembaga masyarakat umumnya baik organisasi sosial politik maupun lembaga profesi. Dalam hubungan ini diperlukan suatu usaha interdisipliner, cross-cultural dan multiprofesional khususnya dalam menciptakan kurikulum komunikasi yang tepat, yang tidak saja mentransfer pengetahuan (knowledge) dan informasi pada umumnya akan tetapi juga dapat mendorong perubahan sikap yang diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan. Kurikulum komunikasi massa yang kita maksudkan ini perlu ditopang oleh kurikulum pendidikan juga pendidikan tinggi yang tepat sehingga kita semakin berkemampuan untuk mengarahkan dan memutuskan jenis pengetahuan yang tepat diperlukan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kecerdasannya berikut lingkungan sosial budayanya. Dalam hubungan ini perlu diselidiki arti konotatif dan denotatif dari semua simbol komunikasi sehingga mempunyai pengaruh yang diinginkan.

Segi lain dari pendekatan kurikuler komunikasi massa yang disebut di atas ialah memampukan masyarakat untuk menyeleksi dan menyaring mana pengetahuan (informasi) yang benar maupun yang tidak benar; berikut kemampuan untuk menanggapiya baik yang positif maupun terhadap informasi yang negatif, termasuk kemampuan untuk mengantisipasi akibat samping ("side effect") dan "after effect" dari semua informasi, sehingga selalu dapat dimanfaatkan untuk kebutuhannya sebagai manusia yang sedang membangun. Kemampuan tersebut di atas ini pada dasarnya merupakan kemampuan untuk mengadakan "self-transformation" terhadap setiap rangsangan apapun sehingga bermanfaat bagi pendewasaan masyarakat yang bersangkutan. Di sini diperlukan pandangan yang menyeluruh terhadap lingkungan dan diri sendiri sebagai bangsa, sehingga dengan demikian kebijaksanaan komunikasi tidak hanya memperhitungkan "cost effectiveness" dalam perencanaannya akan tetapi juga "value effectiveness."

Karenanya sangat diperlukan adanya kebijaksanaan yang menyeluruh pada pelbagai bidang di mana komunikasi merupakan bagiannya. Untuk ini diperlukan paling tidak strategi pembangunan dan strategi kebudayaan. Untuk Indonesia, baik kebijaksanaan pembangunan maupun kebudayaan menempatkan manusia pada posisi sentral. Karenanya kebijaksanaan komunikasi pun demikian juga. Bangsa Indonesia juga dihadapkan dengan masalah ketimpangan komunikasi antara daerah dan golongan masyarakat. Juga di dalamnya terlibat usaha untuk memanusiakan manusia. Di sinilah menonjolnya segi moral daripada kebijaksanaan komunikasi. Dengan berorientasi kepada manusia dan mulai dari manusia bangsa Indonesia dapat terus berusaha untuk mendinamisasikan sistem masyarakat yang sehat sehingga dapat secara fungsional berkembang menumbuhkan kemampuan dan memenuhi kebutuhannya juga; dengan demikian masyarakat secara menyeluruh turut bertanggung jawab membina dan menyongsong suatu budaya masa depan yang sanggup menjawab masalah manusia dan kelangsungan serta peningkatan martabatnya.

PENUTUP

Kami menyadari, seperti telah juga disampaikan pada awal dari tulisan ini bahwa akibat perkembangan sains dan teknologi sekarang ini dunia semakin menjadi kecil dan menyatu. Demikian menjadi satunya sehingga keadaan saling bergantung tidak bisa dihindari lagi. Begitu pula dalam bidang komunikasi/informasi. Dalam keadaan saling bergantung ini sebagai salah satu dari negara yang sedang berkembang kami mengamati bahwa dalam bidang ini pun, seperti halnya dalam bidang sosial ekonomi terdapat saling bergantung yang tidak seimbang, yang tidak adil dan karenanya juga tidak sehat. Di mana monopoli informasi dan pengetahuan ada pada genggam tangan negara yang sudah maju. Sedangkan sejarah juga telah menunjukkan termasuk sejarah penjajahan terhadap negara yang sedang berkembang diawali oleh penguasaan pada bidang pengetahuan termasuk teknologi. Sehingga tidak bisa dihindari lagi kesan bahwa pengetahuan adalah analog dengan kekuasaan. Siapa yang memiliki pengetahuan (termasuk sumber informasi) ia memiliki kekuasaan; sedangkan siapa yang mentransfer pengetahuan ia pada gilirannya berkuasa untuk mentransfer kekuasaan atau kehendaknya. Dan kedua-duanya ada pada tangan negara yang telah maju. Di sinilah aspek tidak etis dari komunikasi dunia dewasa ini bahwa segelintir manusia negara maju menguasai kehidupan atau memanipulasi manusia negara yang sedang berkembang.

Dalam menata kebijaksanaan komunikasi, maka negara berkembang seperti halnya Indonesia harus memperhitungkan faktor global komunikasi

yang strukturnya tidak adil itu, serta keadaan komunikasi dalam negeri yang belum fungsional termasuk ketimpangan komunikasi. Jadi kebijaksanaan komunikasi negara yang sedang berkembang bersegi dua; pada satu pihak memperjuangkan kondisi saling bergantung yang seimbang dengan negara maju, sedangkan pada pihak yang lain, yaitu ke dalam, meningkatkan kemampuan warganya untuk dapat memanfaatkan dan mengatasi keadaan komunikasi yang ada untuk pendewasaan dirinya, agar tidak menjadi korban dari perkembangan yang ada. Atau dengan kata lain meningkatkan kemampuan untuk mengadakan "self transformation" baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Untuk itu diperlukan pemerataan kemampuan dan kesanggupan untuk tetap belajar demi menciptakan dan menyongsong suatu budaya komunikasi yang lebih etis, di mana manusia menjadi sentralnya. Untuk itu perlu terus dikembangkan kemampuan untuk memanfaatkan dan menguasai tidak saja perangkat lunak dari komunikasi yang ada akan tetapi juga perangkat kerasnya. Sehingga lambat-laun negara berkembang tidak sekedar menjadi pasaran atau konsumen negara maju (knowledge-haves-countries) akan tetapi dapat mengembangkan diri juga sebagai produsen dengan mengembangkan pusat informasi, paling tidak menjadi pusat informasi tentang diri kita sendiri, sebagai bangsa.

Dalam kerangka inilah perlu dikembangkan kerja sama antara bangsa-bangsa baik secara bilateral maupun multilateral; baik regional seperti ASEAN maupun global. Sehingga benar-benar dirasakan oleh semua pihak adanya suatu sistem komunikasi global yang sehat, dengan bertumpu pada sistem komunikasi regional dan nasional yang sehat pula. Hanya dengan hubungan saling tergantung yang seimbang ini dapat dikembangkan budaya manusia yang lebih manusiawi. Atau dengan kata lain "segi moral" atau katakan "dimensi moral" dari strategi komunikasi global, regional dan nasional perlu ditonjolkan, agar manusia abad ke-20 ini tidak sekedar menjadi budak dari-pada kemajuan intelektualnya, tetapi dapat menjadi raja karena martabat kemanusiaannya mendapat tempat utama dalam perkembangan sejarahnya sendiri.

Sumber:

Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1982, Pelaksanaan Tahun Ketiga Repelita III (1 April 1981 s/d 31 Maret 1982), Bab XXI dan Bab XIV.

BEBERAPA MASALAH DALAM PENGEMBANGAN PERS YANG BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB

SUKANTO*

PENDAHULUAN

Jika kita mengamati perkembangan kehidupan pers, khususnya mengenai pelaksanaan kebebasan pers di negara kita akhir-akhir ini, diperoleh kesan bahwa pelaksanaan kebebasan pers masih menghadapi berbagai masalah yang rumit. Masalah yang dihadapi itu bukan hanya masalah intern dalam kehidupan pers sendiri, melainkan juga menyangkut hubungan pers dengan pemerintah dan masyarakat. Kasus-kasus yang masih sering dijumpai, seperti konflik antara pers dan pemerintah serta antara pers dan masyarakat, yang mengakibatkan pembredelan dan diajukannya pers ke depan pengadilan, dapat dipandang sebagai gejala masih terdapatnya permasalahan dasar dalam kehidupan pers kita.

Rumitnya pelaksanaan kebebasan pers tersebut, antara lain karena pengertian tentang pers itu sendiri, termasuk pengertian tentang kebebasan pers, masih simpang-siur belum ada kesatuan pendapat. Kesimpangsiuran pengertian pers itu juga menimbulkan kekaburan pada fungsi pers, sehingga membawa pengaruh yang kurang baik dalam interaksi antara pemerintah, pers dan masyarakat.¹ Di samping itu, di dalam masyarakat pers sendiri ada suatu mitos, bahwa pers merupakan "fourth estate"² atau kekuasaan keempat di samping kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Anggapan yang demi-

*Staf CSIS.

¹Lihat Departemen Penerangan, *Himpunan Ringkasan Hasil Penelitian Penerangan 1977-1979*, hal. 83-91.

²Lihat Nono Anwar Makarim, "The Indonesian Press: An Editor's Perspective," di dalam Karl D. Jackson & Lucian W. Pye (ed.), *Political Power and Communication in Indonesia* (Los Angeles: University of California Press, 1978, hal. 259-281).

kian itu dapat menjadi sumber kebanggaan atau kesombongan, tetapi juga dapat menjadi sumber keputusan bagi pers sendiri kalau tidak terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya menjadi bertambah kompleks dengan banyaknya penerbitan pers yang kepentingan dan aspirasinya berbeda-beda pula.

Di samping itu juga diperoleh kesan, bahwa semua pihak kurang menyadari kalau negara kita adalah Negara Demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi hukum. Hal itu berarti, bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku juga mengikat semua pihak. Selain itu, dalam kehidupan bernegara, tidak jarang pula terjadi praktek-praktek penyelenggaraan negara dan konsensus, yang seharusnya diindahkan dan dilaksanakan bersama. Usaha lainnya yang sangat penting, ialah penciptaan iklim yang sehat, yang mampu merangsang lembaga-lembaga kemasyarakatan lebih fungsional dan operasional.

FUNGSI DAN PERANAN PERS DALAM ERA PEMBANGUNAN

Hingga kini, batasan tentang pers masih sering menjadi persoalan. Ada yang memberikan batasan dalam arti luas dan ada pula yang memberikan batasan dalam arti sempit. Dalam arti luas, pers tidak hanya berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya saja, melainkan juga meliputi jenis-jenis media komunikasi lainnya.¹ Telah kita ketahui, bahwa negara kita adalah Negara Demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, pada tempatnyalah jika pengertian tentang pers juga didasarkan dalam kerangka negara hukum, khususnya berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Peraturan perundangan yang berlaku di negara kita, terutama yang berkaitan dengan kehidupan pers, antara lain: (a) Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28; (b) Ketetapan-ketetapan MPR, khususnya Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; (c) Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1967 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1982; (d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pasal-pasal yang mengatur delik-delik pers; (e) Konvensi-konvensi Internasional, khususnya Pernyataan Umum Hak-hak Manusia PBB (Universal Declaration of Human Rights) beserta penjabarannya yang dituangkan dalam Covenant on Economic, Social and

¹Lihat Prof. Oemar Seno Adji, S.H., *Pers, Aspek-aspek Hukum*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1977), hal. 72-79.

Cultural Rights dan Covenant on Civil and Political Rights, yang disahkan dalam Sidang Umum PBB pada tahun 1966.

Di dalam Undang-Undang tentang Pers, pasal 1 ayat (1) disebutkan, bahwa pers adalah lembaga kemasyarakatan alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya. Dari rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa pers: (a) adalah suatu lembaga kemasyarakatan; (b) merupakan salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum; (c) berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, misalnya surat kabar harian, surat kabar mingguan dan majalah.

Sebagai lembaga kemasyarakatan, dikandung arti bahwa keberadaan pers di dalam masyarakat (negara) tidak sendirian, melainkan berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Eksistensi pers bukannya datang tanpa diundang, melainkan saling memerlukan, saling memanfaatkan, saling mempengaruhi dan jalin-menjalin dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dalam satu keterikatan organis masyarakat sebagai suatu kesatuan. Hal itu berarti, bahwa status pers dalam masyarakat merupakan lembaga yang otonom, tetapi tidak berarti otonom secara mutlak yang terlepas dari ikatan sosiologis.

Ditinjau berdasarkan pendekatan politik ataupun pendekatan sistem, pers pun hanya merupakan salah satu bagian dari sistem politik, yakni sebagai unsur dalam infrastruktur politik. Negara kita adalah negara yang menganut paham demokrasi, yang berarti pula negara yang menjunjung tinggi hukum. Demokrasi pertama-tama mengandaikan, bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi adalah pada rakyat. Akan tetapi tidak dilaksanakan oleh rakyat secara sewenang-wenang. Dalam menegara, kodrat manusia dan kemauan merdekanya bekerja sama. Namun demikian, kemerdekaan manusia itu pun bukannya suatu otonomi mutlak, melainkan kemerdekaan yang didasarkan atas kecenderungan-kecenderungan kodratnya dan menunjukkan sasaran yang harus dicapai manusia secara merdeka.¹ Berdasarkan kerangka pemikiran ini, pers dan unsur-unsur infrastruktur politik lainnya jelas bukan suatu otonomi mutlak, karena kemerdekaannya juga didasarkan atas kehendak bersama untuk mencapai tujuan bersama pula. Tujuan bersama itu secara tegas dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu meliputi: (a) untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; (d) ikut

¹Lihat Kirdi Dipoyudo, "Perjuangan Negara Demokrasi Sosial," *Analisa*, No. 3 Tahun 1982

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal itu berarti, bahwa pers sebagai bagian dari sistem politik tanpa kecuali juga terikat dan bertanggung jawab demi terwujudnya tujuan bersama itu.

Dalam era pembangunan sekarang ini, fungsi pers sebagaimana juga telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1966, lebih ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan perjuangan bangsa. Fungsi dan peranan pers itu dirumuskan dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, sebagai berikut: (a) Dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional perlu ditingkatkan kegiatan penerangan dan peranan media massa. Untuk itu penerangan dan media massa bertugas menggelorakan semangat pengabdian perjuangan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional, serta menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; (b) Dalam rangka meningkatkan peranan pers dalam pembangunan perlu ditingkatkan usaha pengembangan pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat serta meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat.

PERS YANG BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain disebutkan bahwa untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya undang-undang dasar, tidak cukup kalau hanya dibaca teksnya saja, melainkan harus dipelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, keterangan-keterangannya dan dalam suasana apa teks itu dibuat. Dengan demikian dapat dimengerti secara benar maksud dan aliran pikiran yang mendasarinya. Cara mempelajari demikian itu besar manfaatnya bila dipergunakan dalam mempelajari peraturan perundangan lainnya. Pengkajian secara itu berarti, bahwa dalam mempelajari suatu peraturan perundangan, konsensus ataupun konvensi, tidak cukup kalau hanya mempelajari pasal-pasal tertentu saja, melainkan harus secara menyeluruh dan utuh.

Demikian halnya jika hendak mengetahui arti sebenarnya dari "kebebasan", khususnya kebebasan pers. Ringkasnya, bahwa kebebasan pers itu merupakan salah satu manifestasi hak-hak asasi manusia, yakni hak akan kebebasan untuk mempunyai pendapat sendiri dan melahirkan pikiran-pikiran, baik secara lisan maupun tulisan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa hak-hak asasi manusia yang secara resmi telah disahkan oleh PBB tahun 1948 dan lebih dijabarkan lagi pada tahun 1966, adalah merupakan hasil perjuangan yang

panjang. Perjuangan tersebut timbul karena terjadinya hal-hal yang dianggap menyinggung perasaan dan merendahkan martabat seseorang sebagai manusia. Dari proses perjuangan tersebut lahirlah beberapa naskah yang secara berangsur-angsur menetapkan adanya hak-hak yang mendasari kehidupan manusia, yang bersifat asasi dan universal.

Perjuangan penegakan hak-hak asasi manusia tersebut bahkan telah berlangsung berabad-abad sebelum Masehi, misalnya dengan lahirnya Kode Hukum Hammurabi dari Babylonia (2100 SM). Dan lebih menampakkan hasilnya setelah lahir naskah Magna Charta di Inggris (1215 M), yang kemudian disusul dengan lahirnya naskah-naskah lainnya, seperti Bill of Rights di Inggris (1689 M), Declaration des droits de l'homme et du citoyen di Perancis (1789 M), Bill of Rights di Amerika Serikat (1789 M), dan The Four Freedoms dari Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, pada tahun 1941 M. Naskah-naskah tersebut dijadikan bahan oleh Komisi Hak-hak Asasi PBB dan diperinci menjadi hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang dituangkan ke dalam Pernyataan Umum Hak-hak Manusia PBB pada tahun 1948. Naskah tersebut kemudian dijabarkan lagi dan tidak hanya berupa "pernyataan", namun telah lebih ditingkatkan menjadi suatu "perjanjian", yaitu dengan lahirnya Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan Covenant on Civil and Political Rights, yang disahkan dalam Sidang Umum PBB pada tahun 1966.¹

Jika naskah-naskah hak-hak asasi manusia, khususnya Pernyataan Umum Hak-hak Manusia PBB, dipelajari secara menyeluruh dan utuh, ada semacam pengakuan juga bahwa kebebasan pada hakikatnya bukan berarti bebas tanpa batas. Terutama ditunjukkan di dalam pasal 29 ayat (2), "bahwa dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasan, setiap orang hanya boleh dikenakan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang, yang maksudnya semata-mata akan menjamin pengakuan dan penghormatan sebagai semestinya terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang-orang lain serta untuk memenuhi syarat yang pantas dari kesusilaan, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis."²

Pengertian kebebasan yang demikian itu sesuai dengan pengertian kebebasan dalam kaitannya dengan negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, manusia mempunyai kemerdekaan, tetapi kemerdekaannya bukanlah suatu

¹Lihat Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 1977), hal. 120-127; dan lihat pula S. Tasrif, SH, *Hak-hak Asasi Warga Negara Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Dasar 1945 dan Perundang-undangan* (Kertas kerja yang disampaikan pada Seminar Hukum Nasional IV oleh BPHN tanggal 26-30 Maret 1979 di Jakarta).

²Lihat "Pernyataan Umum Hak-hak Manusia," *Ensiklopedia Indonesia* (Bandung: NV Penerbitan W. van Hoeve), hal. 29.

otonomi mutlak. Melainkan kemerdekaan yang didasarkan atas kecenderungan-kecenderungan kodratnya dan menunjukkan sasaran-sasaran yang harus dicapai manusia secara merdeka. Namun demikian, sasaran-sasaran itu pun tidak akan pernah tercapai tanpa adanya kerja sama teratur dalam suatu tertib kekuasaan. Demikian halnya dalam kaitannya dengan negara hukum, negara mengakui supremasi hukum dan wajib menjamin tegaknya hukum. Tegaknya hukum berarti pengakuan dan perlindungan terhadap martabat dan hak-hak asasi manusia. Untuk mewujudkannya diperlukan undang-undang dan harus ada pembagian kekuasaan (*trias politica*) yang saling melengkapi dan mengimbangi demi tegaknya keadilan. Dengan demikian, pembatasan-pembatasan hak-hak asasi manusia melalui undang-undang bukannya untuk mengurangi ataupun menghilangkan kebebasan, melainkan justru untuk menjamin hak-hak dan kebebasan-kebebasan setiap manusia, serta untuk memenuhi syarat yang pantas dari segi kesusilaan, ketertiban umum dan kesejahteraan umum.

Negara kita, yang disebut pula Negara Demokrasi Pancasila, secara eksplisit juga mengakui hak-hak asasi manusia, bahkan jauh sebelum lahirnya Pernyataan Umum Hak-hak Manusia pada tanggal 10 Desember 1948. Hal itu jelas terlihat di dalam sila-sila Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan negara-negara lain, terutama karena aliran pikiran atau paham yang mendasari pembentukan negara kita tidak sama dengan di negara-negara lain. Apa yang terkandung dan dikehendaki oleh Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, lebih mengutamakan asas kekeluargaan dan kedaulatan rakyat, bukannya kedaulatan individu seperti yang dimanifestasikan dalam negara yang menganut paham liberalisme. Tegasnya, yang dikehendaki dalam negara kita adalah peri kehidupan dan keseimbangan, ialah keseimbangan antara kepentingan-kepentingan, terutama antara kepentingan individu dan masyarakat (negara).

Asas peri kehidupan dalam keseimbangan tersebut, mendasari segala segi kehidupan, termasuk pula mendasari pelaksanaan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya tentang kemerdekaan mengeluarkan pikiran baik dengan lisan maupun tulisan, yang salah satu bentuk pelaksanaannya adalah kebebasan pers. Pokok-pokok pemikiran tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 dan dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, yaitu yang dikenal dengan rumusan pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Jika dikaji secara lebih mendalam lagi, ternyata bahwa kehendak untuk melaksanakan kebebasan pers yang bertanggung jawab tersebut bukanlah kehendak penguasa belaka, melainkan juga kehendak dari masyarakat pers

sendiri. Hal itu terbukti, bahwa dalam kongres PWI tahun 1955, yang ketika itu masih berlangsung demokrasi yang disebut "demokrasi liberal," bahkan telah mengesahkan Code Jurnalistik PWI, yang di dalamnya menegaskan tak terpisahkannya kemerdekaan pers dan unsur tanggung jawab. Hal itu dituangkan dalam rumusan yang berbunyi sebagai berikut: "Kemerdekaan pers itu akan lebih dapat dijamin berlangsungnya jika setiap wartawan senantiasa dengan ikhlas menyadari perasaan tanggung jawab sebesar-besarnya atas dharma sebagai penuntun, pendidik dan penyuluh masyarakat dan senantiasa menjunjung tinggi kewajiban batinnya untuk bersikap jujur dan untuk mencari kebenaran di dalam menyiarkan berita-berita dan di dalam mengemukakan pendapat-pendapat tentang berbagai masalah kepada khalayak ramai."¹ Kehendak tersebut terus berkembang dan semakin mendalam dengan disempurnakannya Code Jurnalistik PWI menjadi Kode Etik Jurnalistik PWI, serta lahirnya Kode Etik Perusahaan Pers dan Kode Etik Periklanan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kebebasan pers, seperti halnya kebebasan lainnya, pada hakikatnya bukanlah kebebasan untuk berbuat sekehendak hati. Melainkan harus pula selalu menunjang terselenggaranya keselamatan negara, ketertiban umum, kepentingan umum serta segi-segi kesucilaan.

BEBERAPA MASALAH PELAKSANAAN PERS YANG BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB

Tekad bersama untuk melaksanakan kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab tersebut, rupanya belum dapat dilaksanakan secara mulus tanpa adanya hambatan-hambatan. Dalam kehidupan pers selama ini, masih sering terjadi persaingan, polarisasi, bahkan konflik antara pemerintah dan pers, serta antara pers dan masyarakat. Beberapa konflik tersebut ada yang mengakibatkan diajukannya pers ke depan pengadilan, bahkan ada di antaranya yang dikenakan larangan terbit. Misalnya, diajukannya pemimpin redaksi harian Nusantara ke pengadilan dan disidangkannya kasus harian Sinar Pagi dan Bupati Tangerang, serta dilarang terbitnya harian Nusantara, Indonesia Raya, Pedomani, Abadi dan dikenakan larangan terbit sementara majalah mingguan berita Tempo pada bulan April 1982 dan harian Pelita pada bulan Mei 1982.

Sekalipun demikian, dalam kehidupan pers selama 15 tahun terakhir ini, juga telah terjadi beberapa kemajuan yang berarti. Kemajuan tersebut merupakan salah satu perwujudan dari hasil-hasil Sidang Umum MPRS IV

¹Lihat Soebagijo I.N. et al, *Lintasan Sejarah PWI* (Jakarta: PWI Pusat dan Departemen Penerangan, 1977), hal. 50-51.

Tahun 1966. Di antara ketentuan yang ditetapkan, yang utama adalah lahirnya tekad bersama untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Sejak itu semakin terlihat adanya kemauan politik untuk mendorong terciptanya fungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintah dan kemasyarakatan. Misalnya, semakin jelasnya fungsi dan hubungan lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam perkembangan tersebut, terlihat pula adanya kehendak bersama untuk memulihkan kehidupan pers sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yang realisasinya sebagaimana telah dituangkan ke dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 dan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, yakni perlu dikembangkan pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab. Bersamaan dengan perkembangan itu, rupanya dari masyarakat pers ada yang menginginkan "supremacy of the press," bahkan ada yang menghendaki agar pers diakui sebagai "fourth estate."¹ Tetapi perjuangan mereka itu sering ditunjukkan dengan ulsan dan pemberitaan secara berlebihan, sehingga sering menimbulkan konflik dengan kekuasaan (fungsi) lembaga-lembaga lainnya, terutama dengan lembaga eksekutif (pemerintah).

Telah dibicarakan di depan, bahwa sebagai Negara Demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi hukum, negara kita mengakui dan menjamin kebebasan pers, dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan pers yang demikian seharusnya selalu disertai pertanggungjawaban kepada Tuhan, kesucilaan, keamanan dan ketertiban umum, keselamatan negara dan kesejahteraan umum. Sebab kebebasan itu sendiri hanya akan berarti jika diterapkan dalam suatu konsep yang lebih luas, yakni konsep tentang tanggung jawab manusia dalam masyarakatnya. Di samping itu, oleh karena negara kita juga sebagai negara hukum, maka semua peraturan perundangan yang berlaku berarti mengikat semua pihak. Jika semua pihak menyadari akan hal itu, maka peraturan perundangan yang berlaku tersebut seharusnya dipergunakan sebagai pedoman dan penata fungsi lembaga-lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, supaya dalam kegiatan sehari-hari tidak saling bertabrakan ataupun saling mematikan.

Perlu pula disadari bersama, bahwa peraturan-peraturan perundangan tersebut berlaku dalam suatu masyarakat yang sedang berkembang dan mengalami perubahan-perubahan. Oleh karena itu sering pula terjadi, peraturan perundangan yang ada tidak memadai lagi dan tidak dapat mengatasi seluruh perkembangan masyarakat secara umum. Dan sering pula tidak dapat mengatasi masalah-masalah khusus, seperti pemberitaan pers tentang pemilihan

¹ Lihat Astrid S. Susanto, "The Mass Communication System in Indonesia," di dalam Karl D. Jackson & Lucian W. Pye (ed.), *Political Power and Communications in Indonesia* (Los Angeles: University of California Press, 1978), hal. 229-258; dan lihat pula Nono Anwar Makarim, *op. cit.*

umum dan gejolak-gejolak masyarakat lainnya yang dapat memancing timbulnya benturan-benturan yang dilatarbelakangi oleh unsur-unsur SARA. Dalam suasana yang demikian sering terjadi persaingan, polarisasi, bahkan konflik, khususnya antara lembaga eksekutif dan pers. Karenanya, bersamaan dengan berlakunya peraturan perundangan yang mengikat semua pihak, juga berlaku konvensi internasional, konsensus dan praktek-praktek penyelenggaraan negara lainnya sebagai upaya taktis operasional untuk mencegah ataupun menyelesaikan beberapa masalah tersebut. Dalam penyelesaian berbagai masalah tersebut terlihat, bahwa peranan eksekutif dominan, terutama karena sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada akhirnya yang harus mempertanggungjawabkan kepada MPR adalah Presiden.

Lebih besarnya peranan pemerintah tersebut sering menjadi sorotan tajam dari pers. Ada yang mengatakan, bahwa pemerintah terlalu mengada-ada, atau hanya berdalih demi stabilitas nasional, keamanan dan ketertiban nasional, yang dirasakan sebagai pembatasan dan kurang memberikan ruang gerak atau kebebasan kepada pers. Bahkan ada yang mengatakan, bahwa ada beberapa pejabat pemerintah yang lebih banyak menunjukkan kekuasaannya serta terlampaui jauh hendak mengatur dan mencampuri urusan di dalam tubuh pers. Oleh karena itu mereka beranggapan, bahwa off the record news, news embargo, teguran melalui telepon dan pembredelan pers, bertentangan dengan jaminan terhadap kebebasan pers.¹ Peranan pemerintah yang dominan tersebut seharusnya bukan hanya untuk mengatur, melainkan untuk mendorong terciptanya iklim yang sehat dan mampu memberikan peluang bagi tumbuhnya kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik.

Sebaliknya diperoleh kesan, bahwa pers sendiri sering kurang mempunyai rasa tanggung jawab bagi terwujudnya keamanan dan ketertiban nasional, kesejahteraan umum dan keselamatan negara. Ulasan-ulasan dan pemberitaan pemberitaan oleh beberapa surat kabar dan majalah, sering dilakukan tanpa pertimbangan-pertimbangan tersebut. Misalnya ulasan dan pemberitaan menjelang peristiwa Malari 1974, Sidang Umum MPR Tahun 1978 serta menjelang peristiwa Solo dan Pemilihan Umum 1982. Di samping itu, ada suatu penelitian yang menunjukkan, bahwa ada di antara pers yang melaksanakan Kode Etik Jurnalistik PWI hanya karena terpaksa, bahkan ada yang melanggar sendiri. Misalnya masih adanya pemberitaan yang hanya bersifat sensasi belaka, ataupun pemberitaan gosip dan hal-hal yang berbau porno. Sering pula dijumpai pemberitaan tentang kejahatan dan proses peradilan, yang justru dapat merintangai upaya penyidikan dan mempengaruhi upaya penegakan keadilan melalui pengadilan yang bebas tanpa memihak.

¹Lihat harian *Kompas*, 24 Desember 1980, *Sinar Harapan*, 27 April 1981 dan *Pelita*, 24 Agustus 1981.

Di samping itu, ada suatu pemberitaan yang tidak menyebutkan sumber beritanya secara jelas. Misalnya, "menurut sumber yang layak dipercaya" atau "menurut sumber yang tidak mau disebutkan namanya." Tidak jarang pula, ada surat kabar dan majalah yang menyajikan pemberitaan yang dapat merangsang emosional dan psikologis secara berlebihan. Misalnya, "terjadi tabrakan maut yang amat mengerikan," "perkosaan secara sadis," "pembunuhan yang amat mengenaskan," atau "permainan lugas dan solid," dan sebagainya. Kiranya akan lebih baik, jika pemberitaan pers tidak mengarahkan para audience secara berlebihan, melainkan secara wajar dan menyerahkan kepada para audience sendiri untuk menilai pemberitaan pers. Terhadap masalah-masalah semacam itu, di dalam Kode Etik Jurnalistik PWI, khususnya pasal 3, juga disebutkan perlunya pemilihan antara "fakta" dan "opini", untuk mencegah penyiaran berita yang diputarbalikkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pers dan Pendapat Umum Pusat mengenai pelaksanaan pers yang bebas dan bertanggung jawab, antara lain menunjukkan, bahwa selama ini pers lebih banyak memberitakan hal-hal yang negatif pada program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.¹ Pemberitaan-pemberitaan tersebut ada yang lebih bersifat insinuasi, yang dapat menimbulkan kesan keliru kepada para audience, bahkan dapat menimbulkan sikap memusuhi pemerintah. Ulasan-ulasan atau pemberitaan-pemberitaan pers yang demikian itu, mungkin sebagai akibat tafsiran yang keliru terhadap fungsi sosial kontrol pers dan kebebasan pers. Tafsiran itu seolah-olah hanya mengandaikan, bahwa kebebasan pers hanya mengenai hak pembaca untuk memperoleh informasi yang bersifat negatif saja. Bahkan ada ungkapan tidak wajar yang sering dijadikan sumber inspirasi beberapa pers, bahwa "anjing menggigit orang, itu bukan berita, tetapi orang menggigit anjing, ini baru berita." Dengan demikian, jika kalimat bersayap itu diterapkan dalam program pembangunan, "program pembangunan yang sukses, itu bukan berita, tetapi program pembangunan yang gagal, ini baru berita." Penafsiran yang demikian itu, bukanlah tafsiran kebebasan pers yang bertanggung jawab. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa pemberitaan pers harus memuat hal-hal yang positif saja, tetapi juga yang mengandung segi-segi sosial kontrol secara proporsional dan konstruktif. Ada pula kemungkinannya, bahwa sikap beberapa pers yang memusuhi pemerintah itu sebagai akibat peristiwa traumatis pada masa kolonial. Perasaan anti pemerintah kolonial yang membara ketika itu mungkin masih membekas secara mendalam, yang tanpa disadari masih terbawa dalam alam merdeka ini. Atau mungkin pula karena suatu anggapan yang berlebihan, atau terlalu memitoskan pers sebagai kekuasaan ke-4, sehingga di antara pers ada yang merasa takut atau khawatir kalau pers mendapatkan cap "pucat sekali."

¹Lihat Departemen Penerangan, *Himpunan Ringkasan Hasil Penelitian Penerangan 1977-1979*, hal. 83-91.

Selain itu, di dalam kehidupan pers sendiri terdapat semacam ironi. Di satu pihak pers secara lantang menuntut kebebasan, tetapi di lain pihak belum tentu setiap orang dapat menyatakan pendapatnya melalui pers. Negara kita yang menganut paham demokrasi Pancasila, memberikan peluang yang sama kepada setiap warga negara untuk mengusahakan suatu penerbitan pers. Tetapi tidak semua orang mampu mendirikan pers, karena untuk itu memerlukan berbagai persyaratan, antara lain tersedianya modal, tenaga terdidik, semangat pengabdian serta visi dan pengetahuan yang luas. Di samping itu, untuk menyatakan pendapat melalui pers juga dikenakan pembatasan, yakni pembatasan redaksional oleh para pengasuh surat kabar atau majalah. Seorang kolumnis ulung dari Amerika Serikat, Walter Lippmann, menyatakan bahwa pers tidak mungkin menjadi penjaga kebenaran, sejauh mana pun ia mengira. Idea yang menyatakan pers dapat mengoreksi kesalahan atau ketidakbenaran di dalam setiap masyarakat, merupakan suatu ilusi. Karena sebagian besar pemberitaan media massa sebenarnya merupakan argumentasi pendapat-pendapat dan setiap pendapat tentu mempunyai kekuatan di belakangkannya. Keadaan ini terjadi bukan karena itikad buruk dari media massa, melainkan karena pers sebagai pembawa opini publik terlalu lemah, lebih lemah dari yang diduga. ¹

Faktor pemilikan serta banyaknya jumlah surat kabar dan majalah, juga mengandung hal-hal yang negatif dan dapat memperumit kehidupan pers serta masyarakat. Perlu diketahui, bahwa sebagian besar penerbitan pers di negara kita berbeda pemilik dan redaktornya, sehingga aspirasi dan kepentingan pers pun berbeda-beda pula. Di samping itu, penerbitan dan sirkulasi oplah pers hingga kini juga masih memusat di kota-kota. Banyaknya jumlah penerbitan dan memusatnya sirkulasi oplah pers di kota-kota, dapat memberikan informasi yang beraneka ragam, tetapi sering pula terdapat informasi yang saling bertentangan. Membanjirnya informasi yang saling bertentangan tersebut dapat membingungkan sebagian warga masyarakat yang kemampuan seleksinya masih lemah, bahkan dapat pula memanaskan situasi. Apalagi penerbitan pers yang hanya karena motif keuntungan semata, atau melibatkan diri ke dalam pertentangan antar golongan (pada masa Orde Lama lebih dikenal dengan sebutan "jor-joran manipolis"), atau terperangkap suatu gerakan politik yang mempunyai tujuan tertentu, akan mempersulit perwujudan pers yang jujur, obyektif dan manusiawi.

Sering dilupakan oleh pers, bahwa fungsi pers tidak hanya sebagai pemberi informasi, hiburan dan sosial kontrol saja, melainkan juga mempunyai fungsi dalam bidang pendidikan. Seperti halnya tujuan pendidikan pada umumnya,

¹Lihat Dr. Phil. Astrid S. Susanto, *Pendapat Umum* (Bandung: Penerbit Binacipta, 1975), hal. 14-16.

bahwa fungsi pers dalam bidang pendidikan seharusnya juga untuk menumbuhkan dan menonjolkan segi-segi positif dan aspek-aspek yang sehat dalam masyarakat dan individu. Fungsi pendidikan yang dimiliki oleh pers itu bukan untuk memanjakan atau sebagai upaya untuk menjinakkan masyarakat dan individu-individu. Melainkan justru untuk menciptakan pendapat umum yang mampu merangsang peningkatan kreativitas dan produktivitas masyarakat ataupun individu-individu.

Di samping adanya masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintah dan pers sebagaimana disebutkan diatas, di dalam masyarakat sendiri juga terdapat berbagai faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pers yang bebas dan bertanggung jawab. Hasil suatu penelitian menunjukkan, bahwa masih sedikitnya oplah pers dan masih terbatasnya sirkulasi pers di kota-kota, terutama karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah tingkat sosial-budaya, sosial-ekonomi dan sosial-politiknya. Di dalam masyarakat pedesaan, pengaruh pemuka masyarakat, baik para pemimpin formal maupun informal, lebih besar dibandingkan media komunikasi massa lainnya. Mereka juga menjadi pemuka pendapat (opinion leader) masyarakat setempat dan penyaring informasi atau pengaruh yang masuk ke dalam masyarakatnya. Dalam masyarakat yang demikian itu, peranan komunikasi interpersonal, yang berupa komunikasi tatap muka dan secara lisan, mempunyai pengaruh yang lebih mendalam di sanubari masyarakat. Di samping itu, warisan subkultur tertentu, misalnya sistem feodal, masih ada pengaruhnya di dalam masyarakat. Sehingga sebagian warga masyarakat, terutama warga pedesaan, merasa segan untuk memberikan umpan-balik dan merasa takut untuk menyampaikan pendapatnya. Kondisi masyarakat yang demikian itu mempersulit usaha pers dalam mencari berita yang sumbernya berasal dari masyarakat. Ini merupakan salah satu alasan bahwa sebagian besar pemberitaan pers sumber beritanya berasal dari pemerintah.

Dapat dikatakan, bahwa tingkat pendidikan, perekonomian dan kesadaran politik suatu masyarakat dapat menjadi faktor-faktor penyebab timbulnya ketimpangan arus informasi antara masyarakat kota dan pedesaan. Namun demikian, dalam keadaan ketimpangan arus informasi tersebut, peranan media komunikasi massa modern, cenderung lebih menguntungkan masyarakat kota, yang sebagian besar warganya telah mencapai tingkat sosial-ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Dalam keadaan ketimpangan arus informasi itu, terlihat pula bahwa usaha-usaha untuk mengatasinya lebih banyak dilakukan oleh pemerintah dibandingkan usaha pihak swasta, termasuk pers. Kalaupun ada pihak swasta yang ikut menanganinya, seperti proyek koran masuk desa (KMD), itu pun mendapatkan subsidi dari pemerintah. Untuk menangani masalah tersebut, pers dan media komunikasi massa lainnya perlu menjalin kerja sama. Dan sesuai

dengan fungsi masing-masing berusaha menempatkan diri ke dalam sistem dan strategi komunikasi nasional, terutama untuk mempersempit jurang ketidaksetaraan informasi, penyebarluasan pembaharuan dan pembagian hasil-hasil pembangunan. Perwujudannya tidak cukup kalau hanya dilakukan dengan memasukkan permasalahan desa ke dalam koran, membangkitkan kebutuhan masyarakat dan menunjukkan jalan keluarnya, melainkan juga bagaimana agar koran dan majalah masuk di desa dan harganya dapat dijangkau oleh masyarakat pedesaan.

PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas semakin jelas, bahwa negara kita mengakui kebebasan pers sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan hak-hak asasi manusia, khususnya tentang kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Kebebasan pers yang hendak dikembangkan bersama tersebut lebih dikenal dengan rumusan, pers yang bebas dan bertanggung jawab. Yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif, melakukan sosial kontrol yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat serta meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam rumusan itu terkandung maksud, bahwa kebebasan yang dimiliki oleh pers bukanlah berarti kebebasan secara mutlak, melainkan perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan yang demikian itu harus selalu disertai pertanggungjawaban kepada Tuhan, keselamatan negara dan rakyat, serta terjaminnya kebebasan orang lain.

Namun demikian, perwujudan pers yang bebas dan bertanggung jawab tersebut menghadapi banyak tantangan dan masalah. Dalam masyarakat yang sedang berkembang, banyak terjadi perubahan-perubahan di dalam masyarakat, baik yang menyangkut tata-nilai, kekuasaan dan wewenang. Dalam suasana itu, sering dijumpai peraturan perundangan yang ada tidak memadai lagi untuk mengatasi permasalahan perkembangan masyarakat. Bersamaan dengan itu, sering timbul masalah-masalah baru yang sulit dipecahkan hanya dengan menggunakan peraturan yang ada. Misalnya, timbulnya persaingan, polarisasi, bahkan pertentangan, khususnya antara pers dan pemerintah. Dari situasi yang demikian itu dijumpai adanya surat kabar atau majalah yang dikenakan larangan terbit, ada yang diajukan ke depan pengadilan, dan tidak jarang pula lahirnya konsensus, yang intinya sering menjiwai peraturan perundangan baru.

Dari semacam polarisasi dalam pelaksanaan pers yang bebas dan bertanggung jawab tersebut, terlihat adanya berbagai tuntutan dari kalangan pers. Di antaranya, tuntutan yang hanya sekedar menuntut kebebasan pers seperti

yang dimaksudkan di dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku. Ada semacam tuntutan yang menginginkan dilaksanakannya "supremacy of the press," setidak-tidaknya seimbang dengan kekuasaan eksekutif. Ada yang menuntut kebebasan pers yang lebih luas, melampaui ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bahkan ada yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta tidak mengindahkan hak-hak orang lain, ketertiban umum dan keselamatan negara.

Adalah suatu kenyataan, bahwa bangsa kita merupakan bangsa yang majemuk, yang memberikan peluang luas bagi tumbuhnya lembaga-lembaga kemasyarakatan. Namun demikian, harus disadari pula bahwa sekalipun masyarakat kita merupakan masyarakat yang majemuk, tetapi tetap "Bhinneka Tunggal Ika." Baik secara sosiologis, politis, pendekatan sistem atau konsep Wawasan Nusantara, dapat disimpulkan, bahwa bangsa kita merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat. Dan sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, adalah wajar jika dalam penyelenggaraan negara kekuasaan eksekutif lebih dominan. Karena pada akhirnya, terutama yang berhubungan dengan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden/Mandataris yang harus mempertanggungjawabkan kepada MPR.

Sekalipun demikian, sebagai perwujudan dari Negara Demokrasi Pancasila, kekuasaan eksekutif yang dominan itu bukannya untuk berbuat sewenang-wenang, tetapi harus mencerminkan hakikat demokrasi, yakni: dari, oleh dan untuk rakyat. Kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif seharusnya diartikan pula sebagai kemampuan untuk menciptakan iklim yang sehat guna merangsang kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan secara fungsional. Sebaliknya, lembaga-lembaga kemasyarakatan itu sendiri, termasuk pers, seharusnya memanfaatkan peluang tersebut dengan meningkatkan diri dan bekerja keras berdasarkan standar profesional serta menjunjung tinggi hukum dan kode etik masing-masing.

Dengan demikian, tuntutan pers seharusnya bersifat wajar dan profesional selaras dengan perkembangan dan kebutuhan perjuangan bangsa. Dengan semakin jelasnya fungsi masing-masing, kiranya dapat mendorong terciptanya interaksi positif, khususnya antara pemerintah, pers dan masyarakat, yang dapat melahirkan kerja sama untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas masyarakat. Dengan demikian, usaha tersebut diharapkan dapat mengatasi ancaman kemiskinan sosial-budaya bangsa, supaya kebudayaan bangsa kita, khususnya di bidang pers, bukan hanya berupa kebudayaan tiruan atau cangkakan pers asing belaka. Dengan perkataan lain, pengembangan pers yang bebas dan bertanggung jawab tersebut harus selalu mengejawantahkan nilai-nilai martabat manusia Indonesia.

PENDIDIKAN FORMAL SEBAGAI SARANA PEMBAURAN BANGSA

BABARI*

Negara bangsa kita memiliki masyarakat majemuk. Kemajemukan ini dapat dilihat dari sudut etnis ataupun sosiologis. Dari sudut etnis masyarakat bangsa kita terdiri dari berbagai ragam suku bangsa, adat-istiadat, bahasa, ras, ataupun memeluk berbagai macam agama dan menganut berbagai aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari sudut sosiologis masyarakat bangsa kita juga terbagi dalam lapisan-lapisan sosial terutama bila dilihat dari sudut ekonomi. Dari segi tersebut masyarakat kita dapat dibagi atas dua golongan yaitu golongan ekonomi kuat yang sering kali diidentikkan dengan golongan keturunan Tionghoa dan golongan ekonomi lemah. Kemajemukan masyarakat seperti ini perlu ditata sedemikian rupa sehingga tidak menjadi faktor pemecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk itu setiap golongan/kelompok masyarakat bangsa Indonesia harus rela melakukan proses saling membaur baik secara horisontal ataupun vertikal. Secara demikian kita membangun solidaritas bangsa melalui proses pembauran bangsa. Pembauran bangsa pada hakikatnya merupakan suatu proses transkultural antar golongan/kelompok masyarakat yang menjadi warga suatu negara bangsa dengan maksud memperkuat persatuan dan kesatuan negara bangsa itu. Sikap yang perlu dimiliki dalam proses ini adalah terbuka untuk saling memberi dan menerima, harga-menghargai di antara sesama warga negara bangsa dengan tidak memandang perbedaan berdasarkan alasan apa pun. Sedangkan sikap yang harus dibuang adalah prasangka sosial dan kecemburuan ekonomi, di antara sesama warga negara.

Mengingat subyek yang akan membaur adalah manusia warga negara Indonesia, maka salah satu sarana pembinaan dan pengembangan yang efektif

*Staf CSIS.

dan efisien adalah jalur pendidikan formal. Pendidikan formal yang akan menjadi fokus dalam uraian ini adalah tingkat sekolah menengah yang berlokasi di kota. Anak yang bersekolah di kota umumnya heterogen dan berasal dari latar belakang sosial budaya dan sosial ekonomi yang berbeda. Melalui lingkungan sekolah ini mereka dapat berbaur dengan tidak memandang perbedaan sosio-budaya ataupun sosio-ekonomi kehidupan keluarga mereka masing-masing. Suasana pergaulan seperti ini yang perlu dibina dalam lingkungan sekolah. Tentang lingkungan pergaulan di sekolah, Prof. Dr. Driyarkara SY almarhum mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

”Pendidikan merupakan suatu bentuk hidup bersama, dengan maksud membawa anak didik ke tingkat manusia yang purnawan. Pendidikan merupakan suatu bentuk kebersamaan, ada bersama untuk suatu jangka waktu tertentu secara kontinyu, di mana setiap pribadi saling berkomunikasi dan saling mau mengerti untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendidikan merupakan media komunikasi eksistensi manusiawi yang otentik dari manusia dewasa kepada manusia yang lebih muda usia. Bahan yang dikomunikasikan adalah nilai-nilai untuk dimiliki, disempurnakan untuk dilanjutkan anak didik di masa depan.”¹

Secara demikian, kita dapat mengatakan bahwa lingkungan sekolah merupakan salah satu wadah pembauran bangsa yang efektif. Tulisan ini ingin menunjukkan dari arah mana kita mulai, bila kita ingin menjadikan sekolah sebagai wadah pembauran di antara anak didik keturunan Tionghoa dengan anak didik Indonesia lainnya sebagai sesama warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

SITUASI KEHIDUPAN PENDIDIKAN FORMAL DEWASA INI

Usaha mengubah sistem pendidikan kolonial menjadi sistem pendidikan nasional yang demokratis, dimulai secara yuridis formal dengan keluarnya UU No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah di seluruh Indonesia. Undang-undang ini hanya merupakan pernyataan berlakunya UU No. 4 Tahun 1950. Dalam undang-undang tersebut sekolah dibedakan atas dua, yaitu sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah otonom dan sekolah partikelir yang dikelola oleh badan-badan partikelir. Tentang sekolah partikelir ditetapkan lebih lanjut di pasal 13 ayat 1 sebagai berikut: ”Atas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara menganut suatu agama atau keyakinan hidup, maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah partikelir.”² Berdasarkan pada undang-undang tersebut di atas, berdirilah sekolah negeri dan

¹Driyarkara, *Tentang Pendidikan* (Yogyakarta: Penerbitan Yayasan Kanisius, 1980), hal. 32-59.

²Kamadjaja, *Pendidikan Nasional Pancasila* (Yogyakarta: U.P. Indonesia, 1966), hal. 95-107.

berbagai macam sekolah partikelir (swasta) baik yang berdasarkan pada agama, kelompok politik, ataupun pada ras seperti antara lain sekolah partikelir khusus bagi anak-anak keturunan Tionghoa.

Tentang sekolah khusus bagi anak-anak keturunan Tionghoa dapat ditelusuri secara singkat sebagai berikut: sekolah khusus ini sudah ada sejak masa penjajahan dikenal dengan nama HCS, di samping ELS untuk anak Belanda, HAS untuk golongan Arab, dan HIS untuk golongan bumi putera. Setelah merdeka sekolah khusus bagi anak keturunan Tionghoa tetap berjalan. Pada tahun 1957 dengan alasan mencegah propaganda ideologi asing melalui sekolah, pemerintah menutup sekolah khusus Tionghoa di seluruh tanah air. Tetapi beberapa waktu kemudian, dengan pertimbangan menjaga hubungan baik dengan RRC, sekolah khusus Tionghoa dalam jumlah terbatas dibuka kembali, untuk menampung anak-anak Tionghoa yang orang tuanya belum menjadi warga negara Indonesia. Mulai tahun 1957 di lingkungan keluarga Tionghoa sendiri terjadi perbedaan pandangan. Kelompok Tionghoa totok tetap menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah khusus yang menggunakan bahasa Tionghoa sebagai bahasa pengantar; sedangkan kelompok Tionghoa keturunan mulai menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya.¹

Tahun 1967 pemerintah menutup semua sekolah khusus di seluruh wilayah tanah air, melalui Instruksi Presidium Kabinet No. 37/In/6/1967, tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina tanggal 7 Juni 1967. Dalam instruksi tersebut juga ditetapkan di pasal 9 tentang pembauran anak didik, sebagai berikut:

"Di setiap sekolah nasional yang memiliki warga negara asing, jumlah murid warga negara Indonesia secara keseluruhan maupun di setiap kelas harus lebih banyak daripada jumlah murid warga negara asing." Selanjutnya, dalam penjelasannya dikatakan: "tempat yang disediakan bagi anak warga negara asing Cina adalah 40% dalam setiap kelas."²

Dewasa ini masalah perimbangan jumlah murid di suatu sekolah ataupun di dalam sebuah kelas tidak perlu diperdebatkan lagi. Sebagian besar golongan keturunan Tionghoa sudah menjadi warga negara Indonesia, dan mempunyai hak serta kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Masalahnya kini adalah apakah anak-anak warga negara Indonesia keturunan Tionghoa juga memiliki kesempatan yang sama besar untuk masuk sekolah

¹G. William Skinner, "Golongan Minoritas Tionghoa," dalam Melly G. Tan (ed.), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1979), hal. 20-21.

²Lihat Instruksi Presidium Kabinet No. 37/In/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina.

negeri sampai tingkat perguruan tinggi? Karena pada hakikatnya pembauran anak didik tidak lain dari usaha untuk menempatkan anak didik keturunan Tionghoa secara merata dan tersebar di semua jenis sekolah swasta ataupun negeri.

Hambatan utama proses pembauran anak didik dewasa ini adalah perbedaan mutu pendidikan di antara sekolah negeri dengan sekolah swasta ataupun di antara sekolah swasta sendiri. Melly G. Tan dalam suatu seminar di Jakarta mengatakan: "Pertimbangan paling utama bagi golongan anak-anak Tionghoa untuk memilih sekolah adalah mutu sekolah, bukan statusnya swasta atau negeri dan bukan pula jauh dekat letaknya."¹ Dari pandangan tersebut kita dapat mengerti mengapa anak-anak keturunan Tionghoa selalu memilih masuk sekolah swasta tertentu yang bermutu.

Mulai dasawarsa 1970-an perbedaan sekolah berdasarkan mutu semakin dipertajam. Di kota-kota mulai muncul istilah sekolah favorit dan sekolah non-favorit. Sekolah favorit umumnya memiliki sarana dan fasilitas pendidikan yang relatif lengkap, memiliki tenaga guru bidang studi yang pandai, trampil, dan berdisiplin dalam menjalankan tugas sebagai pengajar dan pendidik. Peraturan tata tertib sekolah biasanya dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh guru, murid, ataupun karyawan sekolah lainnya. Para lulusan sekolah favorit biasanya lebih berhasil meneruskan pelajarannya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dilihat dari segi biaya, sekolah favorit dikenal sebagai sekolah mahal. Karena itu sekolah-sekolah tersebut biasanya menjadi tempat penampungan anak-anak dari golongan masyarakat ekonomi kuat. Mengingat sekolah negeri yang favorit tidak memberikan kesempatan yang luas kepada anak-anak dari keturunan Tionghoa, maka mereka umumnya masuk sekolah-sekolah swasta yang favorit. Akibatnya timbul isu-isu tentang adanya sekolah swasta bermutu yang eksklusif, karena mayoritas muridnya adalah anak keturunan Tionghoa.

Di pihak lain terdapat sekolah non-favorit baik negeri maupun swasta. Sekolah-sekolah yang termasuk dalam kelompok ini biasanya tidak atau kurang memiliki sarana dan fasilitas pendidikan yang memadai, tidak memiliki tenaga guru bidang studi yang pandai dan trampil, disiplin dan tata tertib sekolah tidak dijalankan secara baik. Para lulusannya banyak mengalami kesulitan di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sekolah non-favorit ini biasanya menjadi tempat penampungan anak-anak yang berasal dari golongan masyarakat ekonomi lemah. Biaya sekolahnya relatif murah.

¹Melly G. Tan, "Pembauran di Bidang Pendidikan, Suatu Tinjauan Sosiologi," dalam buku *Laporan Lokakarya Nasional Pembauran Pendidikan* (Jakarta, 26-28 Oktober 1981), hal. 65.

Bila kita bandingkan sekolah bermutu dengan sekolah tidak bermutu dari segi jumlah sekolahnya, maka jumlah sekolah tidak bermutu jauh lebih besar daripada jumlah sekolah bermutu. Ini berarti sebagian besar anak usia sekolah belajar di sekolah-sekolah tidak bermutu. Sedihnya, bahwa masuknya anak-anak ke sekolah tidak bermutu, bukan karena kemampuan tingkat intelegensia mereka yang rendah, tetapi karena faktor mahalanya biaya di sekolah-sekolah bermutu.

Suasana pendidikan formal seperti ini dapat menjadi "bumerang" di masa depan, dan yang menjadi penghalang usaha pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa. Berkumpulnya anak-anak keturunan Tionghoa di sekolah swasta bermutu secara eksklusif, dapat mendorong gerakan yang bersifat rasialis. Kenyataan ini yang perlu diubah melalui pembauran anak didik di lingkungan sekolah, terutama di tingkat sekolah menengah, karena anak pada usia itu daya kritis terhadap suasana hidup di sekitarnya mulai tumbuh dan berkembang.

PEMBAURAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN FORMAL

Pembauran pendidikan dapat diartikan secara luas atau sempit. Secara luas, pembauran pendidikan merupakan usaha sadar untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka merealisasikan konsepsi wawasan nusantara. Dalam jangka pendek pembauran pendidikan berusaha menyembuhkan sisa-sisa penyakit warisan kolonial yang membedakan penduduk Indonesia berdasarkan pada ras, suku bangsa, agama, serta setiap golongan penduduk ini memiliki sekolah sendiri-sendiri. Secara sempit, pembauran pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengatur dan membina struktur murid sedemikian rupa, sehingga murid yang berasal dari golongan keturunan Tionghoa tersebar secara merata di sebanyak mungkin sekolah negeri ataupun swasta tingkat sekolah menengah umum atau kejuruan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh pembauran anak didik melalui lingkungan sekolah adalah, agar anak didik dapat: (1) memiliki sikap dan perilaku terbuka terhadap sesamanya, dengan tidak memandang perbedaan berdasarkan alasan apa pun; (2) memiliki cara dan sikap hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan nasional dan menghilangkan kantong-kantong kebudayaan asing; (3) mengadakan komunikasi sosial yang saling isi-mengisi di antara sesama warga negara Indonesia, sehingga dapat menghilangkan sikap hidup yang eksklusif; (4) memakai bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan demikian dapat timbul rasa bangga terhadap bahasa nasional yang satu; (5) memiliki sikap rukun dan dapat hidup bersama dengan orang lain tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras atau golongan; (6) men-

jadi generasi penerus yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan lebih mampu melestarikan kehidupan negara bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Agar sasaran tersebut di atas dapat tercapai, maka sekolah-sekolah umum tingkat menengah, negeri ataupun swasta subsidi yang masih bersifat eksklusif, baik berdasarkan pada ras ataupun agama, perlu segera menata dirinya kembali. Pemerintah perlu memberikan pengarahan dalam proses penataan diri tersebut. Di pihak lain usaha meningkatkan mutu serta meratakan mutu pendidikan di seluruh wilayah tanah air perlu terus diikhtiarkan.

Pendidikan nasional kita memegang asas: semesta, menyeluruh, dan terpadu. Artinya pendidikan nasional khususnya pendidikan formal terbuka bagi semua warga negara Indonesia dengan tidak membedakannya atas dasar apa pun; meliputi semua jenis dan tingkat sekolah umum negeri ataupun swasta; dan pembinaannya dilakukan secara terpadu oleh instansi pemerintah, orang tua dan masyarakat. Asas tersebut di atas belum dapat dilakukan secara baik, mengingat mutu sekolah yang masih bervariasi, serta pilihan sekolah bukan hanya dilakukan oleh anak sendiri sesuai dengan kemampuan otaknya tetapi juga ditentukan oleh orang tua dan guru di sekolah.

PERANAN GURU

Peranan kepala sekolah dan para gurunya sangat menentukan kelancaran pelaksanaan pembauran anak didik melalui lingkungan sekolah. Mereka yang berwenang menetapkan penerimaan murid setiap awal tahun ajaran baru. Karena itu guru-guru harus memahami tujuan, maksud dan sasaran pembauran bangsa melalui lingkungan sekolah. Guru-guru harus mengetahui bahwa penduduk Indonesia hanya terbagi atas dua yaitu, warga negara Indonesia dan warga negara asing (WNA). Tidak ada lagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, Arab, India, Jepang, Belanda; yang selalu mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya. Semua warga negara Indonesia berhak mendapat perlakuan yang sama dalam semua segi kegiatan kehidupan bernegara dan berbangsa, termasuk dalam hal memilih masuk sekolah.

Dalam penerimaan murid baru, kepala sekolah dan guru-gurunya tidak boleh membedakan calon murid berdasarkan pada warna kulit, bentuk tubuh, agama ataupun latar belakang sosio-ekonomi. Jangan sampai para guru di-

¹Lihat Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0170/U/1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Asimilasi (Pembauran) di Bidang Pendidikan.

tuduh sebagai faktor penghambat proses pembauran bangsa melalui lingkungan sekolah. Komersialisasi pendidikan yang diartikan sebagai anak didik calon murid harus membayar sejumlah uang tertentu kepada guru/kepala sekolah, agar dapat memperoleh satu tempat duduk untuk belajar dalam ruang kelas tidak dapat dibenarkan. Perbuatan ini hanya menguntungkan calon murid yang berasal dari golongan ekonomi kuat dan sekaligus tidak manusiawi.

Dalam penerimaan murid baru para guru harus bersikap obyektif. Maksudnya, bila penerimaan murid baru itu berdasarkan pada jenjang nilai hasil test masuk yang diselenggarakan di sekolah, maka kriteria itu dilaksanakan secara konsekuen. Artinya tidak ada lagi calon murid yang dapat menjadi murid di sekolah itu melalui cara/jalan lain. Dan pegangan utama para guru adalah nilai hasil test, bukan pada siapa calon murid itu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, usaha pembauran bangsa melalui sektor pendidikan formal harus dimulai dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan dan meratakan mutu pendidikan di semua jenis dan tingkat sekolah umum negeri ataupun swasta. Secara demikian perbedaan antara sekolah bermutu dan sekolah tidak bermutu secara bertahap dapat diperkecil untuk selanjutnya dihilangkan. Selain itu semua sekolah menengah umum negeri ataupun swasta harus terbuka bagi semua anak warga negara Indonesia. Ini berarti para guru pada saat penerimaan murid baru tidak boleh membedakan calon murid berdasarkan ras, suku, golongan ataupun agama. Pada tahap awal pelaksanaan, pemerintah perlu memberikan pengarahan khusus kepada para guru tentang hal pembauran bangsa melalui lingkungan pendidikan di sekolah ini.

Pungutan resmi berupa SPP, dibuat sama bagi semua anak didik di satu sekolah. Sumbangan wajib dari orang tua murid, yang dibuat sesuai dengan kedudukan sosial ekonomi keluarga anak didik dikelola oleh POMG. Secara demikian, semua anak di sekolah merasa diri sama dalam hal besarnya jumlah SPP. Di pihak lain wadah POMG dapat menjadi sarana komunikasi intensif di antara guru dan orang tua murid untuk saling memberikan informasi tentang perkembangan belajar anak, ataupun komunikasi di antara sesama orang tua murid sendiri. Dari sini diharapkan pula akan terjadi proses pembauran di lingkungan keluarga anak didik. Dengan cara ini, prasangka sosial ataupun kecemburuan ekonomi yang ada dalam kehidupan bermasyarakat secara bertahap dapat hilang. Mungkin juga wadah POMG ini dapat dipakai sebagai salah satu sarana sosialisasi P-4 di lingkungan masyarakat.

PERANAN WAYANG SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI

SUKANTO*

PENDAHULUAN

Wayang tidak hanya dijumpai di Jawa dan Bali saja, melainkan juga terdapat di beberapa negara Timur Tengah, Asia Tenggara dan RRC. Namun demikian, dalam tulisan ini yang akan lebih banyak dibicarakan adalah wayang di Jawa, khususnya wayang kulit (wayang purwa), yang tampaknya ada hubungannya dengan pandangan hidup ataupun sikap hidup orang Jawa (wong Jawa).

Jika tulisan ini lebih banyak membicarakan salah satu kebudayaan dari satu golongan etnis saja (sub-kultur), hal itu bukanlah dimaksudkan untuk menonjolkan sukuisme atau usaha Jawanisasi. Melainkan melalui pemahaman sub-kultur itu diharapkan dapat memacu proses integrasi bangsa. Karena sebagian orang beranggapan, bahwa wayang bukan hanya sekedar pertunjukan belaka, melainkan di dalamnya terkandung unsur-unsur religi, kesenian, kemasyarakatan, bahasa, teknologi, pengetahuan dan ekonomi. Bahkan ada pula yang mengidentifikasikan dirinya dengan tokoh-tokoh wayang yang menjadi idolanya. Dengan demikian, jika orang-orang Jawa, besar kemungkinannya ini dapat memperlancar komunikasi secara inter-kultural, dan pada gilirannya akan lebih mempercepat proses ke arah persatuan dan kesatuan bangsa.

Di samping itu, hingga kini wayang (seni pewayangan) masih sering menjadi obyek penelitian, baik yang dilakukan oleh para peneliti Indonesia bukan Jawa maupun para peneliti bangsa asing. Dari berbagai hasil penelitian dika-

*Staf CSIS.

takan, bahwa pewayangan Jawa merupakan bagian kebudayaan Jawa yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun, baik dalam bentuk cerita lisan maupun contoh yang disertai dengan perbuatan. Dikatakan juga, bagi yang hendak mempelajari sifat dan hidup kejiwaan orang Jawa, tidak dapat mengabaikan pendalaman literatur wayang. Ditambah pula suatu fakta, bahwa suku Jawa merupakan suku yang terbesar di Indonesia dan tersebar ke seluruh pelosok tanah air, kiranya mempelajari wayang kulit berguna sebagai salah satu cara untuk mengetahui pandangan hidup ataupun sikap hidup orang Jawa. Ditinjau dari kedekatan hubungan dan peranan wayang bagi orang Jawa, kiranya dapat disimpulkan bahwa wayang dapat pula digunakan sebagai media komunikasi, baik bagi kalangan orang-orang Jawa maupun dengan orang-orang bukan Jawa, bahkan orang-orang dari bangsa asing.

Untuk lebih memperjelas hubungan antara orang Jawa dan wayang, dalam tulisan ini akan dibicarakan perkembangan wayang selayang pandang, hubungan wayang dengan pandangan hidup dan sikap hidup orang Jawa, serta wayang sebagai media komunikasi. Dari penelaahan itu, diharapkan dapat diketahui kekuatan dan kelemahannya, sehingga fungsi wayang dapat lebih dioptimalkan lagi.

PERKEMBANGAN WAYANG SELAYANG PANDANG

Kebudayaan adalah semua hasil dari karya, rasa, cipta dan karsa masyarakat. Dan di dalam kebudayaan terkandung unsur-unsur religi, kesenian, bahasa, kemasyarakatan, ekonomi, pengetahuan dan unsur teknologi. Berdasarkan batasan itu, kiranya jelas bahwa tiada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan. Perbedaannya mungkin hanya terletak pada tinggi atau rendah, atau sempurna atau sederhananya kebudayaan suatu masyarakat.¹

Demikian pula halnya dengan masyarakat Jawa. Menurut suatu penelitian sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, masyarakat Jawa telah mengenal wayang. Tradisi wayang di Jawa bermula dari kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan roh orang-orang yang telah meninggal dunia. Mereka beranggapan, bahwa roh orang-orang yang telah mati itu masih berada di sekitar tempat tinggalnya, yaitu di pohon-pohon yang besar dan rindang, batu-batu besar, gunung-gunung dan benda-benda lainnya, dan dianggap sebagai pelindung mereka yang masih hidup. Dari kepercayaan itu orang kemudian menggambar roh-roh berupa wayang, yang berarti bayang-bayang atau bayangan.

¹Lihat Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), dan lihat Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1977).

Wayang tersebut dijadikan suatu perangkat pemujaan roh, yang pada umumnya dilakukan pada waktu malam hari, dengan anggapan bahwa roh-roh akan datang pada tengah malam hari.

Seirama dengan perkembangan jaman, rupanya wayang pun mengalami perubahan dan perkembangan. Jika semula unsur religinya lebih dominan, dalam perkembangan kemudian unsur kesenianlah yang lebih dominan, sekalipun masih sangat erat kaitannya dengan unsur religi, etika dan kemasyarakatan. Misalnya, wayang yang semula bentuknya sangat sederhana lebih disempurnakan menjadi wayang kulit yang dipakai untuk mempergelarkan cerita Ramayana dan Mahabharata. Perkembangan bentuk itu rupanya berjalan seiring pula dengan kemajuan seni rupa atau seni gatra, yang dalam hal wayang kulit sangat rumit dan kompleks. Demikian pula mengenai perkembangan perangkat lainnya, seperti bentuk tabir yang semula sangat sederhana menjadi layar (kelir) yang terbuat dari kain putih; nyanyian-nyanyian untuk mengundang datangnya roh-roh menjadi irama lagu (seni suara); bunyi-bunyian pengiring upacara pemujaan roh menjadi irama nada gamelan (seni karawitan); tempat pemujaan (pringgitan) berkembang menjadi panggung atau pentas (seni drama); penerangan yang semula sederhana berkembang dalam bentuk dian (blencong) dan kini sering diganti dengan lampu penerangan dari minyak tanah atau listrik. Bahkan cerita yang dibawakan pun mengalami perkembangan, terutama karena pengaruh agama Hindu, Islam dan Kristen.

Seni pewayangan dapat dikatakan merupakan kesenian yang klasik dan kompleks. Di dalamnya terkandung seni-seni suara, musik, gerak, rupa, drama dan seni pedalangan. Masing-masing seni yang mendukungnya itu mengandung nilai-nilai yang awet dan memberikan inspirasi pada segala jaman, tetapi juga membuka kemungkinan perkembangan. Misalnya, ditinjau dari segi seni rupa (seni gatra atau bentuk), wayang yang semula terbuat dari kulit sederhana berkembang menjadi wayang kulit (wayang purwa), yang macam-macamnya sangat beraneka-ragam dan masing-masing mengandung makna (arti) tersendiri. Dalam perkembangan selanjutnya, rupanya bentuk wayang kulit itu menjadi inspirasi terciptanya berbagai jenis wayang berikut variasinya. Seperti, munculnya wayang gedog, yang terbuat dari kulit untuk membawakan cerita Panji dari Jenggala; wayang klitik atau kerucil yang terbuat dari kayu tipis untuk membawakan cerita Damarwulan dari Majapahit; wayang golek yang terbuat dari kayu untuk mempergelarkan cerita Menak (Jayengrana) dari Arab; wayang beber yang terbuat dari kain yang dilukis dan inti lukisannya diceritakan oleh ki dalang secara turun-temurun; serta bermunculannya wayang orang, wayang topeng, wayang Pancasila, wayang suluh, wayang wahyu (wayang Katolik) dan sebagainya. Dari bermacam-macam jenis wayang tersebut, banyak para pengamat yang menyatakan bahwa wayang

kulit (wayang purwa) yang dipergunakan untuk mempergelarkan cerita Ramayana dan Mahabharata, yang paling sempurna.¹

Ditinjau dari segi religi atau filsafat, wayang merupakan penggambaran konsep religi atau filsafat masyarakat Jawa yang khas, sekalipun tidak luput dari pengaruh agama-agama. Kiranya tidak berlebihan apa yang dinyatakan oleh J. Kats dalam bukunya "Het Javaansche Toneel De Wayang Poerwa," bahwa siapa yang hendak mempelajari sifat dan hidup kejiwaan orang Jawa, tidak dapat mengabaikan untuk mendalami literatur wayang.² Namun demikian, mendalami literatur wayang bukanlah hal yang mudah, antara lain karena sumber-sumber yang tertulis sangat langka dan penyebarannya tidak saja secara lisan, melainkan juga dengan contoh yang disertai perbuatan, serta menggunakan bahasa dan gerakan isyarat.

Di samping itu, buku Ramayana dan Mahabharata yang menjadi induk cerita (pakem pedalangan) telah banyak mengalami perubahan, yang dilakukan oleh para pujangga Jawa. Bahkan tidak sedikit gubahan para pujangga ataupun ki dalang sendiri, yakni berupa cerita-cerita carangan atau pengembangan dari induk cerita. Selain itu, seni pedalangan yang berkembang di Jawa lebih banyak berkembang melalui tradisi lisan. Pada waktu yang silam, untuk menjadi dalang banyak dilakukan dengan berguru pada dalang tua atau dalang yang telah mendapatkan sebutan "Ki Dalang" (nyantrik pada Ki Dalang). Pemahaman cerita-cerita wayang dilakukan dengan menghafal dan mengingat-ingat apa yang telah diajarkan oleh ki dalang. Oleh karena itu dapat dipahami, jika pada waktu itu bermunculan cerita-cerita yang berbagai-macam versinya, bahkan banyak yang menyimpang jauh dari pakem pedalangan yang asli.

Meskipun terdapat perubahan dan perkembangan, tetapi ada beberapa hal yang dapat dikatakan konstan, terutama yang menyangkut segi filsafat, hidup kejiwaan dan yang menyangkut hidup utama (laku utama) atau etika.³ Seorang ahli Barat, Frits Wagner, dalam bukunya "The Art of Indonesia," juga menyatakan, bahwa bagi masyarakat Jawa, wayang bukan sekedar pertunjukan, melainkan penggambaran dunia abstrak, di mana gagasan-gagasan menjadi bentuk dan angan-angan menjadi kenyataan.⁴ Dr. Franz von Magnis,

¹Lihat Ir. Sri Mulyono, "Wayang Sudah Ada Jauh Sebelum Hindu Datang," *Sinar Harapan*, 3 Januari 1975; dan lihat pula R.M. Wasisto Surjodiningrat M.Sc., "Wayang dan Generasi Muda," *Berita Buana*, 31 Maret 1976.

²R.M. Wasisto Surjodiningrat M. Sc., *ibid.*

³Lihat George A. Fowler Jr., et. al., *Java A Garden Continuum* (Singapore: Tien Wah Press Ltd., 1974).

⁴R.M. Wasisto Surjodiningrat M. Sc., *loc. cit.*

lebih menjelaskan, bahwa dalam wayang kita tidak berhadapan dengan teori-teori umum, melainkan dengan model-model tentang hidup dan kelakuan manusia. Model-model itu dengan terang sekali mempertunjukkan problematik eksistensi kita, tetapi tidak pernah dapat memberikan kepastian. Lebih jauh dikatakan, bahwa ibarat suatu model, wayang membuka kemungkinan-kemungkinan tindakan manusiawi bagi kita, tetapi tidak menawarkan jawaban-jawaban yang simpel. Kita sendiri yang harus menemukan, apa yang menjadi kewajiban kita masing-masing.¹

Seperti halnya dengan ajaran-ajaran keutamaan, etika atau moral pada agama-agama, masyarakat Jawa juga mengenal keutamaan Jawa atau hidup utama (laku utama). Hal itu juga terlihat jelas dalam pewayangan, baik melalui cerita-cerita maupun tokoh-tokoh wayang, yakni dipergelarkannya persoalan-persoalan kemanusiaan, pertentangan antara baik dan buruk, keadilan dan kelaliman serta nilai-nilai yang dapat dikatakan universal. Namun demikian, yang menyangkut segi religi, khususnya tentang ajaran Ketuhanan, ada perbedaan yang prinsipial dengan agama-agama. Sistem kepercayaan Jawa mempunyai tatanannya sendiri, seperti terlihat dalam ajaran Ketuhanan pada berbagai aliran kebatinan. Tatanan yang khas tersebut bukanlah sekedar atau asal tatanan belaka (bukan asal diotak-atik waton gatak), melainkan berdasarkan petunjuk-petunjuk (wewarah) dari Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, hal-hal yang konstan juga ditemukan dalam istilah Tuhan, yakni jika masyarakat Jawa Kuno percaya terhadap roh, dalam perkembangan selanjutnya sekalipun ada pengaruh agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen, dalam masyarakat Jawa masih dijumpai istilah Tuhan yang khas, seperti Yang Memberi Hidup (Kang Paring Gesang), Yang Menguasai Dunia (Kang Murbeng Jagad), Yang Mahakuasa (Kang Mahakuasa), dan lain sebagainya.

Dalam pewayangan, perkembangan ajaran yang menyangkut religi juga terlihat secara jelas. Misalnya, dalam cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata pada jaman kerajaan Hindu, ajaran Ketuhanan terhadap Tri Murti, tampak dominan. Namun demikian, dalam cerita-cerita yang digubah oleh para pujangga Jawa, seperti Bima Suci dan Minto-rogo, ajaran Ketuhanan yang khas Jawa lebih dominan. Ajaran Ketuhanan yang khas Jawa itu masih bertahan dan memasyarakat, sekalipun ada pengaruh agama-agama. Misalnya, pengaruh agama Islam terlihat pada penterjemahan pusaka kerajaan Amarta "Kalimasada" menjadi "Kalimat Sahadat" dan pengaruh agama Katolik tampak melalui wayang wahyu. Dapatlah dikatakan, bahwa kepercayaan Jawa (Kejawen) tersebut merupakan akulturasi aktif terhadap ajaran Ketuhanan yang terjalin dalam agama-agama. Masyarakat Jawa (wong Jawa) pada umumnya mengerti akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Namun yang

¹Dr. Franz von Magnis, "Renungan Tentang Etika Dalam Wayang," *Kompas*, 7 Agustus 1981.

lebih dipentingkan adalah hidup utama atau perilaku kehidupan yang utama dalam sehari-harinya, sehingga paham tentang Tuhan Yang Maha Esa seolah-olah hanya samar-samar tidak berkepribadian tegas. Bagi masyarakat Jawa, yang pokok adalah hidup utama, yakni terciptanya keselarasan antara kehidupan lahir dan batin. Hal itu memperlihatkan, bahwa masyarakat Jawa sebenarnya tidak hanya menyombongkan kekuatan dirinya saja, melainkan juga mengakui keagungan Tuhan, yakni dengan mengamalkan petunjuk-petunjuk Tuhan Yang Maha Esa secara nyata.

HUBUNGAN WAYANG DENGAN PANDANGAN HIDUP DAN SIKAP ORANG JAWA

Masyarakat Jawa, tegasnya suku Jawa, semula berdiam di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Kemudian, seiring dengan perubahan dan perkembangan jaman, sebagian dari mereka pindah tempat tinggal ke daerah-daerah lain. Di antaranya ada yang pindah karena daerahnya tertimpa bencana alam, program kerja paksa (rodi), kontrak kerja di Deli, transmigrasi, bekerja pada suatu instansi pemerintah dan swasta, dan lain sebagainya.

Telah disinggung di depan, bahwa tiada suatu masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan. Demikian pula halnya mengenai masyarakat Jawa, mereka juga mempunyai kebudayaan tersendiri yang lain dengan kebudayaan suku bangsa lainnya (kebudayaan sub-kultur). Adanya kebudayaan-kebudayaan dari suku-suku tersebut merupakan faktor yang menandai dan berpengaruh terhadap kemajemukan masyarakat Indonesia. Kenyataan adanya berbagai kebudayaan suku bangsa tersebut justru merupakan unsur ketunggalikaan masyarakat Indonesia. Dalam pada itu, ketunggalikaan memberikan peluang yang paling baik bagi berlangsungnya perkembangan dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, di dalam masyarakat Indonesia terjadi semacam perkawinan antara kebhinekaan dan ketunggalikaan secara terus-menerus. Oleh karena itu, tidak akan terjadi proses saling meniadakan antara yang satu terhadap yang lain. Kebhinekaan tidak merusakkan tetapi justru memperkaya ketunggalikaan, demikian sebaliknya, ketunggalikaan juga memberikan ruang untuk hidupnya kebhinekaan.

Masyarakat Jawa yang kelihatannya homogen itu, di dalamnya juga didapati perbedaan-perbedaan. Kelompok orang-orang Jawa yang bertempat tinggal di daerah pantai, desa pertanian padi, desa perkebunan, pegunungan serta di kota-kota kecil dan kota-kota besar, jelas memiliki perbedaan kebudayaan. Sementara itu, ada yang membagi masyarakat Jawa ke dalam kelompok-kelompok dan lapisan-lapisan sosial tertentu. Misalnya, ada yang membagi ke dalam lapisan bangsawan, priyayi, saudagar dan "wong cilik" (para buruh

tani, buruh, pekerja tukang dan petani). Ada yang membagi ke dalam kelompok santri dan abangan. Ada yang membedakan kelompok Jawa pesisir dan pedalaman. Ada yang membagi ke dalam kelompok yang beragama Islam, Hindu, Protestan, Katolik dan Budha. Dan ada lagi yang membagi ke dalam golongan asli dan turunan orang-orang asing.

Perbedaan-perbedaan itu dapat menimbulkan perbedaan pandangan hidup, baik pandangannya terhadap Tuhan, manusia sesama, maupun terhadap alam lingkungannya. Namun demikian, pandangan hidup yang berlainan itu tidak selalu berarti perbedaan yang menyolok dalam sikap hidupnya. Orang-orang Jawa yang memeluk agama Islam, Hindu, Budha, Protestan dan Katolik, sering menampilkan sikap hidup yang sama, karena mereka adalah orang-orang Jawa. Suatu sikap hidup tidak hanya berhubungan dengan agama yang dianut oleh seseorang, melainkan juga berkaitan dengan adat, latar belakang kebudayaan, bahkan juga dengan watak bangsanya.¹

Pandangan orang-orang Jawa terhadap wayang juga berbeda-beda dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Semula, orang-orang Jawa memandang wayang sebagai suatu perangkat pemujaan roh orang-orang yang telah meninggal dunia. Kemudian wayang lebih dipandang sebagai salah satu bentuk kesenian, sekalipun masih sangat erat kaitannya dengan unsur religi dan kemasyarakatan. Penghargaan terhadap seni pewayangan juga tidak dapat dipisahkan dari pandangan hidup dan berbagai golongan usia orang-orang Jawa. Misalnya, orang-orang Jawa di daerah pedesaan pedalaman, lain kedekatannya dengan wayang dibandingkan dengan orang-orang Jawa yang berada di daerah pesisir dan di kota-kota besar. Demikian pula bagi generasi mudanya, akan semakin berkurang kadar penghargaaannya terhadap seni pewayangan, lebih-lebih bagi generasi muda yang bertempat tinggal di luar daerah Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

Bagi masyarakat Jawa di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur, tampaknya penghargaaannya terhadap seni pewayangan masih tetap berkembang. Bagi mereka, wayang merupakan folklore Jawa. Dr. James Dananjaya mengatakan, bahwa definisi pewayangan Jawa identik dengan definisi folklore orang Jawa. Dijelaskannya, bahwa folklore Jawa adalah sebagian dari kebudayaan orang Jawa yang tersebar dan diwariskan turun-temurun secara tradisional. Ditinjau dari sudut penghargaaannya terhadap seni pewayangan di antara berbagai kelompok orang Jawa tersebut, maka mereka dapat digolongkan ke dalam ahli waris aktif atau pasif. Ahli waris aktif, antara lain terdiri dari para dalang, sarjana dan ahli wayang serta mereka yang

¹Lihat Dr. S. De Jong, "Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa," *Basis*, Pebruari 1974.

tahu soal wayang. Sedangkan ahli waris pasif, yang jumlahnya jauh lebih banyak, terdiri dari mereka yang mencintai dan simpatisan seni pewayangan.¹

Seni pewayangan, seperti halnya dengan seni-seni tradisional lainnya, kini sedang terlibat dalam proses perubahan masyarakat. Dalam menghadapi proses itu, para ahli waris aktif seni pewayangan rupanya tidak hanya menjaga kelestariannya saja, melainkan juga berusaha mengembangkan dan memperluas wilayah apresiasi. Di antara mereka ada yang membentuk organisasi-organisasi pewayangan (misalnya: Senawangi, Ganasidi dan Pepadi), menyelenggarakan seminar-seminar dan sarasehan-sarasehan tentang seni pewayangan. Setiap tahun diadakan semacam perlombaan seni pedalangan, yakni melalui angket dalang kesayangan, terutama untuk memelihara dan meningkatkan kreativitas para dalang. Para seniman karawitannya banyak yang menciptakan nada, irama dan lagu (gending) baru sesuai dengan perkembangan pembangunan, misalnya gending tanam padi, modernisasi desa, pembangunan desa, penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan gending-gending lainnya. Para pujangga wayang dan dalang juga menciptakan cerita-cerita (lakon) serta berusaha memperbarui bahasa dan mempersingkat waktu pertunjukan wayang. Tampaknya ada pula pengasuh surat kabar yang memberikan perhatian terhadap seni pewayangan, yakni dengan memberikan rubrik khusus ataupun menyajikan artikel-artikel tentang wayang, antara lain harian Berita Buana, Berita Yudha, Kompas, Sinar Harapan dan Suara Karya. Bahkan lebih dari itu, seni pewayangan telah memasuki lapangan industri dan bisnis, yakni melalui usaha perkasetan dan penerbitan buku-buku tentang wayang.

Bagi kelompok orang-orang Jawa tertentu, wayang erat-berkaitan dengan pandangan hidupnya. Wayang bukan sekedar pertunjukan hiburan belaka, melainkan merupakan penggambaran dunia abstrak, di mana gagasan-gagasan menjadi bentuk dan angan-angan menjadi kenyataan. Mereka mengadakan pertunjukan wayang sesuai dengan pandangan hidupnya terhadap makna hari, bulan dan tahun. Cerita yang dibawakannya pun disesuaikan dengan pandangannya terhadap arti peristiwa kelahiran, sunatan, perkawinan dan tujuh bulan mengandung. Misalnya, bila anak lahir pada waktu tengah hari, menjelang matahari terbenam atau anak tunggal di antara kakak dan adik yang meninggal, ia dianggap lahir secara tidak wajar. Agar ia terbebas dari bahaya, perlu diadakan selamat dengan mengadakan pertunjukan wayang kulit dengan cerita "Murwa Kala". Pertunjukan wayang kulit dengan lakon itu tidak dapat dibawakan oleh sembarang dalang, melainkan harus dibawakan oleh ki dalang yang telah mempunyai ilmu kebatinan (ngelmu) yang

¹Dr. James Dananjaya, "Pewayangan Jawa Adalah Folklore Orang Jawa," *Sinar Harapan*, 3 Nopember 1973.

tinggi. Demikian pula mengenai perangkat pertunjukannya, lain dengan pertunjukan biasa, tetapi dilengkapi dengan beraneka-warna sesajian.

Hubungan wayang dan pandangan hidup orang-orang Jawa meliputi pula pandangan hidupnya terhadap Tuhan, manusia sesama, dan alam lingkungan (dunia). Jika cerita-cerita wayang dan lukisan tokoh-tokoh wayang diamati secara cermat, maka hal-hal itu mempunyai makna tersendiri sesuai dengan perkembangan jamannya. Misalnya, cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata, serta cerita-cerita carangan, seperti Arjuna Wiwaha, Bharata Yudha, Bima Suci dan Mintorogo, mempunyai makna yang berkaitan dengan pandangan hidup orang-orang Jawa terhadap Tuhan, manusia sesama dan Tuhan. Demikian pula mengenai tokoh-tokoh wayang juga mempunyai makna sendiri-sendiri. Tokoh wayang ksatria ada yang dilukiskan menunduk ke bawah, memandang lurus ke depan, serta diberi warna beraneka-ragam, ada yang kuning emas, putih, hitam dan merah, yang kesemuanya itu ada maknanya. Sedangkan tokoh-tokoh raksasa dilukiskan secara lain, ada yang bermata satu dan dua, bertangan satu dan dua, serta diberi warna beraneka-rupa pula. Tokoh-tokoh ksatria melambangkan kehalusan (alus), sedangkan tokoh raksasa melambangkan kekasaran (kasar). Demikian pula mengenai arti lukisan muka dan warna (wanda) tokoh-tokoh wayang berlainan pula maknanya. Warna putih atau hitam melambangkan kematangan "ngelmu" dan kebajikan, warna kuning emas melambangkan kearifan dan kebijaksanaan, sedangkan warna merah melambangkan nafsu, keangkara-murkaan atau kelaliman.

Di samping itu, cerita-cerita wayang juga menunjukkan pandangan hidup mengenai konsep kemasyarakatan (kenegaraan). Dalam cerita Ramayana, gambaran mengenai kerajaan Alengka, Magada, Ayodya dan Mantili, berbeda keadaan negerinya. Demikian pula dalam cerita Mahabharata, kerajaan Astina dan Amarta ada perbedaan tata-negaranya. Kerajaan Astina di bawah pemerintahan kerabat Kurawa, pemerintahannya tidak bersih dan tidak berwibawa, para pemimpinnya lalim dan gaya hidupnya sangat mewah. Berlainan dengan kerajaan Amarta, sekalipun negerinya kecil, tetapi masyarakatnya adil dan makmur, para pemimpinnya bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bersifat ksatria dan memperhatikan aspirasi rakyatnya. Kedaulatan rakyat Amarta ditunjukkan dengan peran Semar, Gareng, Petruk dan Bagong, yang menurut cerita kesaktiannya melebihi para pemimpinnya. Demikian pula mengenai hubungan "agama" dan negara, khususnya mengenai peranan kaum brahmana (pendeta) di kerajaan Astina dan Amarta, juga berbeda peranannya. Di kerajaan Astina, para brahmana terlihat terlampau jauh mencampuri urusan negara dan pemerintahannya. Sedangkan di Amarta, para brahmana lebih banyak sebagai penasihat rokhani, yang justru lebih meningkatkan kewibawaannya dan disegani oleh para ksatria Pandawa.

Pandangan hidup masyarakat Jawa terhadap Tuhan, manusia sesama dan dunia, dalam hubungannya dengan wayang, ada kaitannya dengan sikap hidup orang-orang Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Inti cerita dan perilaku tokoh-tokoh wayang banyak yang benar-benar merasuk di dalam kejiwaannya dan membimbing perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengenai cerita Minto-rogo yang digubah oleh Susuhunan Paku Buwono III pada abad XIX. Cerita ini berbeda dengan cerita Arjuna Wiwaha gubahan Empu Kanwa dalam pemerintahan Raja Erlangga pada abad XI, baik tentang isi maupun gaya bahasanya. Cerita Minto-rogo menceritakan Arjuna sebagai seorang raja di Madukara menjadi seorang yang bijak yang bertapa, yaitu Minto-rogo. Arti bertapa dalam cerita Minto-rogo bukan lagi sebagai persiapan untuk hidup di dunia seperti yang digambarkan dalam Arjuna Wiwaha, melainkan bertujuan magis dan menjadi sikap hidup, yakni semacam cara berdoa. Sedangkan mengenai sikapnya terhadap dunia, ialah mendambakan untuk menjadi hidup utama di tengah dunia. Makna cerita Minto-rogo ini bagi masyarakat Jawa, khususnya yang kadar kejawaannya masih tinggi, sangat berpengaruh, karena ajaran kebatinan Minto-rogo merupakan teladan sebagai manusia yang sempurna.¹

Demikian pula mengenai hubungan sikap hidup orang-orang Jawa dengan tokoh-tokoh wayang. Seperti apa yang dinyatakan oleh Dr. Franz von Magnis, bahwa dalam wayang dikandung model-model tentang hidup dan kelakuan manusia, tetapi tidak pernah memberikan jawaban-jawaban yang pasti. Mungkin karena tiada jawaban-jawaban yang pasti, maka banyak orang Jawa yang mengidentifikasikan dirinya dengan tokoh-tokoh wayang, terutama sesuai dengan idolanya masing-masing. Apa yang diceritakan dan digambarkan mengenai tokoh-tokoh wayang, dijadikan pedoman atau teladan, bahkan ditiru dan dipraktekkan menjadi sikap hidup dalam kehidupan sehari-hari.² Hal itulah yang menyebabkan banyak orang Jawa yang namanya serupa dengan nama tokoh-tokoh wayang tertentu, misalnya Bima, Sena, Boma, Arjuna, Permadi, dan sebagainya.

Makna cerita dan tokoh-tokoh wayang masih besar pengaruhnya pada sikap hidup orang-orang Jawa. Cerita wayang, terutama gambaran mengenai keadaan suatu kerajaan, yang rajanya bertindak adil dan bijaksana, serta rakyatnya sejahtera (tata-tentrem kerta raharja), merupakan suatu konsep atau model pemerintahan yang sangat didambakan dalam kehidupan yang nyata. Tokoh-tokoh kesatria, yang diceritakan dan digambarkan "melihat ke

¹Lihat Dr. S. De Jong, *loc. cit.*, *Basis*, Juni 1974.

²Lihat Ir. Sri Mulyono, *Wayang dan Karakter Manusia* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1979); dan lihat pula Ir. Sri Mulyono, *Tripama Watak Satria dan Sastra Jendra* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1978).

bawah," halus budi-pekertinya, sebagai satria pinandita dan kesatria utama, merupakan tokoh-tokoh idola banyak orang Jawa. Model kepemimpinan "Asta Brata" dalam cerita Ramayana dan munculnya teori kepemimpinan Ki Hajar Dewantara "ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun-karsa, tut wuri handayani," serta ajaran "Ratu Adil," hingga kini masih merupakan tipe ideal kepemimpinan masyarakat Jawa.

WAYANG SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI

Dari berbagai batasan mengenai pengertian komunikasi, ada kesan bahwa di dalamnya terkandung unsur-unsur: siapa yang berbicara, berbicara tentang apa, melalui media apa, kepada siapa dan bagaimana efeknya. Dalam uraian di depan, secara sepintas telah dibicarakan mengenai unsur "kepada siapa," yakni tentang orang-orang Jawa dalam kaitannya dengan wayang. Uraian berikut ini akan lebih banyak membicarakan unsur "melalui media apa," yakni tentang peranan wayang sebagai media komunikasi interkultural.

Telah pula disinggung di depan, bahwa wayang merupakan salah satu bentuk dari sub-kultur Jawa. Namun karena keunikannya, dalam arti dapat diuraikan berdasarkan unsur-unsur kebudayaan, dapat dikatakan bahwa wayang merupakan salah satu bentuk kebudayaan Jawa yang khas, yang memberikan ciri tersendiri pada kebudayaan nasional. Dari segi keseniannya saja, seni pewayangan merupakan salah satu kesenian yang lengkap. Karena di dalamnya terkandung seni drama, seni suara, seni karawitan, seni rupa, seni gaya dan seni pedalangan. Direktur Akademi Teater Bandung, Drs. Saini K.M., menilai bahwa wayang kulit Jawa merupakan teater yang paripurna dan fungsional.¹

Suatu pertunjukan wayang kulit dapat dikatakan sukses, jika seni-seni yang mendukungnya itu fungsional, dalam arti dapat menciptakan suasana pemandangan dan kejiwaan yang indah-syahdu, terutama bagi para penonton ataupun pendengarnya. Terciptanya suasana yang demikian itu tergantung pada peran ki dalang. Besarnya peranan ki dalang sebenarnya telah ditunjukkan dari arti dan makna kata "dalang" itu sendiri. Ada yang mengatakan, bahwa perkataan "dalang" dari akar kata "dah" dan "lang". "Dah" berarti pula "dang", "sang" atau "hyang", yang berarti memberikan hormat kepada seseorang. Sedangkan "lang" berarti orang yang mengembara dengan maksud untuk memberikan penerangan, penjelasan dan memberikan pelajaran kepada khalayak ramai. Dari arti perkataan itu, dapat dikatakan bahwa dalang berfungsi jamak, yakni sebagai pemimpin, pendidik, penerang dan

¹Lihat *Kompas*, 20 April 1981.

penghibur.¹ Oleh karena itu, dalang apalagi ki dalang ("ki" berarti sebutan bagi seseorang yang tinggi pengetahuan atau "ngelmu"-nya), mempunyai kedudukan sosial tinggi di masyarakat sekitarnya. Ia merupakan pemimpin informal dan pemuka pendapat yang dianggap mempunyai pengetahuan umum yang luas (kepemimpinan polymorphic).

Oleh karena itu untuk menjadi dalang atau ki dalang yang berwibawa, disegani dan dicintai masyarakat (populer), tidak mudah, melainkan harus dapat memenuhi berbagai persyaratan. Di antaranya yang utama adalah: (1) antawacana, yakni penguasaan bermacam-macam suara tokoh wayang; (2) amardi basa, yakni penguasaan bahasa setiap tokoh wayang; (3) amardawa lagu, yakni penguasaan nada, irama dan lagu serta kemampuan dalam menyesuaikan dengan adegan yang dipentaskan; (4) renggep, yakni kemampuan menciptakan suasana yang hidup sehingga menarik perhatian para penonton ataupun pendengar; (5) enges, yakni kemampuan membawakan perasaan gerak setiap tokoh wayang; (6) banyol, yakni kemampuan melawak secara sehat dan dapat membangkitkan tertawa tanpa menyakitkan hati para penonton ataupun pendengar; (7) sabet, yakni kemampuan menggerakkan wayang sesuai dengan tingkah laku yang hendak dicerminkan dengan gerak-gerak itu; (8) kawi radya, yakni kemampuan menceritakan keadaan dengan menggunakan bahasa pedalangan yang tertib; (9) paramakawi, yakni penguasaan terhadap bahasa kawi dan kosa katanya; (10) paramasastra, yakni penguasaan terhadap tata bahasa; (11) awicarita, yakni penguasaan cerita berdasarkan pakem atau cerita-cerita carangan; (12) tutug, yakni kemampuan membagi adegan dan waktu pertunjukan secara serasi.²

Dalam kaitannya dengan proses komunikasi, ki dalang dapat berfungsi sebagai komunikator, media atau komunikan, bahkan dapat memerankan ketiga fungsi itu sekaligus. Sebagai komunikator, ki dalang dapat menyampaikan seluruh kemampuan dan pengetahuannya secara leluasa kepada para penonton ataupun pendengarnya. Sebagai media, ki dalang dapat dikatakan merupakan saluran (channel) sampainya suatu pesan kepada sasaran. Sedangkan sebagai komunikan, ki dalang merupakan obyek atau sasaran suatu pesan. Oleh karena itu, ki dalang tidak hanya menjadi saluran dan secara bulat menelan pesan-pesan komunikatornya, melainkan harus mampu menyaring dan berimprovisasi, yang tidak merusak suasana pertunjukan secara keseluruhan. Hal itu berarti, bahwa di samping menguasai persyaratan-persyaratan tersebut di atas, ki dalang seharusnya memiliki visi dan pengetahuan umum yang luas.

¹Lihat Ir. Sri Mulyono, *loc. cit.*; dan lihat pula Heroesoekarto, "Kedudukan Dalang Sepanjang Masa," *Suara Karya*, 2 Juli 1975.

²Drs. Singgih Wibisono, "Peningkatan Mutu Seni Pewayangan dan Pedalangan Indonesia," *Berita Yudha*, 13 April 1974; dan lihat pula Heroesoekarto, *loc. cit.*

Ditinjau dari segi efeknya, berbagai pertunjukan serta usaha pengawetan, pengembangan dan perluasan wilayah apresiasi-seni pewayangan pada dewasa ini, dapat dikatakan cukup menggembirakan, setidaknya-tidaknya seni pewayangan tidak terlindas proses perubahan masyarakat. Dari berbagai kesan sekilas (pengamatan) pada suatu pertunjukan wayang kulit, serta berita-berita dan artikel-artikel pada berbagai media massa, tampaknya wayang kulit (wayang purwa) masih mendapat tempat di hati para penonton ataupun pendengarnya. Hal itu terlihat, bahwa pada setiap pertunjukan wayang kulit di daerah pedesaan, dapat dikatakan selalu dipenuhi para penonton. Bahkan dijumpai suasana yang mengharukan, karena ada di antara penonton yang tertawa dan gembira, tetapi ada yang sampai menangis karena tokoh yang menjadi idolanya kalah dalam peperangan. Demikian pula pada setiap pertunjukan wayang purwa yang disiarkan melalui RRI, radio amatir atau radio swasta niaga, masih mendapatkan perhatian para pendengarnya. Bahkan pertunjukan wayang kulit yang telah dikomersialkan pun masih banyak mendapatkan perhatian yang baik. Misalnya, bisnis penyewaan kaset-kaset wayang kulit di daerah pedesaan hampir menjadi mode bisnis masa kini. Masyarakat di kota-kota besar pun masih banyak yang memperlihatkan kecintaannya terhadap seni pewayangan. Hal itu terungkap dengan adanya berita, bahwa harga karcis pada pertunjukan wayang kulit di Surabaya tanggal 31 Desember 1979 sampai mencapai Rp 39.000,00. Dan dalam pertunjukan wayang kulit di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 1980, ruang basket di Istora Senayan yang sebenarnya hanya dapat menampung 5.000 orang sampai penuh sesak.¹ Hal itu semua menunjukkan, bahwa masih ada kedekatan hubungan antara wayang kulit dan para penonton ataupun pendengarnya, khususnya orang-orang Jawa.

Namun demikian, di samping keberhasilannya itu, juga terdapat kelemahan-kelemahannya, antara lain peluang yang tersedia untuk menyampaikan pesan sangat sedikit dan kurang komunikatif, para dalang yang memiliki visi dan pengetahuan umum yang luas sangat terbatas, cerita-cerita yang dibawakan banyak yang diulang-ulang sehingga membosankan, bahasa yang dipergunakan dalam pertunjukan bahasa Jawa sehingga sulit dimengerti oleh orang-orang bukan Jawa, waktu pertunjukannya terlalu panjang dan biaya pertunjukannya mahal sehingga dapat menjadi pertunjukan elit dan kurang merakyat. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, Direktur Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gajah Mada, antara lain mengatakan bahwa pertunjukan rakyat tradisional mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsi ekspresif, mencerminkan perwatakan tokoh-tokoh sehingga perannya dalam sosio-drama lebih dapat dipahami, baik dalam kaitannya dengan motivasi, sikap, maksud maupun kedudukan sosialnya. Kedua, fungsi instru-

¹Lihat *Warta Berita Antara*, 2 Januari 1980 dan *Kompas*, 11 Nopember 1980.

mental, artinya dapat menjadi podium untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Berdasarkan dua fungsi itu, khususnya fungsi instrumental, pertunjukan wayang purwa kurang komunikatif, karena peluang yang tersedia sangat sedikit, yakni hanya pada saat "goro-goro" (saat tampilnya Semar, Gareng, Petruk dan Bagong). Demikian halnya mengenai pertunjukan wayang suluh, beban pesannya terlalu berat sehingga suasananya menjadi sangat jenuh.¹

Masalah sedikitnya peluang tersebut, mungkin masih dapat diatasi, yakni melalui pembenahan cerita dan pembagian adegan (plot) pertunjukan wayang kulit. Telah dibicarakan di depan, bahwa cerita-cerita wayang kulit yang ada pada dewasa ini sebagian besar bukan asli cerita Ramayana dan Mahabharata, melainkan cerita carangan, bahkan pengembangannya lebih lanjut. Seni pewayangan merupakan kesenian klasik, dalam arti mengandung nilai-nilai yang awet dan dapat memberikan inspirasi pada segala jaman. Oleh karena itu, seni pewayangan juga mengandung peluang untuk diperbarui dan disempurnakan secara terus-menerus, yakni dengan menciptakan cerita-cerita carangan baru dan pembaruan seni-seni yang mendukungnya tanpa merusak nilai-nilai yang klasik.

Pada umumnya adegan-adegan pertunjukan wayang kulit dibagi dalam tiga babak. Pertama, adegan yang berlangsung antara jam 20.00 - 24.00, yang biasanya diiringi nada dan irama gamelan yang disebut "patet nem." Dalam babak ini berisi pendahuluan (jejeran), yang menggambarkan maksud cerita (lakon), tetapi dilukiskan secara tersirat. Kedua, antara jam 24.00 - 03.00, dengan iringan nada dan irama gamelan yang disebut "patet sanga." Babak ini didahului dengan adegan "goro-goro" selama sekitar 1 jam, dan kemudian diikuti dengan adegan yang menggambarkan inti cerita. Pada waktu yang silam, dalam babak ini ki dalang memberikan pelajaran "ngelmu" (ajaran kebatinan) tentang hakikat manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia sesama dan dunia, melalui tokoh wayang brahmana atau pendeta. Sedangkan babak ketiga, berlangsung antara jam 03.00 hingga selesai sekitar jam 05.00, dengan iringan nada dan irama gamelan yang dinamakan "patet manyura." Dalam babak ini dipertunjukkan cara dan contoh penyelesaian masalah, tetapi diungkapkan dengan bahasa isyarat (bahasa pasemon). Oleh karena itu, para penonton atau pendengarnya sendiri yang harus menyimpulkan makna ceritanya. Pembagian adegan pertunjukan tersebut memperlihatkan, bahwa dalam setiap babak terbuka peluang bagi penyisipan pesan-pesan pembangunan. Namun demikian, pembaruan dan penciptaan peluang untuk komunikasi tersebut seharusnya tidak merusak suasana dan citra keindahan seni pewayangan secara utuh.

¹Lihat *Kompas*, 21 Maret 1981.

Keberhasilan dalam membawakan cerita-cerita baru beserta penyerasian pembabakannya sangat tergantung pada peranan ki dalang. Dalam arti, ki dalang seharusnya mampu berkreasi dan berimprovisasi, sehingga tercipta suasana keindahan yang memukau dan memikat para penonton ataupun pendengarnya. Sisipan-sisipan pesan dalam suasana yang indah syahdu tersebut kiranya tidak akan mengurangi penghargaan para penonton ataupun pendengarnya. Namun demikian, pada dewasa ini para dalang yang mampu berkreasi dan berimprovisasi demikian sangat langka. Hal itu karena pengaruh pendidikan dalang yang lebih banyak dilakukan secara informal. Sebagaimana telah disinggung di depan, bahwa pada masa yang lalu untuk menjadi dalang lebih banyak dilakukan melalui pendidikan informal, yakni dengan berguru pada dalang yang telah berpengalaman. Di samping itu, pendidikan umum para dalang pada umumnya juga rendah, sehingga kemampuannya untuk mendalami literatur wayang dan pengetahuan umum yang berkaitan dengan masalah pembangunan juga sangat minim.

Beberapa hal itu memberikan petunjuk, bahwa pada waktu sekarang ini sudah masanya mengembangkan kemampuan dalang melalui sistem pendidikan yang lebih baik. Dalam arti, di samping pentingnya pendidikan yang berkaitan dengan segi-segi keseniannya, juga perlunya persyaratan pendidikan umum (formal). Namun demikian, upaya pengembangan tersebut seharusnya tidak berhenti di situ saja, melainkan dasar-dasar yang telah dikuasainya itu perlu dikembangkan lebih lanjut berdasarkan ukuran profesional, sehingga benar-benar menjadi ahli, dalam arti menjadi ki dalang yang sebenarnya. Untuk menunjang usaha-usaha ke arah itu, kiranya tidak cukup kalau hanya sering dilakukan seminar-seminar dan sarasehan-sarasehan seni pedalangan saja, melainkan juga dituntut tindak nyata. Sekolah-sekolah dan kursus-kursus seni pedalangan serta seni-seni pendukung seni pewayangan lainnya seharusnya lebih menyempurnakan diri, antara lain dengan memperbarui kurikulum serta menyempurnakan cara-cara belajar dan mengajarnya. Di samping itu, organisasi-organisasi yang berkecimpung dalam seni pewayangan, terutama Senawangi (Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia), Ganasidi (Lembaga Pembinaan Seni Pedalangan Indonesia) dan Pepadi (Pembinaan Pedalangan Indonesia), lebih fungsional, dalam arti benar-benar menjadi organisasi profesi. Organisasi-organisasi itu seharusnya tidak hanya menjadi pembina untuk menjinakkan para dalang saja, melainkan juga menciptakan peluang yang memberikan kemungkinan untuk menjadikan para dalang benar-benar ahli, kreatif dan berbudi-pekerti luhur. Dengan demikian, maka ajaran tridarma "melu handarbeni, melu hangrungkebi, mulat sariro hangroso wani" sungguh-sungguh tertanam pada para dalang, baik demi kelestarian seni pewayangan maupun kelangsungan negara dan bangsa.

Di samping masalah peluang dan cerita yang membosankan, pemakaian bahasa Jawa, juga menjadi masalah dalam pengembangan seni pewayangan.

Dalam proses perubahan masyarakat ini, khususnya bagi orang-orang Jawa yang tergolong dalam generasi muda dan yang bertempat tinggal di luar daerah Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur, mungkin akan semakin berkurang penguasaan bahasa Jawanya, bahkan mungkin juga tidak mengerti sama sekali. Kekurang-penguasaan bahasa Jawa itu, besar kemungkinannya akan mengurangi kecintaannya terhadap seni pewayangan. Karenanya upaya pengindonesiaan wayang kulit, baik pemakaian bahasa Indonesia dalam pertunjukan maupun penerbitan buku-buku tentang wayang, seharusnya semakin disempurnakan. Pengindonesiaan wayang dapat pula merangsang penghargaan orang-orang bukan Jawa terhadap seni pewayangan. Ashadi Siregar mengatakan, bahwa proses identifikasi kepribadian seorang Jawa selalu ditujukan pada personifikasi tokoh wayang. Jika seorang bukan Jawa juga mengadakan identifikasi serupa, atau sedikitnya memahami identifikasi yang berkembang dalam masyarakat Jawa, agaknya komunikasi antar masyarakat kultural yang berbeda ini dapat lebih efektif. Manakala komunikasi yang berbasis pada kultur ini dapat intensif, kiranya proses integrasi bangsa bisa dipacu.¹

Waktu pertunjukan yang panjang dan biaya pertunjukan yang mahal, rupanya juga dapat menjadi penghambat usaha pengembangan seni pewayangan. Mengenai masalah waktu pertunjukan yang panjang itu, pada waktu yang lalu pun telah menjadi bahan pergunjungan masyarakat pecinta seni pewayangan. Ada yang berpendapat, bahwa wayang hanya hiburan atau kesenian belaka, sehingga asal nilai keindahannya dapat terjaga, waktu pertunjukannya dapat dipersingkat. Ada pula yang berpendapat, bahwa wayang bukan pertunjukan hiburan belaka, melainkan juga mengandung nilai-nilai keindahan, filsafat (kejawen) dan kemasyarakatan. Karenanya kurang dapat menerima usaha-usaha untuk mempersingkat waktu pertunjukan wayang kulit. Demikian pula mengenai masalah biaya pertunjukan, juga menjadi bahan polemik yang saling bertentangan. Terlepas dari polemik-polemik tersebut, tampaknya kedua masalah tersebut ada pengaruhnya dalam masyarakat. Misalnya, pertunjukan wayang kulit kebanyakan hanya diselenggarakan oleh anggota-anggota masyarakat yang kaya. Kalaupun ada anggota masyarakat yang kurang mampu menyelenggarakan pertunjukan wayang kulit, banyak di antara mereka yang terjerat hutang dan menjual miliknya yang berharga, seperti tanah dan ternaknya. Hal tersebut menyebabkan seni pewayangan semakin kurang merakyat, dalam arti semakin langka yang menyelenggarakan pertunjukan.

Di antara jalan ke luar untuk mengatasi masalah tersebut, adalah melalui usaha mempersingkat waktu pertunjukan, yakni dengan mengurangi adegan-

¹Lihat Ashadi Siregar, "'Metamorfosa' Wayang ke Bentuk Kontemporer," *Sinar Harapan*, 26 Januari 1974.

adekan yang tidak penting dalam setiap babak dan pemanfaatan teknologi komunikasi modern yang tepat guna. Usaha-usaha tersebut kiranya masih akan menimbulkan berbagai masalah sampingan. Antara lain, bagi masyarakat Jawa, khususnya para ahli waris aktif dan pasif generasi tua dan yang bertempat tinggal di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur, tampaknya lebih menghargai seni pewayangan yang klasik. Sementara itu, pemanfaatan teknologi modern melalui usaha perkasetan, rupanya juga banyak merugikan para dalang dan paguyuban karawitan yang kurang populer. Oleh karena itu, usaha pengawetan, pengembangan dan perluasan wilayah apresiasi seni pewayangan, seharusnya memperhatikan banyak hal. Antara lain, memperhatikan para ahli waris seni pewayangan yang klasik. Mereka kiranya akan menghargai usaha pengembangan yang dilakukan dengan memperkaya keseniannya dan secara hati-hati menyelaraskannya dengan langgam perkembangan masa kini. Di samping itu, hendaknya juga memperhatikan aspirasi generasi muda, baik dari masyarakat Jawa maupun bukan Jawa. Bagi mereka kiranya dapat lebih menerima usaha-usaha pembaruan seni pewayangan, misalnya usaha pengindonesiaan wayang, menciptakan cerita-cerita baru, penerbitan buku tentang wayang berbahasa Indonesia dan asing, serta pemanfaatan teknologi modern yang tepat guna.

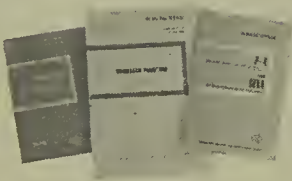
PENUTUP

Dari uraian tersebut, kiranya menjadi jelas bahwa antara wayang kulit dan orang-orang Jawa ada kedekatannya. Wayang kulit dapat dikatakan merupakan salah satu kebudayaan Jawa yang khas, yang mengandung unsur-unsur religi, kesenian, bahasa, kemasyarakatan, pengetahuan, ekonomi dan teknologi. Dari segi keseniannya saja memperlihatkan, bahwa wayang kulit merupakan kesenian yang kaya. Di dalamnya terkandung seni rupa, seni suara, seni gaya, seni karawitan, seni drama dan seni pedalangan. Keunikan itulah kiranya yang menarik perhatian para peneliti hingga kini, baik para peneliti bukan Jawa maupun para peneliti dari bangsa asing. Karena keparipurnaannya itu, wayang kulit dapat memerankan berbagai fungsi, antara lain memberikan ciri khas terhadap kebudayaan Indonesia, hiburan, media pendidikan dan penerangan, serta pemacu terciptanya integrasi bangsa. Agaknya perlu direnungkan bersama pernyataan Dr. S. De Jong, bahwa seorang Jawa yang tidak mengingkari atau meremehkan asal-usulnya merupakan sebuah batu landasan bagi bangsa dan negara Indonesia. Meremehkan tradisinya sendiri mencerminkan suatu aspek dari underdeveloped.¹

¹Lihat Dr. S. De Jong, *loc. cit.*

Pernyataan seperti itu, kiranya bukan dimaksudkan untuk menonjolkan sukuisme atau sebagai usaha Jawanisasi. Melainkan suatu himbauan untuk tidak mempertentangkan hidup modern dan tradisi. Karena kehidupan yang baik seharusnya dituntun oleh tradisi yang berkembang dari potensi yang mendukungnya sesuai dengan langgam kehidupan kekinian. Bahkan lebih dari itu, dengan lebih dipahaminya sebagian kebudayaan Jawa itu, akan dapat dipergunakan sebagai media komunikasi interkultural, yakni antara masyarakat (orang-orang) Jawa dan bukan Jawa. Sebagaimana dinyatakan oleh Ashadi Siregar, bahwa manakala komunikasi yang berbasis pada kultur ini dapat intensif, kiranya proses integrasi bangsa bisa dipacu. Adalah suatu kenyataan, bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang "Bhinneka Tunggal Ika," yang terdiri dari berbagai suku, memeluk berbagai agama dan memiliki bermacam-macam kebudayaan. Melalui pemahaman kebudayaan suatu suku bangsa, seperti pemahaman seni pewayangan, kiranya tidak akan merusakkan ketunggalikaan, melainkan justru akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dapat kiranya dipahami pula, bahwa seni pewayangan bukanlah kesenian yang telah mandeg, melainkan kesenian yang klasik yang memberikan peluang pula bagi usaha penyempurnaannya. Sebagai kesenian klasik, wayang kulit antara lain mengandung model-model tentang hidup dan kelakuan manusia yang dapat memberikan inspirasi pada segala jaman. Tetapi bersamaan dengan itu, juga membuka kemungkinan untuk penciptaan model-model baru yang sesuai dengan langgam perkembangan masa kini. Penciptaan model-model baru serta usaha-usaha pengembangan dan penyempurnaan lainnya, kini sudah waktunya dilakukan secara terencana dengan kesungguhan hati. Di antara usaha-usaha itu, yang utama adalah usaha pendidikan secara profesional, baik mengenai seni pedalangannya maupun seni-seni pendukung seni pewayangan lainnya. Pelaksanaan usaha tersebut perlu memperhatikan keseimbangan antara segi kesenian dan keilmuannya, serta penciptaan iklim yang memberikan peluang untuk berkarya secara kreatif dan dapat berimprovisasi. Segala daya-upaya yang dilakukan berdasarkan ukuran profesional dan mutu yang lebih baik tersebut, kiranya akan meningkatkan dan memperluas wilayah penghargaan terhadap wayang kulit, sehingga peranannya sebagai media komunikasi akan semakin lebih berarti pula.



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa majalah dan buku-buku:

ANALISA

terbitan berkala, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Termasuk dalam seri ini adalah MONOGRAF yang membahas satu analisa tertentu. Harga per eks Rp. 500,— langganan setahun (12 nomor) Rp. 6.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp. 4.800,—

THE INDONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulan, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp. 800,—, langganan setahun (4 nomor) Rp. 3.200,—

BUKU—BUKU

hasil penulisan staf CSIS baik mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada:

BIRO PUBLIKASI — CSIS

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Jl. Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat Telepon 349489

Untuk menunjang kegiatan pengkajian CSIS juga menyediakan PERPUSTAKAAN dan CLIPPINGS yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah:

PERPUSTAKAAN CSIS dan BIRO INFORMASI DAN DATA CSIS

Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat, Telepon 356532-5